



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAPKIN)

2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2021. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2021, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2021 (periode renstra 2020-2024), evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat - memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan

sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 18 Februari 2022

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech,Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2020-2024 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2021. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2021 diukur terhadap 29 indikator kinerja utama yang akan dicapai. Pada tahun 2021, dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 24 (dua puluh empat) indikator mencapai target dengan kategori “baik” ($90\% \leq x < 110\%$); 1 (satu) indikator mencapai kategori “cukup” ($70\% \leq x < 90\%$); 1 (satu) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, 3 (tiga) indikator mencapai target dengan kategori “sangat baik” ($110\% \leq x < 120\%$). Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan pangan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada tahun 2021 semua sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta sudah dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya:

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	95.60	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	102.49	Baik
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	101.59	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	108.94	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100.22	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	93.64	Baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	108.54	Baik
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	100.41	Baik
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	100.53	Baik
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	112.29	Sangat Baik
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	99.42 Efisien	Baik

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 41.686.698.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan pada tahun 2021 sebesar Rp 41.538.323.342,- (empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga

ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 99.64% dengan tingkat efisiensi 100%. Balai Besar POM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama pengawasan dan pembinaan terpadu dengan lintas sektor terkait di pemerintah provinsi DKI Jakarta dan organisasi masyarakat dan pelaku usaha yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta
2. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar aman dari bahan berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).
3. Melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM dengan 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fasilitasi mencakup pelatihan, fasilitasi sarana produksi, desk penggunaan aplikasi sertifikasi CPPOB dan e registrasi pangan olahan
4. Memperluas akses layanan publik Balai Besar POM di Jakarta dengan memanfaatkan tenaga Pembina yang dinamakan AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) yang merupakan tenaga dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) yang berada di 267 Kelurahan wilayah DKI Jakarta
5. Pembentukan fasilitator Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dengan memberdayakan tenaga pendamping Jakpreneur

yang dimiliki oleh 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

6. Meningkatkan Kerjasama *post border* dengan lintas sektor terkait dan mengoptimalkan pemanfaatan inovasi Laron Baja
7. Optimalisasi penggunaan laboratorium BSL-2 untuk pengujian Covid19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta
8. Peningkatan koordinasi dan kapasitas sebagai Balai koordinator Regionalisasi Laboratorium
9. Peningkatan pengawasan secara online dan patroli siber pada media online
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas sehingga dapat mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Jakarta.



BADAN POM

HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan **terobosan** di tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kolaborasi BBPOM di Jakarta dan Anggota Komisi IX DPR RI Dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan



Pada Selasa, 23 Februari 2021, BBPOM di Jakarta bersama dengan Tokoh Masyarakat, Anggota Komisi IX DPR RI, melakukan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan di Jakarta Selatan. Kegiatan ini

dihadiri oleh peserta dari komunitas masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, dan Majelis Taklim di wilayah Jakarta Selatan dengan dibagi menjadi beberapa sesi sesuai aturan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Narasumber kegiatan adalah Kepala BBPOM di Jakarta, Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes dan Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si serta Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Andi Kurniadi, M.Log, Apt.

2. PPNS BBPOM di Jakarta Hadiri Pemusnahan di Bea Cukai Kantor Pos Baru Jakarta

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Jakarta menghadiri undangan pelaksanaan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta, Selasa, 6 April



2021. Barang yang menjadi milik negara tersebut beberapa di antaranya meliputi minuman beralkohol, suplemen kesehatan berupa vitamin, dan obat-obatan yang merupakan komoditi Obat dan Makanan yang menjadi objek pengawasan Badan POM.

3. Bimbingan Teknis Laboratorium BBPOM di Jakarta

Balai Besar POM di Jakarta memperkuat kompetensi penguji dengan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) laboratorium dengan narasumber dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan.



4. Pandemi Tidak Menyurutkan Langkah Pengawasan Obat dan Makanan di Kepulauan Seribu

Pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2021 di wilayah Kepulauan Seribu



Utara dan Kepulauan Seribu Selatan yang mencakup pengawasan sarana Produsen Pangan MD dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP); sarana pelayanan kefarmasian yaitu Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah,

Puskesmas, serta sarana retail Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan termasuk juga intensifikasi pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kefarmasian.

5. Curhat UMKM Jakpreneur Perempuan



Kolaborasi kegiatan virtual Jakpreneur antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dilaksanakan pada 26 Juli 2021 yang diikuti 308 (tiga ratus delapan)

peserta. Kegiatan ini untuk menjamin pemastian mutu serta ijin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Penguatan Zona Integritas Menuju WBBM : Penegakan Komitmen, Refleksi Implementasi WBK dan Capacity Building



BBPOM di Jakarta berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan Zona Integritas. Capaian Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang telah diraih pada Tahun 2020 merupakan suatu amanah yang harus terus di pertahankan. Menindaklanjuti hal tersebut, BBPOM di Jakarta melaksanakan berbagai kegiatan Penguatan Komitmen Zona Integritas Menuju WBBM pada 27 Agustus 2021 serta Refleksi Implementasi WBK pada 22 November 2021. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan *Capacity Building* pada 25, 26 dan 30 November 2021.



7. Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BBPOM di Jakarta

Audit resertifikasi QMS ISO 9001:2015 dilaksanakan pada 13 Agustus 2021 untuk memotret efektivitas dan efisiensi kegiatan yang berfokus pada pelayanan pelanggan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG). Dengan demikian Tim Auditor merekomendasikan BBPOM di Jakarta untuk memperoleh Sertifikat ISO 9001: 2015.

8. Uji Covid19 Bentuk Kontribusi BBPOM di Jakarta Terhadap Penanggulangan Covid-19



Balai Besar POM di Jakarta mengadakan bimbingan teknis terkait pengujian spesimen COVID-19 secara RT-PCR (Real Time-Polymerase Chain Reaction). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari tim manajemen lab COVID-19 dan

berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 27, 30 dan 31 Agustus 2021. Narasumber dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) serta Sri Harjati, SKM dan Nisrina Nur Fitriyani, S.Tr.Kes dari Puskesmas Kecamatan Cipayung.

9. Sosialisasi Pengelolaan Data dan Informasi Yang Optimal dan Fitur Penandaan SIPT V3

BBPOM di Jakarta terus berupaya beradaptasi dengan teknologi



informasi terkini dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal untuk seluruh pegawai dan Sosialisasi Fitur Penandaan SIPT Versi 3 pada tanggal 17 September 2021 melalui

ruang pertemuan virtual. Narasumber dihadirkan dari Pusat Data dan Informasi Badan POM.

10. Balai Besar POM di Jakarta Sita Ratusan Obat Injeksi Vitamin C Tanpa Ijin Edar



Pada tanggal 22 September 2021, penyidik BBPOM di Jakarta menyita barang bukti obat TIE sebanyak 40 item atau 951 dus, dengan nilai keekonomian ratusan juta rupiah. Selain itu penyidik juga menyita obat

TIE yang sudah dikemas dan siap kirim. Obat tanpa izin edar / TIE dijual melalui beberapa situs e-commerce, diantaranya adalah obat jenis injeksi vitamin C untuk imunitas pencegahan Covid-19 dan berbagai jenis obat injeksi dengan indikasi kecantikan (skin booster).

11. Agen Perubahan BBPOM di Jakarta, Strive For The Best



BBPOM di Jakarta mendapat kesempatan untuk berkompetisi Agen Perubahan Terbaik Badan POM pada Selasa, 21 September 2021. Tim Dewan Juri Internal adalah

Sekretaris Utama dan Inspektur Utama Badan POM. Dewan juri eksternal terdiri dari Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA dari Kementerian PanRB, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA dari Lembaga Administrasi Negara dan Nugroho Ananto dari Sinergi Consulting.

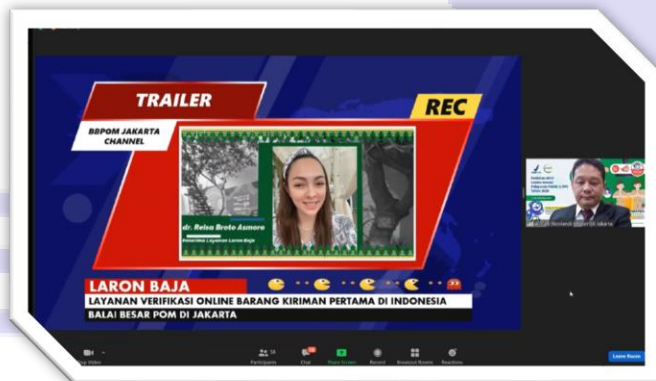
12. Pemetaan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM di Jakarta



Rangkaian kegiatan pemetaan kompetensi dilaksanakan pada 20 dan 29 September 2021 untuk 22 PFM BBPOM di Jakarta. Asesor kegiatan adalah tim dari Pusat Pengembangan SDM POM yang menganalisa kesesuaian

kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

13. Inovasi Laron Baja Siap Melindungi Masyarakat Dari Obat dan Makanan Ilegal



BBPOM di Jakarta mendapat apresiasi sebagai salah satu finalis yang dinyatakan masuk dalam tahap penilaian akhir pada Lomba Inovasi Pelayanan Publik

Tahun 2020 dengan mengusung Inovasi Lartas Online BBPOM di Jakarta yang selanjutnya disebut Laron Baja. Penilaian dilaksanakan melalui pertemuan virtual pada tanggal 7-8 Oktober 2021.

14. Focus Group Discussion (FGD) Bagi Pedagang Besar



Farmasi Bahan Baku Obat (PBF BBO)

Focus Group Discussion (FGD) bagi Pedagang Besar Farmasi Bahan Baku Obat (PBF BBO) dilaksanakan pada 7

Oktober 2021 secara daring. Jumlah peserta yang hadir 101 (seratus satu) peserta yaitu pimpinan dan Apoteker penanggungjawab PBF Bahan Baku Obat di Jakarta, perwakilan GP Farmasi serta inspektur CDOB Balai Besar POM di Jakarta.

15. Penghargaan Raksa Nugraha Sebagai Bentuk Komitmen Perlindungan

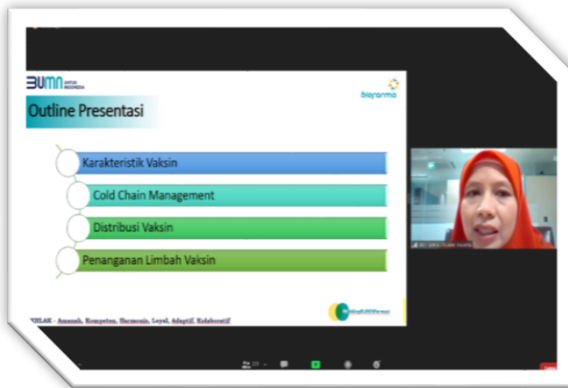


Konsumen

Kepuasan dan perlindungan hak pelanggan menjadi fokus penting pelayanan BBPOM di Jakarta beragar tercipta WBBM. Balai

Besar POM di Jakarta berhasil memperoleh Raksa Nugraha Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dalam kategori Gold.

16. Pengawasan dan Monitoring Distribusi Vaksin Covid19



Pengawasan distribusi vaksin harus dilakukan dengan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karenanya BBPOM di Jakarta melaksanakan Bimbingan Teknis

Pengelolaan Vaksin untuk petugas pada Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada 22 Januari 2021. Selain itu, dilaksanakan pula monitoring kinerja pengawasan distribusi vaksin oleh Ombudsman perwakilan Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2021.



17. Kerling Jakarta untuk Layanan Publik yang Prima



Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) sebagai inovasi mendekatkan layanan sertifikasi dan informasi obat dan makanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kegiatan ini bersifat "mobile" dengan menggunakan mobil keliling dan membuka layanan pada lokasi yang strategis Beberapa lokasi Kerling

Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) sebagai inovasi mendekatkan layanan sertifikasi dan informasi obat dan makanan

Jakarta pada tahun 2021 adalah Kantor Walikota pada 5 (lima) Kota Administratif serta Mal Cilandak Town Square.

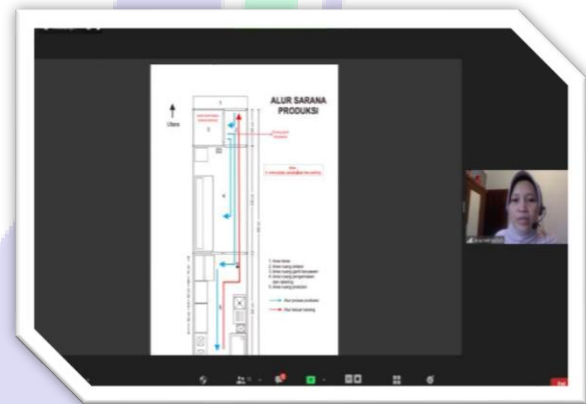
18. **Desk CAPA dalam rangka Pemeriksaan Sarana Balai dan Desk Denah Bangunan untuk UMKM**



Balai Besar POM di Jakarta selama tahun 2021 secara konsisten membuka layanan *desk* untuk percepatan perbaikan CAPA untuk sarana produksi dan

distribusi.

Selain itu dilaksanakan pula desk denah untuk pelaku UMKM sebagai bentuk fasilitasi izin edar. Kegiatan dilaksanakan secara daring maupun luring.



19. **Jaminan Keamanan Pangan Menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022**

Pengawasan pangan pada hari natal dan tahun baru

dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta ada 2-31 Desember 2021. Selain pengawasan pada jalur distribusi berupa toko retail, dilakukan pula pengawasan di gudang *market places*.

20. Monitoring dan Evaluasi Fasilitator UMKM Pangan 2021



Di penghujung tahun 2021, setelah rangkaian kegiatan fasilitasi UMKM Pangan selesai direalisasikan, Balai Besar POM di Jakarta melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap para fasilitator UMKM Pangan tahun 2021.

21. Sinergisme BBPOM di Jakarta dan Lintas Sektor Dalam Perkuatan Pengawasan Obat dan Makanan

Semakin tingginya tantangan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta, membutuhkan sinergi dengan lintas sektor



terkait melalui Bimbingan Teknis bagi Petugas / Pengawas guna menyiapkan strategi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta pada tanggal 6 Desember 2021. Bimtek dihadiri peserta dari Balai

Besar POM di Jakarta, Dinas / Suku Dinas Kesehatan, Dinas / Suku Dinas PPKUKM di 6 (enam) wilayah, dan Dinas KPKP dengan narasumber dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik, dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
<i>Highlight</i> Kinerja Balai Besar POM di Jakarta	vi
Daftar Isi	xxvii
Daftar Tabel.....	xxviii
Daftar Gambar	xxxii
Daftar Lampiran.....	xxxv
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3. Struktur Organisasi.....	6
1.4. Isu Strategis	6
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	26
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021	45
2.3. Perjanjian Kinerja.....	47
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	50
2.5. Metode Pengukuran.....	55
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	57
3.2. Realisasi Anggaran	319
3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan	323

Bab IV Penutup	
4.1. Kesimpulan	333
4.2. Saran	334



BADAN POM



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Beban Kerja Balai Besar POM di Jakarta.....	11
Tabel 2. Hasil analisis lingkungan strategis Balai Besar POM di Jakarta baik eksternal maupun internal.....	21
Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024.....	29
Tabel 4. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	45
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	48
Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	51
Tabel 7. Kriteria pencapaian kinerja.....	55
Tabel 8. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021.....	57
Tabel 9. Hasil Pencapaian indikator kinerja.....	59
Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021.....	65
Tabel 13. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021.....	90
Tabel 14. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021.....	96
Tabel 23. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2021.....	181
Tabel 24. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	193
Tabel 26. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021.....	212
Tabel 27. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	224
Tabel 28. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021.....	235
Tabel 29. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021.....	241
Tabel 30. Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021.....	249
Tabel 31. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2021.....	259

Tabel 33. Kategori Penilaian SAKIP.....	271
Tabel 34. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021..	282
Tabel 35. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2021.....	289
Tabel 36. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2021.....	294
Tabel 37. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021.....	301
Tabel 38. komponen nilai EKA BBPOM di Jakarta Tahun 2021.....	310
Tabel 39. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021.	314
Tabel 40. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV tahun 2020.....	320
Tabel 41. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2020.....	324
Tabel 42. Efisiensi kegiatan per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta.....	328



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Beban Kerja Balai Besar POM di Jakarta.....	11
Tabel 2. Hasil analisis lingkungan strategis Balai Besar POM di Jakarta baik eksternal maupun internal.....	21
Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024.....	29
Tabel 4. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	45
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	48
Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	51
Tabel 7. Kriteria pencapaian kinerja.....	55
Tabel 8. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021.....	57
Tabel 9. Hasil Pencapaian indikator kinerja.....	59
Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021.....	65
Tabel 13. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021.....	90
Tabel 14. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021.....	96
Tabel 23. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2021.....	181
Tabel 24. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	193
Tabel 26. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021.....	212
Tabel 27. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	224
Tabel 28. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021.....	235
Tabel 29. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021.....	241
Tabel 30. Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021.....	249
Tabel 31. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2021.....	259

Tabel 33. Kategori Penilaian SAKIP.....	271
Tabel 34. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021..	282
Tabel 35. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2021.....	289
Tabel 36. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2021.....	294
Tabel 37. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021.....	301
Tabel 38. komponen nilai EKA BBPOM di Jakarta Tahun 2021.....	310
Tabel 39. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021.	314
Tabel 40. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV tahun 2020.....	320
Tabel 41. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2020.....	324
Tabel 42. Efisiensi kegiatan per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta.....	328



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

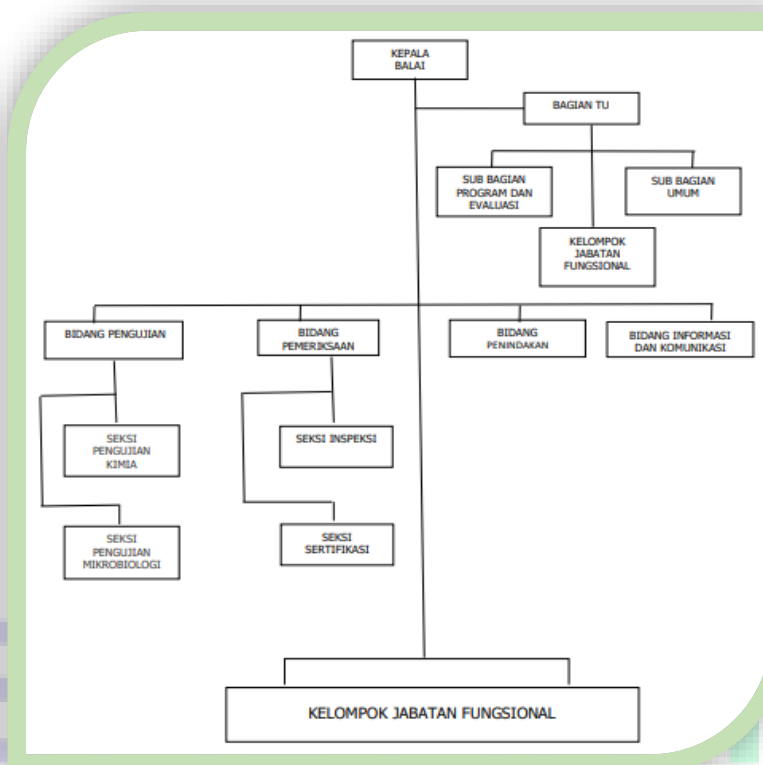
1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan

kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Perubahan organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan



Pengawas Obat dan Makanan mencakup penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka reformasi birokrasi dengan mengalihkan jabatan administratif menjadi jabatan fungsional

sebagaimana terlampir

pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta (semula) mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Gambar 2.
Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta (menjadi mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan gambar 1 dan 2 tersebut, nampak bahwa perubahan yang signifikan adalah penghapusan jabatan struktural Eselon 3 (Kepala Bidang) dan Eselon 4 (Kepala Seksi) dalam rangka memangkas birokrasi sehingga diharapkan kinerja SDM akan lebih efisien dan efektif.

Tugas

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

a. **Kelompok Substansi Pengujian** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di kelompok substansi pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Pengujian terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia;
2. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

- b. **Kelompok Substansi Pemeriksaan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di subkelompok substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di Substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Substansi Pemeriksaan terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Inspeksi;
2. Subkelompok Substansi Sertifikasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

- c. **Substansi Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. **Substansi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan

pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. **Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
5. Pelaksanan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi;
2. Subkelompok Substansi Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. *Subkelompok Substansi Umum* mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.4. Isu Strategis

- 1.4.1. Kontaminasi paracetamol di Teluk Jakarta
- 1.4.2. Beredarnya pangan olahan UMKM yg blm mendapat izin edar
- 1.4.3. Meningkatnya peredaran pangan olahan berupa frozen food pada masa pandemi
- 1.4.4. Pengawasan distribusi vaksin sesuai standar suhu penyimpanan produk
- 1.4.5. Pendistribusian obat terapi Covid19 yg tidak sesuai ketentuan

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

a. Lingkungan Internal

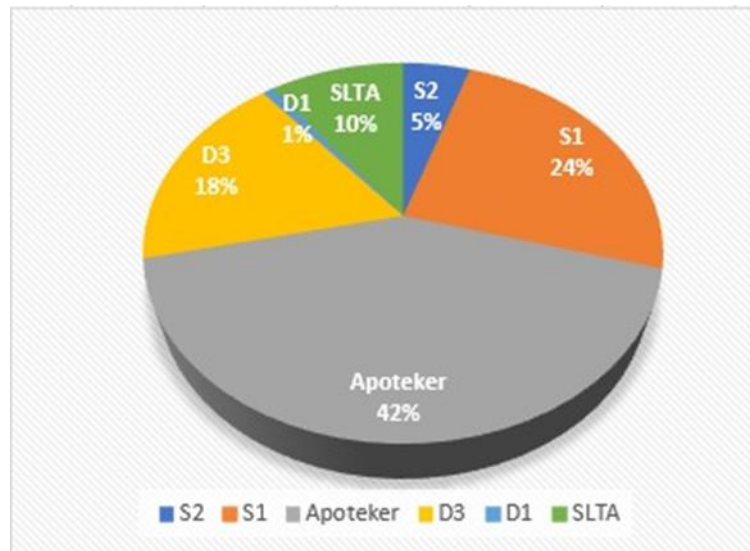
1. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024, berdasarkan analisis beban kerja per Desember 2019, Balai Besar POM di Jakarta membutuhkan pegawai sebanyak 151 orang. Perhitungan analisis beban kerja dilakukan kembali pada November 2020 sesuai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan POM dan kondisi pandemic Covid19 sehingga didapatkan hasil *review* Analisis Beban Kerja sebagai berikut:

	Pemeriksaan	Penindakan	Informasi dan Komunikasi	Pengujian	Tata Usaha	Jumlah
Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2021)	37	23	9	68	41	178
Jumlah pegawai saat ini	25	14	11	46	23	119
Kekurangan SDM	12	9	(-2)	22	18	59

Tabel 1. Analisis Beban Kerja Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan table di atas, disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta membutuhkan pegawai sebanyak 178 orang sedangkan pegawai yang ada saat ini adalah 119 orang, sehingga masih dibutuhkan pegawai sejumlah 59 orang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang optimal di wilayah kerja BBPOM di Jakarta. Profil pegawai Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 100 orang perempuan (84,03%) dan 19 orang laki-laki (15,97%). Profil pegawai Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 4. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2021

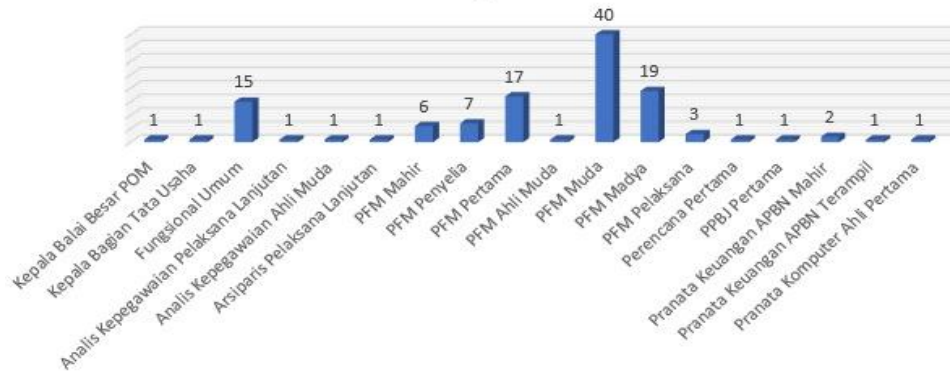
Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Jakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 31 Oktober 2021 adalah 119 orang yang terdiri dari 100 orang perempuan dan 19 orang laki-laki (dengan proporsi 84,03% perempuan dan 15,97% laki-laki). Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta tersebut belum sepenuhnya memadai sesuai kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta secara optimal. Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Balai Besar POM di Jakarta berlatar belakang pendidikan profesi apoteker dan S1,

namun masih terdapat pegawai dengan Pendidikan non sarjana sebanyak 29%. Hal ini merupakan tantangan Balai Besar POM di Jakarta untuk dapat meningkatkan kompetensi pegawai tersebut ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi mengingat Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan organisasi yang *scientific based* yang seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2 dengan proporsi yang lebih banyak dari saat ini untuk memperkuat pengawasan dengan kondisi lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Profil pegawai BBPOM di Jakarta berdasarkan jabatan, terbagi menjadi beberapa jabatan fungsional seperti tercantum dalam Gambar 3. Masih terdapat 15 pegawai dengan jabatan Fungsional Umum yang perlu ditingkatkan kompetensinya baik melalui peningkatan Pendidikan formal maupun kompetensi teknis dan manajerial sosial kultural sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional.

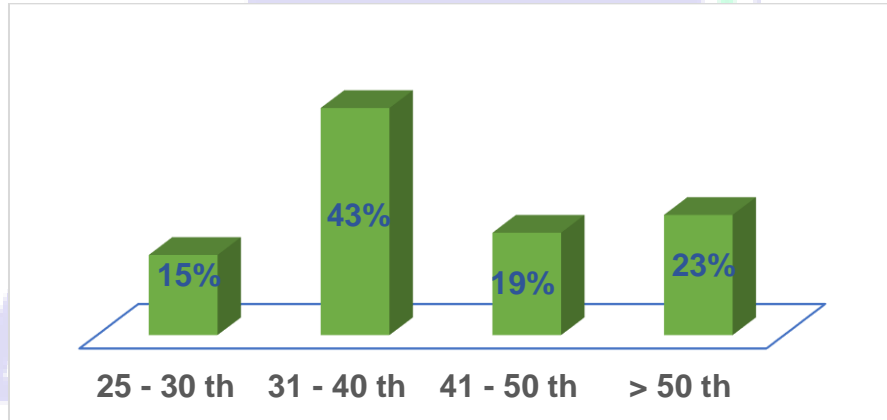
BADAN POM

Profil Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional



Gambar 5.1 Profil Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

Profil Pegawai Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 5.2 Profil Usia Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

Berdasarkan Gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa rentang usia pegawai Balai Besar POM di Jakarta terbanyak adalah antara 31 sampai dengan 40 tahun yaitu 43%. Usia di atas 41 tahun sebanyak 42%. Berdasarkan variasi rentang usia pegawai tersebut merupakan tantangan bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mengurangi gap yang muncul dari perbedaan usia tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta.

Kantor Balai Besar POM di No. hanya memiliki 1 (satu) bangunan gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m² dan luas bangunan 2.404,00 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

2. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

- ✓ Laboratorium Keliling telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017
- ✓ Tim Agen Perubahan Terbaik Tahun 2021
- ✓ Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori Pelayanan Prima Tahun 2021
- ✓ Ranking 2 Lomba Inovasi Pelayanan Publik Badan POM Tahun 2021 dengan Inovasi Laron Baja
- ✓ Peraih Indonesia Consumer Protection Award (Raksa Nugraha) Tahun 2021 dengan kategori Gold

3. Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Jakarta bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432747/ sebesar Rp 41.686.698.000,- (Empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 11.25 juta jiwa.

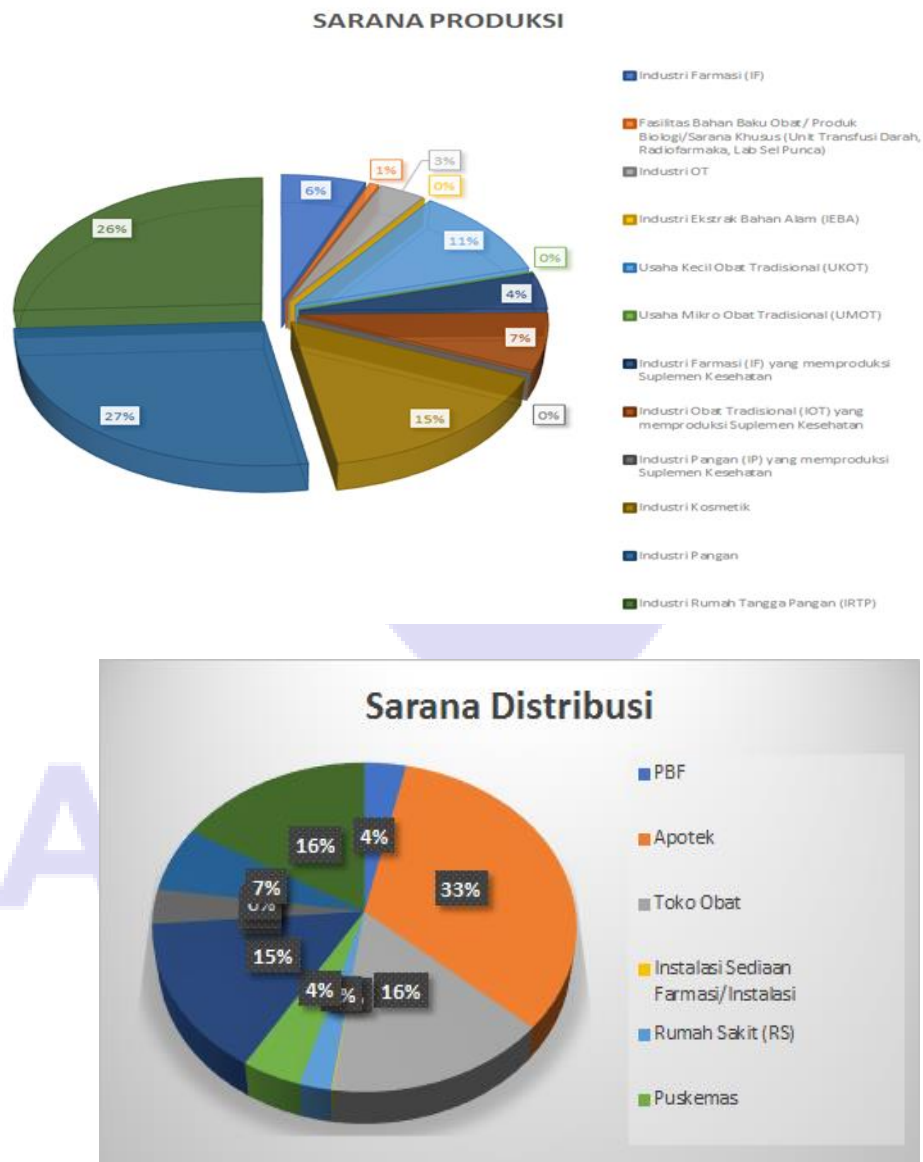


Gambar 6. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana pada

Gambar 7 di bawah ini.



Gambar. 7. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut :

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan- Program Agen Perubahan dalam internalisasi Reformasi Birokrasi- Inovasi internal dan eksternal yang mendukung pencapaian kinerja yang efektif dan efisien- Pelayanan Publik yang Prima dengan diraihnya predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori	<ul style="list-style-type: none">- Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis- ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi manajerial sosial kultural- Luasan Gedung tidak memenuhi standar- Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum- Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Kesehatan- Adanya aturan pengawasan

pelayanan Prima dan apresiasi Indonesia Consumer Protection Award Tahun 2021 dengan kategori Gold

- Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup *premarket* dan *postmarket*
- Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas
- Pemanfaatan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan
- *Mobile lab*
- Mobil Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling
- Fasilitas laboratorium yang memadai
- Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media *online*, cetak dan media sosial
- Kolaborasi pelatihan antar lintas sektor terkait
- Layanan prima sertifikasi dan registrasi produk
- Kerjasama dengan aparat

obat dan makanan yang tidak sejalan antar Kementerian Lembaga terkait

- Fasilitasi UMKM yang masih parsial antar lintas sektor terkait di Provinsi DKI Jakarta

- penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum,
- Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai
- *Networking* yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah
- Laboratorium telah terakreditasi ISO 17025 : 2017
- Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015
- Inovasi Layanan Publik yang terintegrasi dengan system unit Pusat



- PELUANG**
- Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan
 - Kesadaran masyarakat

- TANTANGAN**
- Percepatan Perizinan menyebabkan kemudahan di awal bagi pelaku usaha sehingga pemenuhan standar belum optimal yang



terhadap kesehatan semakin meningkat

- Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat
- Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan
- Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi
- Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami peningkatan
- Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia
- Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan secara *online*
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan
- Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah

menyebabkan tantangan pengawasan semakin besar

- Perkembangan *e-commerce* ke depan cukup besar yang menyebabkan semakin maraknya penjualan obat dan makanan *online*
- Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan
- Masih banyaknya jumlah dan modus pelanggaran di bidang obat dan makanan
- Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera
- Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah
- Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat dan makanan
- Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi obat dan makanan
- Meningkatnya penyebaran informasi *hoax* terkait obat dan makanan
- Adanya program Nasional

Provinsi - Perkembangan iklan obat dan makanan yang begitu cepat dan kompetitif	(JKN dan SKN) - Implementasi program fortifikasi pangan - Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi yang diimplementasikan
--	---

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang merupakan isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

1. Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah / PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Jakarta melakukan *sampling* produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online* berdasarkan analisis risiko. Hal ini

merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Jakarta meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, dilakukan pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan *sampling* dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Keamanan dan mutu vaksin selama dalam pendistribusian dan penyimpanan

Pandemi covid 19 masih terjadi. Salah satu usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan menggalakan program vaksinasi. Vaksinasi dikelola oleh pemerintah. Dimulai dari pemberian ijin berupa EUA, pengadaan, pendistribusian kepada Instalasi Farmasi Propinsi sampai kepada sentra vaksin. Sebagai lembaga pengawas yang menerbitkan ijin EUA dan menjamin mutu dan keamanan vaksin selama jalur distribusi Badan POM harus memperkuat pengawasannya. Kerawanan dan permasalahan yang ada adalah bagaimana sarana distribusi dan sarana pelayanan mampu menjaga mutu dan keamanan vaksin selama pendistribusian dan penyimpanan serta saat

vaksinansi. Penjagaan suhu optimum vaksin menjadi faktor penting. Beberapa sarana distribusi Instalasi Farmasi propinsi maupun kabupaten kota belum melakukan validasi pengiriman untuk memastikan suhu optimum pengiriman vaksin dapat dikawal. Selain itu bagaimana sarana pelayanan mampu mem[ertahankan penyimpanan vaksin sesuai suhu yang dipersyaratkan. Faktor kritisnya bagaimana sarana pelayanan mengantisipasi listrik mati, pencatatan suhu secara berkala serta faktor pendukung lain.

5. Hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui HaloBPOM, media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, *Car Free Day*, *talkshow*, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM *Mobile*, dan penyebaran informasi melalui *website* BPOM.

6. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta

sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi untuk mempertahankan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

7. Implementasi Undang Undang Cipta Kerja Dalam Mempermudah Perizinan

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat Balai Besar POM di Jakarta harus menyesuaikan semua perubahan sistem pengawasan premarket. Sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, perijinan benar-benar berdasarkan resiko produk. Jika dahulu untuk perijinan obat dan makanan semuanya ada pemeriksaan sarana di awal sebelum mendapatkan ijin edar. Tetapi saat ini tidak semua harus dilakukan Audit di awal. Untuk produk pangan yang resiko rendah, menengah rendah hanya pemenuhan komitmen, resiko menengah tinggi hanya pemenuhan estándar sedangkan untuk produk pangan resiko tinggi dilaksanakan Audit menyeluruh. Untuk komoditi obat dikategorikan resiko tinggi, sedangkan komoditi Kosmetika dan Obat Tradisional serta resiko menengah tinggi yang perlu audit sebelum mendapatkan ijin edar. Kemudahan juga terjadi pada registrasi produk. Permasalahan yang timbul adalah dengan dipermudahnya perijinan di awal membuat beberapa hal yang tadinya harus dipenuhi pelaku usaha sebelum ijin didapat, saat ini bisa setelah ijin diperoleh. Sehingga menjadi tantangan besar dalam pengawasan post market karena harus melihat

pemenuhan cara produksi dan cara distribusi yang baik setelah produk beredar.

8. Perkuatan Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga dengan pemberdayaan tenaga pembina pada lintas sector terkait dengan optimalisasi pemenuhan tool pengawasan PIRT

Implementasi UUCK dan kemudahan perijinan membuat semakin mudah untuk mendapatkan nomor PIRT. Untuk itu Suku Dinas Kesehatan 6 wilayah harus diperkuat untuk pembinaan dengan optimalisasi pemenuhan tool pengawasan dan beberapa kegiatan pendukung seperti pelatihan petugas

9. Pandemi COVID-19

COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) pada 11 Maret 2020. Kasus pasien COVID-19 di Indonesia meningkat signifikan sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 telah dikeluarkan strategi dan kebijakan oleh pemerintah antara lain pembatasan interaksi dan mewajibkan untuk bekerja dari rumah (*work from home/WFH*). Kondisi ini mempengaruhi semua kegiatan yang merupakan tugas pokok Balai Besar POM di Jakarta. Dari semula semua kegiatan berbasis interaksi langsung menjadi interaksi jarak jauh. Penyelenggaraan layanan dilakukan untuk menjamin keamanan dalam kondisi darurat dan tetap memberikan layanan prima dalam fungsi pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta

10. Fasilitasi UMKM lintas sektor terkait secara parcial

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan sector yang sedang digalakan pemerintah sebagai penopang perekonomian pada masa pandemi ini. Sangat banyak program fasilitasi UMKM yang dibuat oleh masing- masing instansi terkait sesuai tusunya. Hal ini membuat fasilitasi tersebut terjadi secara parcial sehingga beberapa UMKM tidak utuh mendapatkan fasilitasi mulai dari perijinan sarana sampai kepada ijin edar produk. Banyak IUMK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, tetapi hal ini tidak dibarengi dengan perijinan lain yang harus dimiliki oleh pelaku usaha UMKM. Sehingga banyak yang berjualan produk tanpa ijin edar dan hanya baru memiliki ijin usaha

11. Pembentukan Fasilitator Cara produksi Pangan Olahan yang Baik

Keberhasilan UMK untuk mendapatkan perijinan sarana dan ijin edar produk tentunya tidak lepas dari pendampingan yang diberikan. Saat ini di propinsi DKI Jakarta ada tenaga Pendamping Jakpreneur yang diampu oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Untuk membantu penerapan Cara Produksi Pangan OLahan yang Baik harus ada pemberdayaan tenaga pendamping yang ada. Tenaga pendamping ini akan dilatih untuk menjadi fasilitator CPPOB

BADAN POM

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

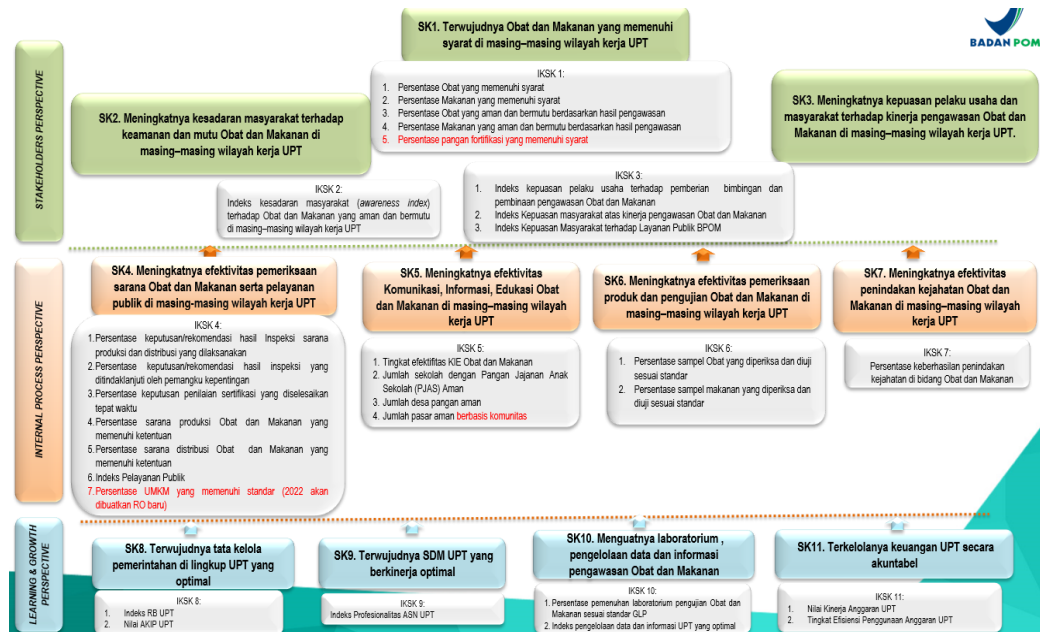
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan

Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat

dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

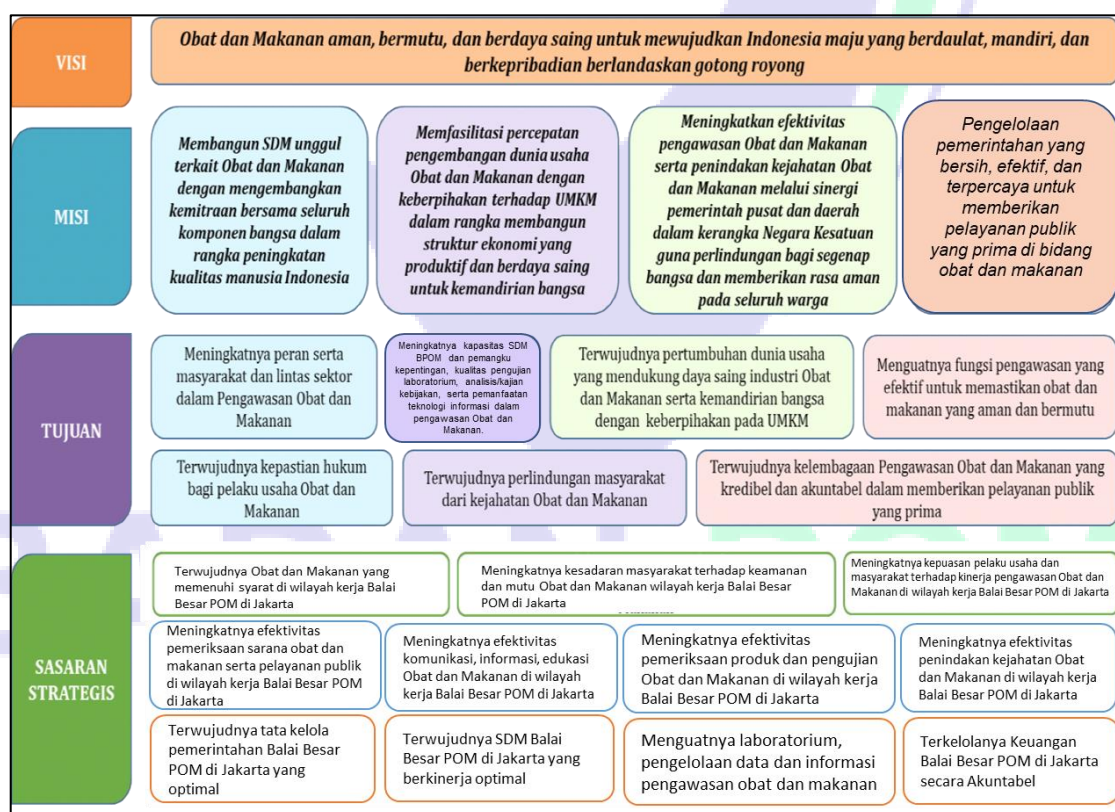
Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
Stakeholder							
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta		Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74.98	76.65	78.33	80.01

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Balai Besar POM di Jakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	93
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,30	4,40	4,51
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79
Internal Process							
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	97.3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
Learning and Growth							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	85.4
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	82
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	92
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar	1,51	2	2,25	2,5	3

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		POM di Jakarta yang optimal					
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	94.9
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	-	-	-

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective):

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Balai Besar POM di Jakarta.

Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang *disampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang

digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 80%**
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 95%**
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 80%**

(4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 81%

(5) Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat ditargetkan sebesar 88%

b. Sasaran Strategis 2: *Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh

industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 85 pada akhir tahun 2021.

c. Sasaran Strategis Ke-3: *Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Jakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi

lain layanan publik Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 86.6 di tahun 2021;**
- (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 74.98 di tahun 2021; dan**
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target sebesar 90 di tahun 2021.**

Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective):

a. Sasaran Strategis 4: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu melindungi masyarakat

dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 89% pada akhir tahun 2021;**
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2021;**
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 85% pada akhir tahun 2021;**
- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60% pada akhir tahun 2021;**
- (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 73% pada akhir tahun 2021; dan**
- (6) Indeks pelayanan publik, dengan target 4,20 pada akhir tahun 2021.**

b. Sasaran Strategis 5: *Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka

meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 93 pada akhir tahun 2021;**
- (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 40 pada akhir tahun 2021;**
- (3) Jumlah desa pangan aman dengan target 14 pada akhir tahun 2021; dan**
- (4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 2 pada akhir tahun 2021**

c. Sasaran Strategis 6: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan meningkatkan efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2021; dan**
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2021.**

d. Sasaran Strategis 7: *Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jakarta melalui penyidikan tindak

pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 54% pada akhir 2021.

Perspektif Pembelajaran (Learning and Growth Perspective):

a. Sasaran Strategis Ke-8: *Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal*

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi

publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM.

Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jakarta untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta. Penataan tata laksana bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

(1) Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 82.4 pada akhir tahun 2021; dan

(2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 79.1 pada akhir tahun 2021.

b. Sasaran Strategis 9: *Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal*

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Balai Besar POM di Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dengan target sebesar 84.25 di tahun 2021.

c. Sasaran Strategis Ke-10: *Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan*

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*.

Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Balai Besar POM di Jakarta telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai.

Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari

sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 77% pada 2021; dan**
- (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal dengan target 2 pada tahun 2021.**

d. **Sasaran Strategis 11: *Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel***

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- (1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target 91.9 sebesar pada tahun 2021; dan**
- (2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target Efisien (95%) pada tahun 2021.**

BADAN POM

2.2. Rencana Kerja Tahunan 2021

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2020.

Tabel 2 Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	80
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	88
2.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	85
3.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.6
		08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74.98
		09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)
		12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73
		15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,20
5.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	16-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		17-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		18-Jumlah desa pangan aman	14
		19-Jumlah pasar aman berbasis komunitas	2
6.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	20-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		21-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	22-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54
8.	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	23-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82.4
		24-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	79.1
9.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	25-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84.25
10.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	26-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)
	informasi pengawasan obat dan makanan	27-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2
11.	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	28-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	91.9
		29-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 41.686.698.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat 02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat 03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	80 95 80 81 88
13.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	85
14.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.6 74.98 90
15.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89 75

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)
		12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73
		15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,20
16.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	16-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		17-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		18-Jumlah desa pangan aman	14
		19-Jumlah pasar aman berbasis komunitas	2
17.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	20-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		21-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
18.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	22-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54
19.	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	23-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82.4
		24-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	79.1
20.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	25-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84.25
21.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	26-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)
	informasi pengawasan obat dan makanan	27-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2
22.	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	28-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	91.9
		29-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja tiwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.



BADAN POM



Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,5%	86,5%	86,5%	80%	309.593.550
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	95%	162.471.050
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5%	86,5%	86,5%	80%	309.593.550
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,5%	78,5%	78,5%	81%	162.471.050
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat				88	17.276.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				88	156.071.850

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				86.6	56.977.100
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				74.98	156.071.850
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				90	1.111.991.500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	89%	142.442.750
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,2%	60,2%	60,2%	75%	142.442.750
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	120.083.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%	48%	48%	60%	39.864.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57%	57%	73%	188.044.400
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				4,2	160.801.300
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99	90,99	90,99	93	1.624.100.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	15% (progress)	40% (progress)	60% (progress)	40	354.018.000
		Jumlah desa pangan aman	15% (progress)	40% (progress)	60% (progress)	14	783.316.000
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	15% (progress)	40% (progress)	60% (progress)	2	100.431.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	100%	265.365.900

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	100%	146.664.900
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	20%	30%	54	1.042.636.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta				82.4	352.105.500
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta				79.1	430.407.500
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta				84.25	24.425.665.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>				77	7.827.731.500

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	2	2	2	315.548.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	14	37	56	91.9	352.105.500
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	430.407.500

BADAN POM

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria pencapaian kinerja

Kriteria	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	

Sangat Kurang	< 50%	
---------------	-------	--

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BADAN POM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perhitungan/ pengukuran kinerja perlu dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021
- b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan 3 tahun sebelumnya dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024
- c. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	95.60	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	102.49	Baik
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	101.59	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	108.94	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100.22	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	93.64	Baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	108.54	Baik
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	100.41	Baik
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	100.53	Baik
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	112.29	Sangat Baik
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	99.42 Efisien	Baik

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:



Tabel 7. Hasil Pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Volume			KRITERIA
			Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian	
a	b	c	d	e	$f=(K6/D6*100)$	g
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80%	74,88%	93,60	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95%	94,73%	99,72	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%	59,74%	74,68	Cukup
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81%	94,93%	117,20	Sangat Baik
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	88%	81,67%	92,81	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85	87,12	102,49	Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,6	86,7	100,12	Baik

BADAN POM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Volume			KRITERIA
			Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian	
	Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,98	73,8	98,43	Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	90	95,61	106,23	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	92,19%	103,58	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75%	78,02%	104,03	Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	97,23%	114,39	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	69,02%	115,03	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73%	79,21%	108,51	Baik
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	4,2	4,54	108,10	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93,83	100,89	Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Volume			KRITERIA
			Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian	
	di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100	Baik
		Jumlah desa pangan aman	14	14	100	Baik
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	90,85%	90,85	Baik
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	96,42%	96,42	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54%	58,61%	108,54	Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82,4	82,29	99,87	Baik
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	79,1	79,85	100,95	Baik
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,25	84,7	100,53	Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Volume			KRITERIA
			Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian	
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>	77	80,5	104,55	Baik
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	2,475	123,75	Tidak Dapat Disimpulkan
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	91.9	86	93.61	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	95% Efisien	100% Efisien	105.26	Baik

*) Dihitung terhadap target sesuai target APBN-P

BADAN POM

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, terdapat 24 (dua puluh empat) indikator mencapai target dengan kriteria “**baik**”, 1 (satu) indikator mencapai target dengan kategori “**cukup**”, 1 (satu) indikator mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**” target dengan 3 (tiga) indikator mencapai kategori “**sangat baik**”.

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak

produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, *banner* dan poster di tempat-tempat strategis dan informasi di media sosial serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80	74.88	93,60	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap obat yang disampling secara acak. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat disampling sesuai dengan pedoman sampling tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)

- (1) Produk kadaluarsa
- (2) Produk rusak
- (3) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- (4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

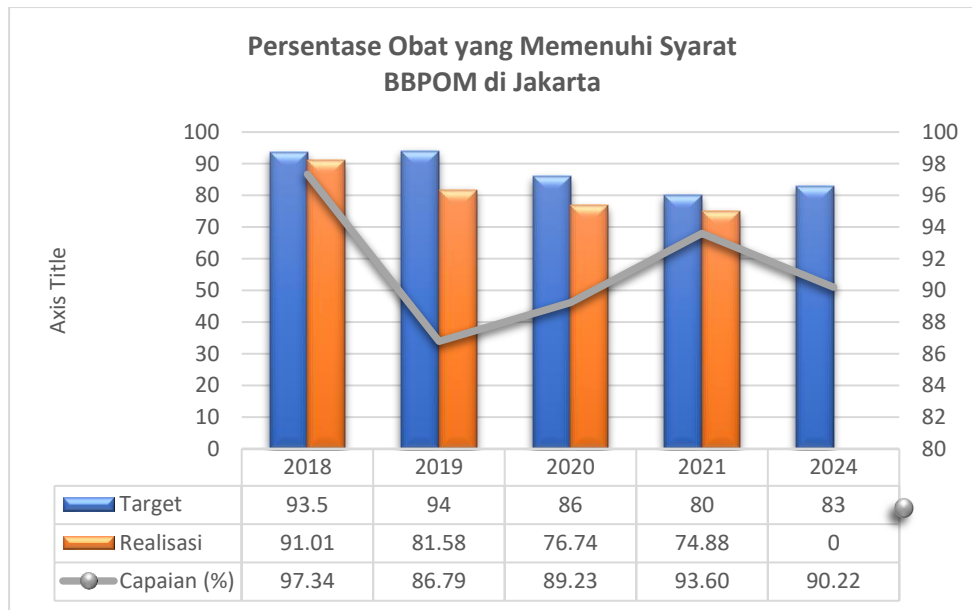
- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk kriteria 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2021 adalah **93.60%** dengan kriteria “**Baik**”.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2018-2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024*

Terdapat perubahan definisi operasional untuk Indikator Kinerja Utama “persentase obat yang memenuhi syarat” mulai tahun 2018 sampai 2021. Tahun 2020 menjadi baseline, sehingga yang bisa dibandingkan adalah tahun 2020 dan tahun 2021. Capaian pada tahun 2020 sebesar 89,23% (cukup), sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 93,60% (baik), dengan peningkatan sebesar 4,37%.

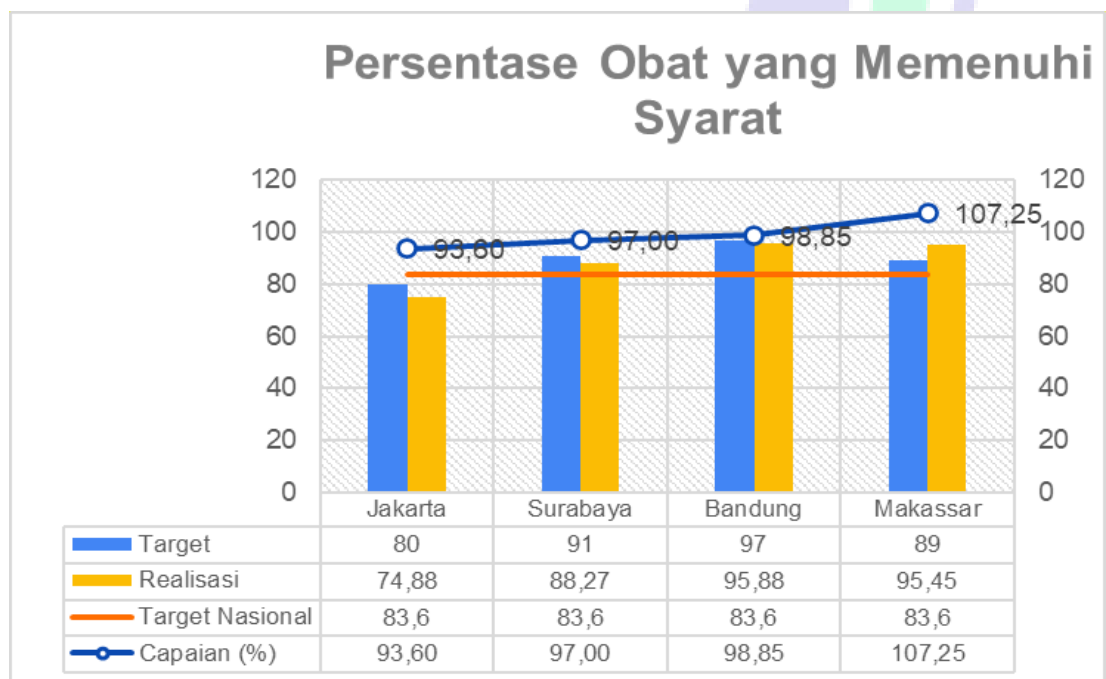


Gambar 3. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2018 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra RPJMN tahun 2024, kontribusi capaian pada tahun 2021 ini adalah sebesar 90,22%. Untuk tahun 2021 mulai awal tahun target ditetapkan 86,5%, namun pada bulan November 2021 terdapat reviu terhadap rencana strategis Balai Besar POM di Jakarta, dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.12.21.13478 target mengalami penurunan menjadi 80%. Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan triwulan berjalan yang menunjukkan bahwa kondisi riil persentase obat yang memenuhi syarat di DKI Jakarta masih rendah. Dengan penurunan target tersebut diperoleh realisasi obat yang memenuhi syarat sebesar 74,88% sehingga capaiannya sebesar 93,60% dari target.

Tahun 2021 Balai Besar POM di Jakarta telah mencapai 93,60 % dari target yang telah ditetapkan, sehingga kami optimis dapat mencapai target untuk tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 8. Perbandingan realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2021 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui target nasional sebesar 83,60%. Untuk tahun 2021, yang paling tinggi realisasinya adalah Balai Besar POM di Bandung yaitu 95,88%, disusul Balai Besar POM di

Makassar 95,45% kemudian Balai Besar POM di Surabaya 88,27% dan terakhir Balai Besar POM di Jakarta 74,88%. Perbedaan target masing-masing Balai mempengaruhi capaian kerja. Semua Balai Besar POM memiliki capaian kerja dengan kriteria “Baik”

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan / penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya. Banyaknya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan menyumbang porsi terbesar persentase produk obat yang tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif. Selain kosmetik, banyak juga ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sedangkan untuk komoditi lain relative lebih baik. Juga masih ditemukan adanya produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat pengujian, walaupun jumlahnya tidak banyak. Bahkan ada produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan sekaligus tidak memenuhi syarat pengujian. Banyaknya temuan tersebut di atas menyebabkan rendahnya realisasi persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah provinsi DKI Jakarta. Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat meningkatkan

realisasi persentase obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- Intervensi pengawasan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi / kosmetik / obat tradisional untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP / *Good Manufacturing Practice*), sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar baik
- Secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi. Selain pengawasan, juga pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan, terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional dan kosmetik. Hal ini telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan secara rutin
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS di luar DKI Jakarta diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan

pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat (termasuk obat tradisional dan kosmetik) kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman dan berkualitas.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta sebagai upaya meningkatkan capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam butir d di atas merupakan kegiatan yang paling cukup efektif untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, namun masih perlu ditingkatkan intensifikasinya dan diperluas cakupannya.

Peningkatan kompetensi personil juga merupakan factor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Harus dapat dipastikan bahwa personil telah melakukan evaluasi penandaan secara tepat dan melakukan pengujian secara valid (akurat), sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya hasil pengujian yang salah (misalnya seharusnya memenuhi syarat tapi disimpulkan tidak memenuhi syarat karena pengujian kurang valid) dan hasil evaluasi penandaan yang kurang tepat (seharusnya memenuhi ketentuan namun disimpulkan

tidak memenuhi ketentuan). Kondisi alat laboratorium juga dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian. Laboratorium telah harus memastikan bahwa alat laboratorium yang digunakan sudah terkalibrasi / terverifikasi dan layak pakai sehingga memberikan hasil pengujian yang valid.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)*

Balai Besar POM di Jakarta telah secara konsisten menerapkan ISO 17025:2017 dan ISO 9001: 2015 sehingga dipastikan pengawasan Obat dan Makanan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Namun mengingat penyebab utama rendahnya capaian persentase obat yang memenuhi syarat adalah banyaknya produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, maka upaya perbaikan yang paling penting untuk dilakukan adalah melakukan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha (terutama yang bergerak di bidang kosmetik dan obat tradisional) untuk selalu memenuhi ketentuan penandaan, antara lain meningkatkan frekuensi diadakannya bimbingan teknis terkait penandaan dan memperluas akses informasi tentang ketentuan penandaan kepada pelaku usaha.

g. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut

adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2021 :

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,00%	74,88%	93,60%	309.593.550	306.909.050	99,13%	94,00%	-0,06%	75%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar -0.06 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “**tidak efisien**”, karena capaian output lebih kecil dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	95	94,73	99,72	Baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap makanan yang disampling secara acak. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan

disampling sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Sampling tahun berjalan.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- (2) Produk kadaluarsa
- (3) Produk rusak
- (4) Tidak memenuhi ketentuan label
- (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk kriteria 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir. Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

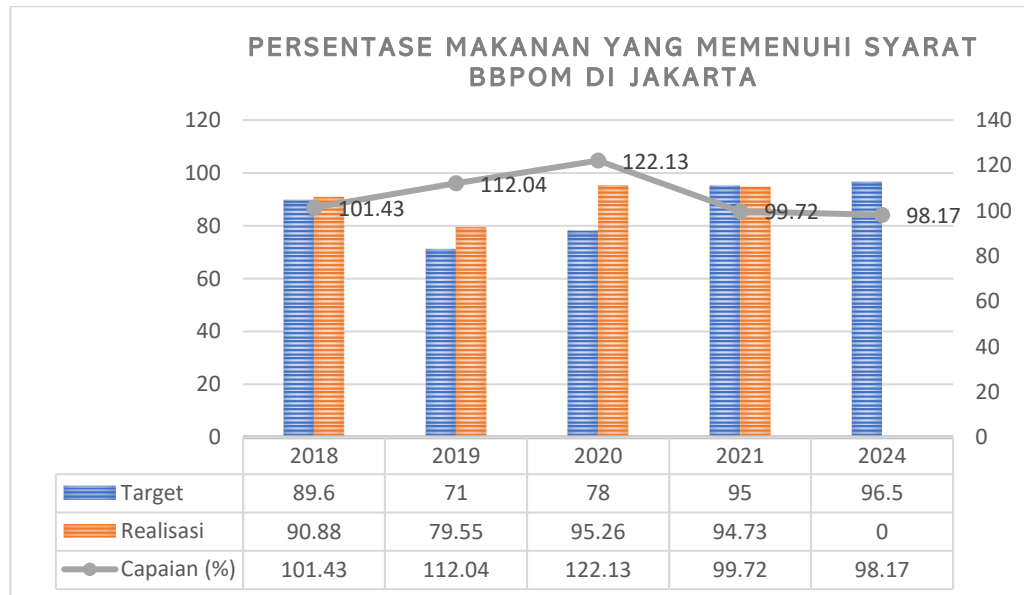
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 **hampir mencapai target** yang ditetapkan yaitu 99,72 % dengan kriteria **“baik”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2018-2021 dan target akhi periode renstra RPJMN 2020-2024

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2020. Meskipun capaian menurun namun kesimpulan dari hasil kinerja tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan grafik di atas, capaian persentase makanan yang memenuhi syarat mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat namun pada tahun 2020 capaian persentase makanan yang memenuhi syarat memberikan hasil kinerja dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Pada tahun 2018 sebenarnya

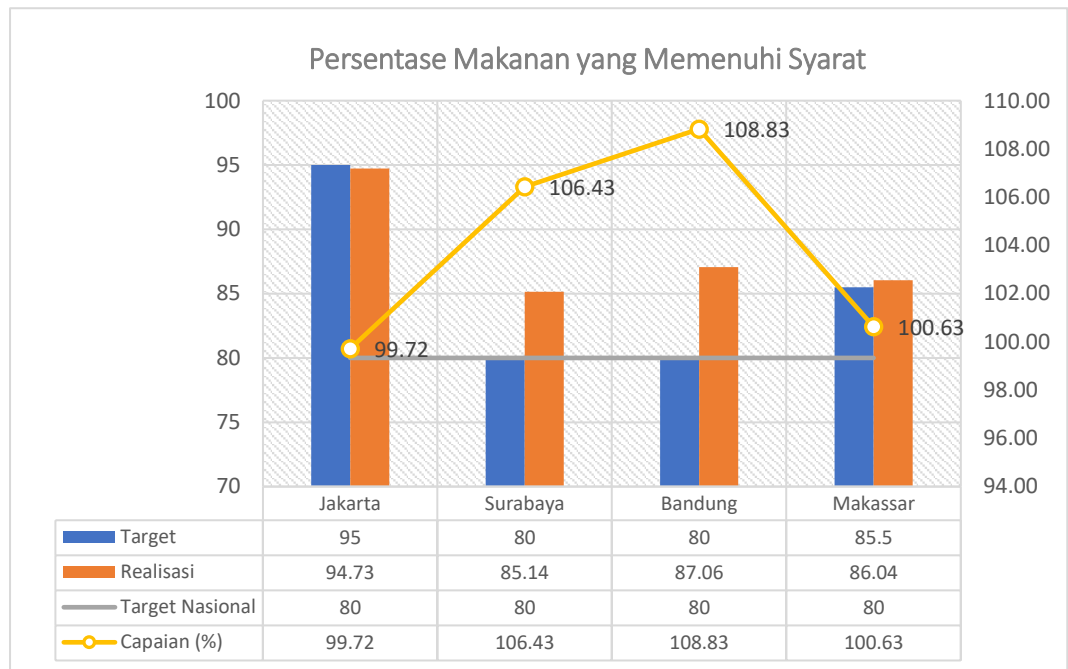
capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sudah memperoleh kriteria baik, namun penurunan target Balai di dua tahun berikutnya meningkatkan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat dan menyebabkan kriteria kinerja menjadi tidak dapat disimpulkan.



Gambar 4. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2018 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Perubahan target Balai di triwulan IV tahun 2021 menyebabkan menurunnya capaian persentase makanan di tahun 2021. Namun perubahan target ini diusulkan berdasarkan realisasi capaian tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa makanan yang beredar di propinsi DKI Jakarta memang sebagian besar telah memenuhi syarat. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di tahun 2021 sudah mendekati target di tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan gambar di atas diketahui target nasional sebesar 80%. Tahun 2021 ini, Balai Besar POM di Jakarta mencapai realisasi tertinggi 94,73%, disusul Balai Besar POM di Bandung 87,06% kemudian Balai Besar POM di Makassar 86,04% dan Balai Besar POM di Surabaya 85,14%. Semua Balai Besar POM sudah memenuhi target

nasional. Perbedaan target masing-masing Balai mempengaruhi capaian kerja. Semua Balai Besar POM memiliki capaian kerja dengan kriteria “Baik”

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan / penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya. Persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah propinsi DKI Jakarta pada tahun cukup besar (realisasi 94,73% dari target 95%), menunjukkan bahwa pelaku industri sudah mempunyai komitmen yang cukup dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan menjamin kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan kondisi pandemic Covid-19 yang membuat kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan memastikan konsumsi makanan yang aman meningkat, sehingga industri juga menyesuaikan terhadap tuntutan tersebut. Itulah sebabnya produk makanan yang beredar sebagian besar memenuhi syarat, hasil sampling acak juga membuktikan hal tersebut. Namun demikian masih terdapat makanan yang tidak memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Dari 24 sampel (3,95%) tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian dan 5 sampel (0,82%) tidak memenuhi ketentuan penandaan. Dari 24 sampel yang tidak memenuhi syarat terdapat sampel madu

yang menyumbang persentase terbesar yaitu 7 sampel tidak memenuhi syarat nilai Enzim diastase dan Kadar HMF, 2 sampel tidak memenuhi syarat nilai enzim diastase dan 6 sampel tidak memenuhi syarat kadar HMF. Selain itu terdapat 4 sampel yang TMS siklamat, 2 sampel TMS Kadar sulfit, 2 sampel TMS kadar BHA, 1 sampel TMS kadar asam benzoat dan 1 sampel TMS kadar sakarin.

- 2) Makanan yang tidak memenuhi syarat pada tahun 2021 tersebut berupa produk madu, manisan buah dan manisan buah kering, minyak wijen, makanan ringan non ekstrudat, gula aren / merah dan bumbu siap pakai, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara intens terhadap sarana produksi makanan tersebut.
- 3) Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat, antara lain
- 4) Intervensi pengawasan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPPOB maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar

baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

- 5) Selain pengawasan, juga pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan, hal ini telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan secara rutin
- 6) Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS di luar DKI Jakarta diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan.
- 7) Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di masa mendatang.
- 8) Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman dan berkualitas

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta sebagai upaya meningkatkan capaian indicator persentase makanan yang memenuhi syarat sebagaimana

dijelaskan dalam butir e di atas merupakan kegiatan yang paling efektif untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, namun masih perlu ditingkatkan intensifikasinya dan diperluas cakupannya.

Peningkatan kompetensi personil juga merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Balai Besar POM di Jakarta telah memastikan bahwa personil telah melakukan evaluasi penandaan secara tepat dan melakukan pengujian secara valid (akurat). sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya hasil pengujian yang salah (misalnya seharusnya memenuhi syarat tapi disimpulkan tidak memenuhi syarat karena pengujian kurang valid) dan hasil evaluasi penandaan yang kurang tepat (seharusnya memenuhi ketentuan namun disimpulkan tidak memenuhi ketentuan). Kondisi alat laboratorium juga dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian. Laboratorium telah harus memastikan bahwa alat laboratorium yang digunakan sudah terkalibrasi / terverifikasi dan layak pakai sehingga memberikan hasil pengujian yang valid.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Mengingat persentase makanan yang tidak memenuhi syarat sebagian besar merupakan makanan yang tidak

memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian dan berupa produk madu, manisan buah dan manisan buah kering, minyak wijen, makanan ringan non ekstrudat, gula aren / merah dan bumbu siap pakai, maka upaya perbaikan yang paling penting untuk dilakukan adalah pengawasan dan pembinaan secara intens terhadap sarana produksi makanan agar memastikan produk yang dihasilkannya selalu memenuhi standar.

Selain itu perlu dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin produk makanan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi. Juga perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk makanan yang TMS (terutama madu, yang banyak ditemukan tidak memenuhi syarat mutu) untuk ditindaklanjuti secara lebih komprehensif.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95%	94,73%	99,71%	162.471.050	162.434.585	99,98%	1,00	0,00	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “Efisien”. Atau dapat dikatakan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target indikator persentase makanan yang memenuhi syarat telah dilaksanakan secara efisien.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	59,74	74,68	Cukup

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\%Obat MS = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

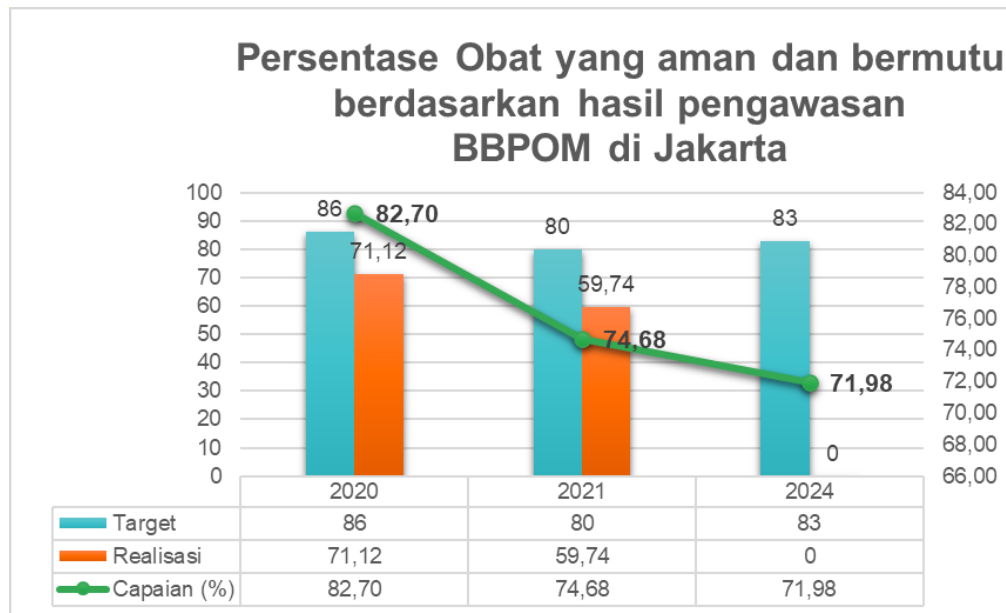
- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yaitu 74,68% dengan kriteria **“cukup”**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2021 dan target tahun 2024

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang disampling secara targeted. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini baru ditetapkan pada tahun 2020, dengan demikian data realisasi tahun 2020-2021 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya.

BADAN POM

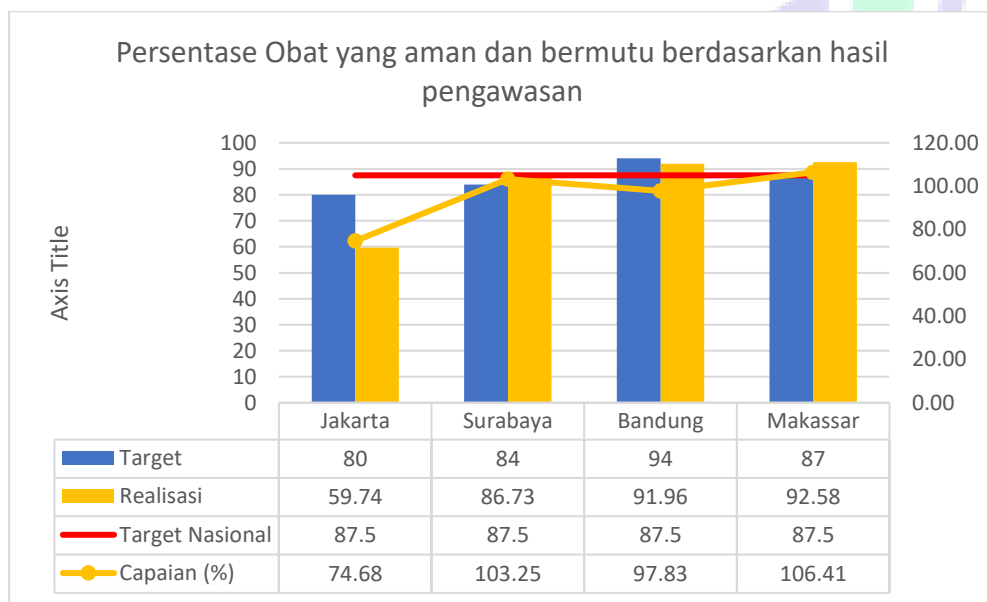


Gambar 5. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra RPJMN tahun 2024, kontribusi capaian pada tahun 2021 ini adalah sebesar 71,98%. Berdasarkan gambar di atas, capaian tahun 2020 sebesar 82.70% (baik) sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 74.68% (cukup). Untuk target akhir periode renstra RPJMN tahun 2024 ditetapkan target 83. Untuk tahun 2021 mulai awal tahun target ditetapkan 86,5% namun pada bulan November 2021 terdapat reviu terhadap rencana strategis Balai Besar POM di Jakarta, dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.12.21.13478 target mengalami penurunan menjadi 80%. Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan triwulan berjalan. Dengan penurunan target tersebut diperoleh realisasi obat yang aman dan bermutu tahun 2021 sebesar 59,74% sehingga capaiannya

sebesar 74,68% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 82,70%, maka tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,02%.

c. Perbandingan Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 6. Perbandingan realisasi persentase Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 dengan Balai lain dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Dari gambar di atas diketahui bahwa target nasional sebesar 87,5%. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar menempati urutan tertinggi dengan realisasi sebesar 92,58%, disusul Balai Besar POM di Bandung 91,96%, Balai Besar POM di Surabaya 86,73% dan Balai Besar POM di Jakarta 59,74%. Hanya Balai Besar POM di Makassar dan Bandung yang sudah

memenuhi target nasional, sedangkan Balai Besar POM di Surabaya dan Jakarta belum memenuhi. Perbedaan target masing-masing Balai mempengaruhi capaian kerja. Semua Balai Besar POM memiliki capaian kerja dengan kriteria “Baik”, kecuali Balai Besar POM di Jakarta memiliki capaian kerja dengan kriteria “Cukup”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pengawasan, masih banyak ditemukan sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan. Ditemukan 204 sampel atau 38,20% yang tidak memenuhi ketentuan penandaan (sebagian besar sampel kosmetik dan obat tradisional) dan 1,87% (10 sampel) tidak memenuhi syarat pengujian yaitu 6 sampel Obat Tradisional tidak memenuhi syarat pengujian Mikrobiologi (3 sampel ALT, 1 sampel ALT dan AKK, 2 sampel APM Enterobacteriace). Sedangkan untuk produk kosmetik terdapat 4 sampel tidak memenuhi syarat pengujian mikrobiologi (2 sampel ALT dan 2 sampel APM Enterobacteriace)

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu pada tahun 2021 masih di bawah target dengan kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa produk obat yang beredar di Provinsi DKI Jakarta masih cukup banyak yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu serta ketentuan penandaan, terutama kosmetik dan obat tradisional. Sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket

yang komprehensif, untuk itu diperlukan pengawasan post market yang ketat guna melindungi masyarakat dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. Dalam kondisi pandemic Covid 19 ini, masyarakat sangat membutuhkan produk Obat yang menunjang kesehatan dan daya tahan tubuh, sehingga diharapkan produk obat yang dikonsumsi adalah produk yang aman dan bermutu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Peningkatan / penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya.

Banyaknya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan menyumbang porsi terbesar persentase produk obat yang tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Hal ini disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif. Selain kosmetik, banyak juga ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sedangkan untuk komoditi lain relative lebih baik.

Juga masih ditemukan adanya produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat pengujian, walaupun jumlahnya tidak banyak. Bahkan ada produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi

ketentuan penandaan dan sekaligus tidak memenuhi syarat pengujian.

Banyaknya temuan tersebut di atas menyebabkan rendahnya realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah provinsi DKI Jakarta. Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

- Intervensi pengawasan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi / kosmetik / obat tradisional untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP / *Good Manufacturing Practice*), sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Selain pengawasan, juga pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan, terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional dan kosmetik. Hal ini telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan secara rutin
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS

di luar DKI Jakarta diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan.

- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di masa mendatang.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat (termasuk obat tradisional dan kosmetik) kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman dan berkualitas.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)*

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta sebagai upaya meningkatkan capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam butir e di atas merupakan kegiatan yang cukup efektif untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, namun masih perlu ditingkatkan intensifikasinya dan diperluas cakupannya.

Peningkatan kompetensi personil juga merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Balai Besar POM di Jakarta telah memastikan bahwa personil telah melakukan evaluasi penandaan secara tepat dan melakukan pengujian secara

valid (akurat). sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya hasil pengujian yang salah (misalnya seharusnya memenuhi syarat tapi disimpulkan tidak memenuhi syarat karena pengujian kurang valid) dan hasil evaluasi penandaan yang kurang tepat (seharusnya memenuhi ketentuan namun disimpulkan tidak memenuhi ketentuan). Kondisi alat laboratorium juga dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian. Laboratorium telah harus memastikan bahwa alat laboratorium yang digunakan sudah terkalibrasi / terverifikasi dan layak pakai sehingga memberikan hasil pengujian yang valid.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BPOM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%	59,75%	74,67%	309.593.550	306.909.050	99,13%	0,75	-0,25	75%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar -0.25 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “**tidak efisien**”, dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien

setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021(%)	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	81	94,93	117,20	Sangat Baik

Persentase Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

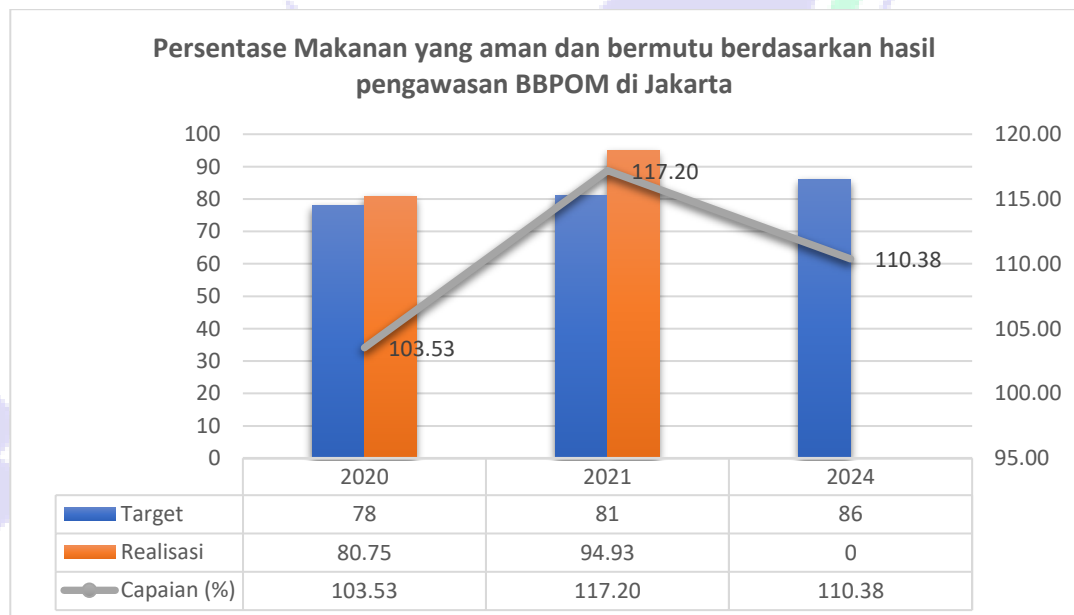
Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sudah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 117,20% dengan kriteria **“sangat baik”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

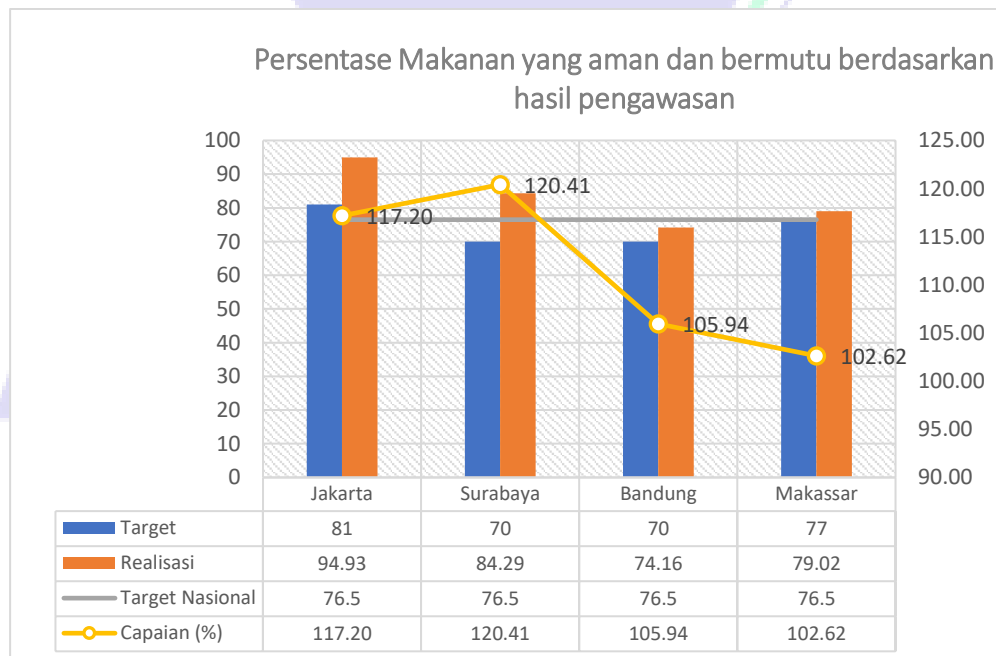
Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara targeted. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini ditetapkan pada tahun 2020, dengan demikian data realisasi tahun 2021 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya.



Gambar 7. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 ini, “pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” telah menjadi indikator kinerja utama sehingga data realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2021 sudah dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan (selain pangan fortifikasi) yang disampling secara targeted. Dijadikannya pangan fortifikasi menjadi indikator kinerja utama yaitu Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan berubahnya target Balai pada triwulan IV tahun 2021 berpengaruh terhadap peningkatan Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Saat ini realisasi tahun 2021 sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 8. Perbandingan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain yang setara dan target nasional

Berdasarkan gambar di atas diketahui target nasional sebesar 76,5%. Tahun 2021 realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta 94,93%, selanjutnya Balai Besar POM di Surabaya 84,29%, Balai Besar POM di Makassar 79,02% dan Balai Besar POM di Bandung 74,16%. Semua Balai Besar POM kecuali Balai Besar POM di Bandung sudah memenuhi target nasional. Perbedaan target masing-masing Balai mempengaruhi capaian kinerja. Balai Besar POM di Jakarta dan Surabaya memiliki capaian kinerja dengan kriteria “Sangat baik” sedangkan Balai Besar POM di Bandung dan Makassar memiliki capaian kinerja dengan kriteria “Baik”

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 117,20% dengan kriteria **“sangat baik”**. Terdapat 2 sampel yang TMS berdasarkan hasil pengujian (TMS pH dan TMS siklamat), 5 sampel lainnya TMK penandaan, dari total 138 sampel. Hal ini menunjukkan bahwa produk makanan yang beredar di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar telah memenuhi standar keamanan dan mutu serta memenuhi

ketentuan penandaan. Pada tahun 2020, pemeriksaan sampel makanan yang aman dan bermutu sudah memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak. Perubahan cara pengukuran persentase sampel makanan yang aman dan bermutu diterapkan sepenuhnya pada tahun 2020, sehingga target sampel Makanan yang aman dan bermutu menurun di tahun 2020 yaitu 78%. Meningkatnya capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan disebabkan berubahnya target Balai dan dijadikannya “pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” menjadi indikator kinerja utama baru pada Triwulan IV tahun 2021.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Walaupun realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah memperoleh kriteria sangat baik, namun masih ada produk yang TMS berdasarkan hasil uji dan TMK penandaan. Maka berbagai kegiatan yang dapat mendukung capaian indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tetap harus dilakukan, antara lain :

- Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang

dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga telah berdampak pada peningkatan capaian indikator kinerja.

- Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.
- Melaksanakan bimbingan teknis pendampingan bagi industri rumah tangga yang mendaftarkan produknya.
- Pengembangan metode analisa yang menyesuaikan dengan tren produk beredar dan peningkatan kompetensi personil pengujian agar cakupan pengawasan makin luas dan hasil pengujian tetap dipastikan validitasnya.
- Peningkatan frekuensi penyuluhan dan penyebaran informasi tentang keamanan obat dan makanan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta agar kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan berkualitas meningkat.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Karena indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator kinerja utama yang baru ditetapkan di tahun 2020, maka belum ada rekomendasi perbaikan

kinerja periode sebelumnya. Namun upaya-upaya sebagaimana yang disebutkan di butir e tetap harus dilakukan secara konsisten dan makin intensif dari tahun ke tahun.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang aman dan bermutu BBPOM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81%	94,93%	117,19%	162.471.050	162.434.585	99,98%	1,17	0,17	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.17 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien.

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 11. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAUN 2021(%)	KRITERIA
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	88	81,67	92,81	Baik

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.

Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Contoh: Parameter uji garam berdasarkan pedoman sampling adalah penetapan kadar KIO_3 , NaCl, cemaran logam Pb dan kadar air. Meskipun yang MS hanya kadar KIO_3 sedangkan semua parameter lain TMS, maka kesimpulan akhir untuk perhitungan IKU ini tetap MS.

Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

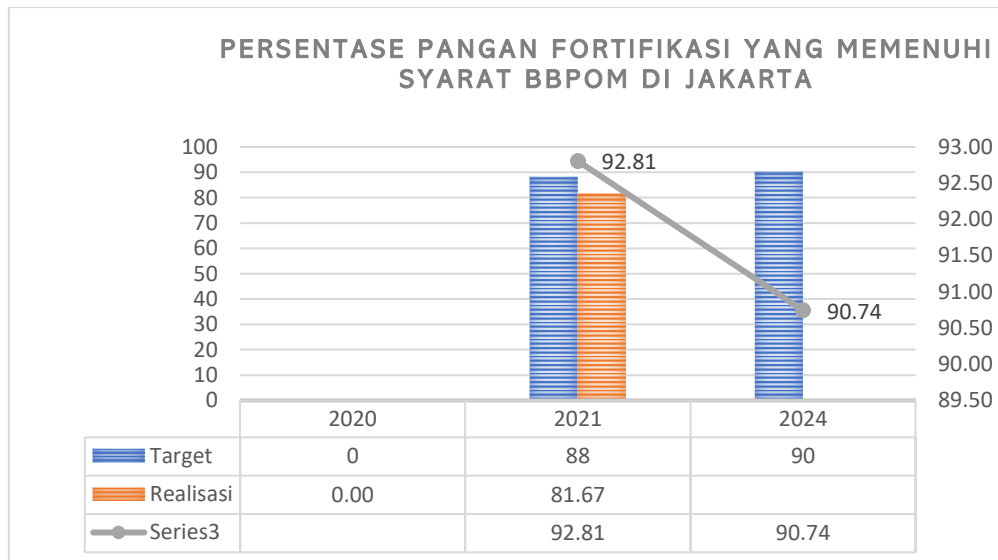
% Pangan Fortifikasi yang MS =

$$\frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV tahun 2021 **belum memenuhi target** yang ditetapkan yaitu 92.81 %, namun masih masuk dalam kriteria **“baik”**.

b. Perbandingan Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

BADAN POM

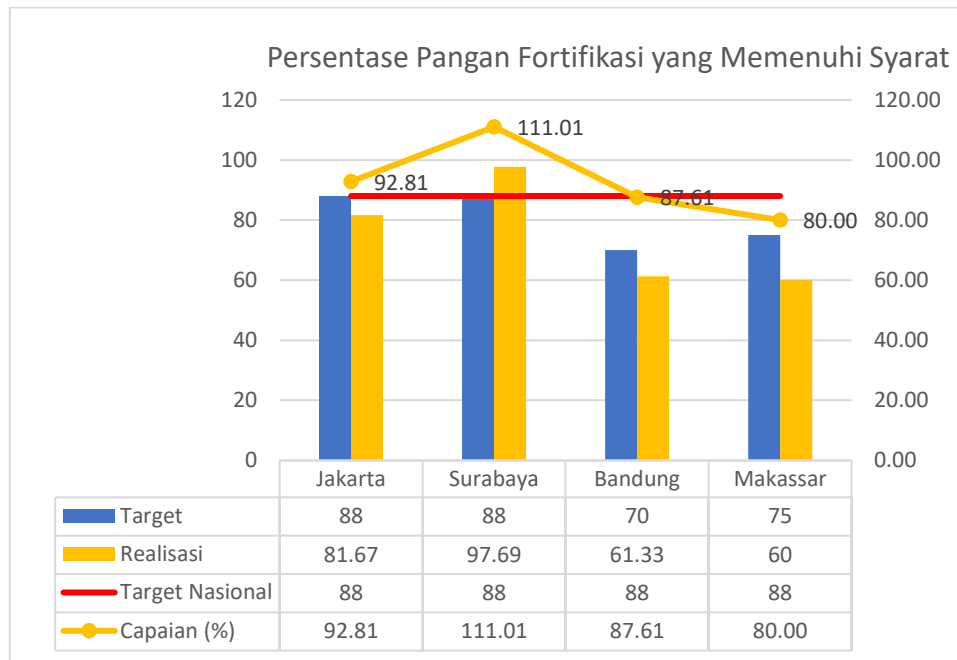


Gambar 8. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Pada awal tahun 2021, Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dihitung sebagai bagian dari IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (sampel targeted). Dengan adanya IKU Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat ini, terdapat perubahan definisi operasional pada IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Karena IKU baru ini terbit di Triwulan IV tahun 2021, maka realisasi dan capaian indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di tahun 2021 belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar XXX. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa target nasional sebesar 88%. Tahun 2021 realisasi presentasi pangan fortifikasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya 97,69%, kemudian Balai Besar POM di Jakarta 81,67%, Balai Besar POM di Bandung 61,33% dan Balai Besar POM di Makassar 60%. Hanya Balai Besar POM di Surabaya yang sudah memenuhi target nasional. Perbedaan target masing-masing Balai mempengaruhi capaian kinerja. Balai Besar POM di Surabaya memiliki capaian dengan kriteria “Baik sekali”, Balai Besar POM di Jakarta memiliki capaian dengan kriteria “Baik” dan Balai Besar POM di Bandung dan Makassar memiliki capaian dengan kriteria “Cukup”.

d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Pada tahun 2021 ini, IKU “Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” merupakan tambahan IKSK 1 dari SK1 (Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat), dengan memisahkan pangan fortifikasi dari IKU “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”.
- Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, namun persentase capaian pangan fortifikasi masih masuk dalam kriteria “baik“. Berdasarkan hasil evaluasi pengujian kimia, jumlah pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 98 sampel (81.67%). Produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat sebanyak 22 sampel (18.33%) yaitu 19 sampel garam dan 3 sampel tepung terigu dengan parameter yang diuji adalah penetapan kadar KIO_3 pada garam dan penetapan kadar Fe dan Zn pada tepung terigu. Semua sampel pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat ini memenuhi syarat mikrobiologi.
- Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar Sebagian besar adalah produk yang

memenuhi syarat.

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain:

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPPOB maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk Industri di luar DKI Jakarta guna lebih meningkatkan proses pengawasan.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan dan diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, sehingga cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas dan menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan obat dan makanan.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE

Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memilih produk yang berkualitas dan aman bagi Kesehatan.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam upaya perbaikan kinerja ke depannya, Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan berbagai upaya, antara lain :

- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia dengan pelaku usaha terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta karena masih banyak produk SNI wajib yang belum memenuhi syarat yang ditentukan.
- Peningkatan kompetensi personil secara berkelanjutan baik terhadap aturan-aturan dan metode-metode yang update dalam pengujian guna menjaga mutu makanan yang memenuhi syarat lebih banyak..
- Mengintensifkan bimbingan teknis / pendampingan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	88%	81,67%	92,81%	17.276.000	8.605.310	49,81%	1,86	0,86	88%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,86 dengan capaian tingkat efisiensi 88%, sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien.

Dari pencapaian 5 target indikator pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI\ 5}{5}$$

$$NPS = \frac{93.60 + 99.72\% + 74.68\% + 117.20\% + 92.81\%}{5}$$

$$NPS = 95.60\%$$

Dengan NPS 95,60%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 10. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	85	87,12	102,49	Baik

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) dalam

memilih Obat dan Makanan. Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu **pengetahuan, sikap dan perilaku.**

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk.

Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, produk aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% dan dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*). Tahap pemilihan sampel-*Two Stage Cluster Sampling* yaitu memilih blok sensus secara PPS (*Probability Proportional Size*) yaitu sampling dengan *size* jumlah rumah tangga di setiap strata provinsi perkotaan/perdesaan dan selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga.

Subyek studi adalah anggota rumah tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani serta menggunakan produk Obat dan Makanan. Jumlah responden di Provinsi DKI Jakarta adalah 450 responden dari total sampel sebanyak

16340 rumah tangga (1634 blok sensus terdiri atas 474 kabupaten/kota, 1452 kecamatan, dan 1628 desa secara nasional).

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 - 60
Cukup Baik	60 - 75
Baik	75 - 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus :

$$\text{Indeks} = \frac{I_i - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

I_i = skor faktor ke- i

I_{\min} = skor faktor minimal

I_{\max} = skor faktor maksimal

n = banyaknya responden

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 diperoleh sebesar **87,12** dengan kategori **Baik**. Hasil ini telah melampaui target kinerja sebesar 85 sehingga diperoleh **capaian sebesar 102,49%** kategori kinerja **Baik**. Dengan hasil ini, DKI Jakarta memperoleh capaian indeks kesadaran masyarakat tertinggi dibandingkan 33 provinsi lainnya secara nasional.

Indeks kesadaran masyarakat ini dibentuk dari 3 (tiga) indikator pengukuran, yaitu:

- 1) Pengetahuan, diperoleh indeks pengetahuan sebesar 93,48 dengan kategori Sangat Baik. Hasil ini merupakan nilai indeks pengetahuan masyarakat tertinggi secara nasional. Indeks pengetahuan masyarakat tertinggi berdasarkan produk adalah produk pangan olahan sebesar 95,50 (Sangat Baik) diikuti dengan produk Obat sebesar 95,38 (Sangat Baik), produk Kosmetik sebesar 93,23 (Sangat Baik), dan produk Suplemen Kesehatan sebesar 91,65 (Sangat Baik). Indeks pengetahuan masyarakat berdasarkan produk terendah adalah produk Obat Tradisional sebesar 90,08 dengan kategori indeks Sangat Baik. Hasil indeks pengetahuan per kategori produk masyarakat Jakarta secara keseluruhan masuk ke dalam kategori Sangat Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat akan Obat dan Makanan yang bermutu sudah Sangat Baik.
- 2) Sikap, diperoleh indeks sikap sebesar 83,89 dengan kategori Baik. Hasil ini merupakan hasil indeks sikap masyarakat tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau. Indeks sikap per kategori produk tertinggi diperoleh terhadap produk Obat sebesar 84,75 (Baik) diikuti produk Suplemen Kesehatan sebesar 83,77 (Baik), produk Kosmetik sebesar 83,54 (Baik), Obat Tradisional sebesar 83,46 (Baik), dan produk Pangan Olahan sebesar 83,35 (Baik). Hal ini mengindikasikan meskipun pengetahuan masyarakat mengenai produk pangan menghasilkan nilai tertinggi belum disertai dengan sikap masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan bermutu.

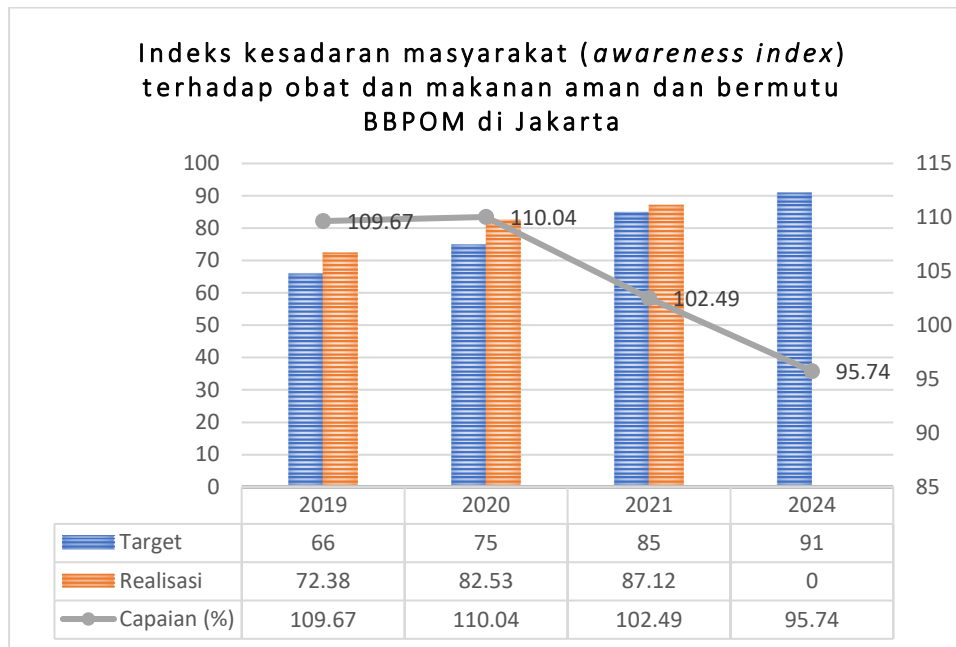
3) Perilaku, diperoleh indeks perilaku masyarakat sebesar 83,99 dengan kategori Baik. Hasil ini merupakan hasil indeks sikap masyarakat tertinggi kedua setelah Jawa Tengah. Indeks perilaku per kategori produk tertinggi diperoleh terhadap produk Obat sebesar 86,61 (Baik), kemudian berturut-turut diikuti oleh produk Pangan Olahan sebesar 84,33 (Baik), Kosmetik sebesar 83,34 (Baik), Suplemen Kesehatan sebesar 82,49 (Baik), dan Obat Tradisional sebesar 81,88 (Baik). Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku masyarakat dalam menyimpan produk, dan membaca label/kemasan/dus/brosur dari Obat Tradisional aman dan bermutu masih lebih rendah dibandingkan komoditi Obat dan Makanan lainnya.

Dari nilai indikator pembentuk pengukuran, diketahui indikator tertinggi berasal dari pengetahuan dengan nilai 93,48 dan terendah berasal dari sikap sebesar 83,89.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2019-2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 meningkat bila dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas, indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2020, nilai indeks tahun 2021 meningkat sebesar 4,59 poin dari 82,53 (Baik) di tahun 2020 menjadi 87,12 (Baik) di tahun 2021.



Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan 2019-2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

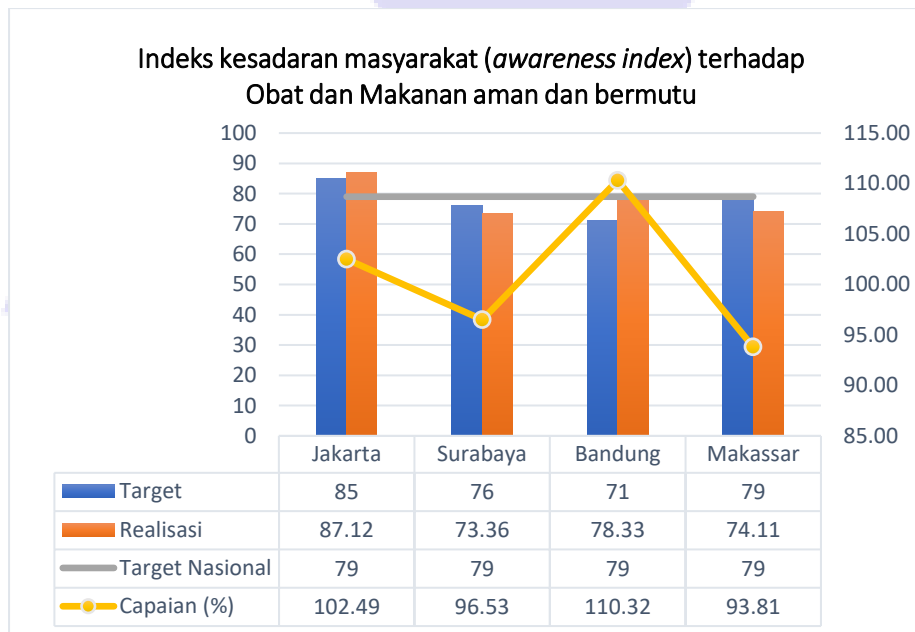
Nilai indeks yang diperoleh pada tahun 2019-2021 sudah melampaui target dengan capaian berturut-turut sebesar 109,67% (Baik) di tahun 2019; 110,04% (Sangat Baik) di tahun 2020; dan 102,49% (Baik) di tahun 2021. Target indeks tahun 2019-2021 juga meningkat dari 66 di tahun 2019 menjadi 75 di tahun 2020 dan 85 di tahun 2021 sehingga capaian 2019-2021 tidak dapat dibandingkan karena mempunyai *baseline* target yang berbeda.

Apabila realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar

87,12 dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2024 sebesar 91, dapat dihitung capaian kinerja sebesar 95,74% dengan kategori Baik. Oleh karena itu, dengan berbagai upaya peningkatan kinerja, BBPOM di Jakarta optimis dapat mencapai target Renstra tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan realisasi indeks oleh Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Makassar. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Jakarta sebesar 87,12 (Baik), BBPOM di Bandung sebesar 78,33 (Baik), BBPOM di Makassar sebesar 74,11 (Cukup Baik), dan BBPOM di Surabaya sebesar 73,36 (Cukup Baik).



Gambar 16. Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, dan Balai Besar POM di Makassar seluruhnya masuk ke dalam kategori Baik secara berturut-turut 102,49%; 96,53%; dan 93,81%. Sedangkan, untuk BBPOM di Bandung berhasil memperoleh capaian sebesar 110,32% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini karena target yang dimiliki BBPOM di Bandung memiliki nilai paling rendah dibandingkan balai-balai lainnya. Sebaliknya, BBPOM di Jakarta memiliki target paling tinggi yaitu sebesar 85.

Apabila dibandingkan dengan target nasional indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2021 sebesar 79, hanya realisasi indeks Balai Besar POM di Jakarta yang telah berhasil melampaui target tersebut

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor penyebab keberhasilan dari peningkatan Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mencari informasi terkait produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama mengenai Obat dan Vaksin Covid-19 serta penerapan perilaku hidup sehat di era *new normal*.
- 2) Metode Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif baik secara tatap muka maupun non tatap muka dengan diadakannya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE bersama Tokoh masyarakat yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, seperti komunitas ibu Rumah Tangga, Remaja/Karang Taruna, Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan.
- 3) Intensifikasi penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan melalui media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter*).
- 4) Konten materi KIE yang menarik dan mencakup semua komoditi Obat dan Makanan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 antara lain:

Intensifikasi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui berbagai program inovasi, seperti Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial

BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta).

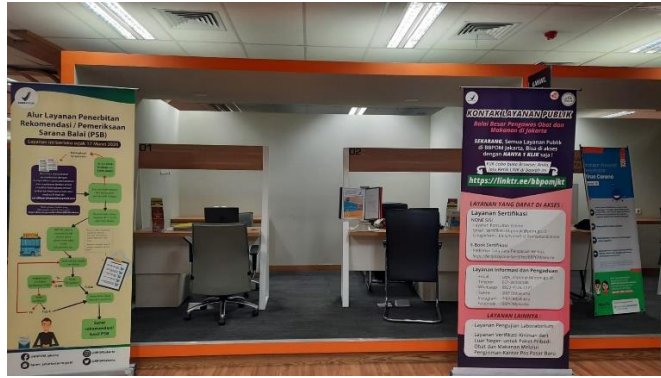
Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.



Gambar 10 Contoh infografis Obat dan Makanan (ARIPIN)



Gambar 11 Kerling Jakarta



Gambar 12 Sultan Betawi

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja

Rekomendasi pada pencapaian kinerja indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode sebelumnya yaitu memperbanyak kegiatan KIE dan penyebaran informasi kepada masyarakat, terutama melalui intensifikasi inovasi program KIE dengan pemanfaatan media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube*). Atas rekomendasi tersebut, pada tahun 2021 telah diaplikasikan berbagai macam inovasi pelaksanaan KIE dan penyebaran informasi, yaitu melalui Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta).

Untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat perlu disusun program KIE dengan pesan utama paparan materi

yang mencakup semua komoditi Obat dan Makanan dan diperlukan sosialisasi tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan agar masyarakat lebih sadar akan perannya dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang antara lain:

- 1) Meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan KIE.
- 2) Meningkatkan sinergi lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85	87,12	102,49%	156.071.850	155.859.022	99,86%	1,03	0,03	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.03 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga

dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti sarana penyebaran informasi dan KIE Obat dan Makanan yang optimal serta sumber daya manusia yang memadai di bidang komunikasi dan informasi Obat dan Makanan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

Dari pencapaian 1 target indikator pada sasaran strategis 2, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI}}{1}$$

$$\text{NPS} = \frac{102.49}{1}$$

1

Dengan NPS 102,49%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 11. Realisasi Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISAS I	CAPAIAN TAHUN 2021 (%1	KRITERI A
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,6	86,7	100,12	Baik

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

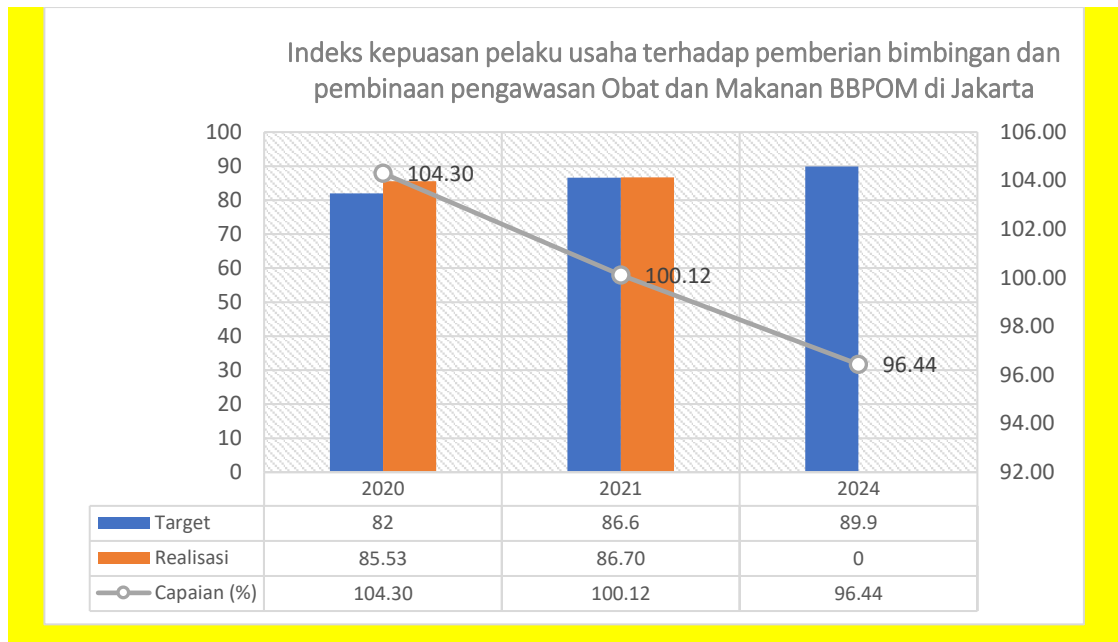
Indeks Kepuasan pelaku usaha adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. **Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang** diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2021

Target dinyatakan dalam angka. Indeks Kepuasan Pelaku usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Teknis pengumpulan data mengacu pada pedoman terbagi atas cara setelah kegiatan bimbingan langsung petugas memberikan link kuisioner yang dapat diakses oleh peserta melalui link <https://surveiprkom.pom.go.id>.

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 sebesar 86,7 bernilai Baik dan juga telah melampaui target sebesar 86,6.

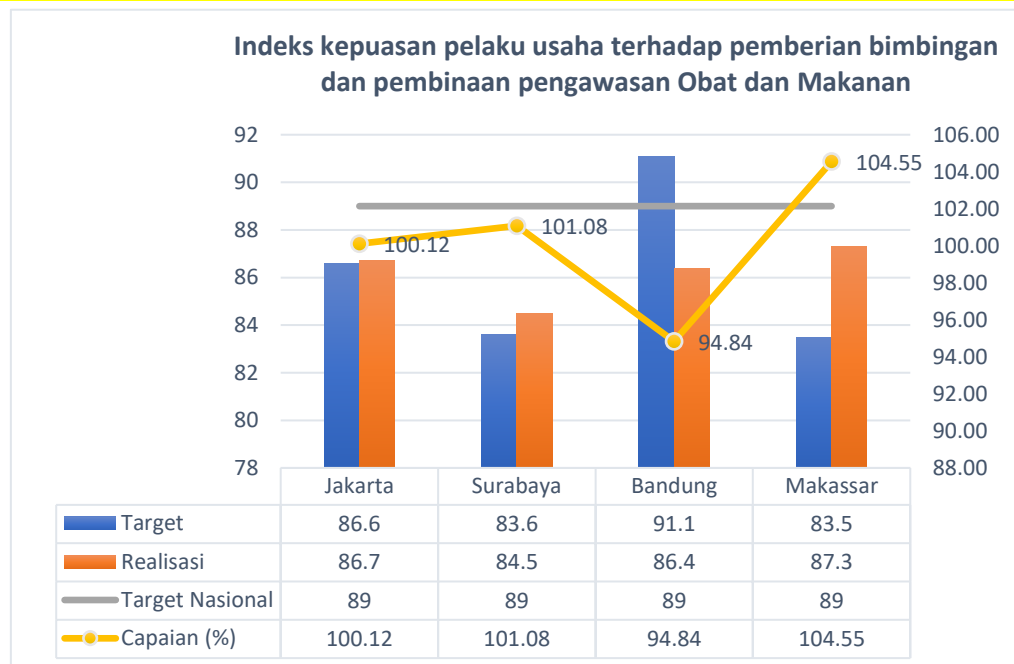
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 17. Perbandingan *realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024*

Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 sebesar 86,7 melampaui target tahun 2021 dan juga melampaui capaian tahun 2020 sebesar 85,53. Capaian ini diperoleh dari 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan jumlah responden sebanyak 1.142 (seribu seratus empat puluh dua). Balai Besar POM di Jakarta dengan capaian 100,12% berada di atas capaian Nasional sebesar 97,19%. Pencapaian target periode renstra pada tahun 2024 sebesar 89,9 bisa disiasati dengan melakukan bimbingan dan pembinaan dengan cara yang lebih baik dan lebih inovatif misalnya dengan memberdayakan para JakPreneur yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 18. Perbandingan Indeks kepatuhan (*Compliance Index*) pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 dengan Balai Lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan

Diketahui bahwa nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta dan balai lain yang setara yaitu Balai Besar POM di Surabaya 84,5, Balai Besar POM di Bandung 86,4 dan Balai Besar POM di Makassar 87,3 sedangkan capaian indeks kepuasan pelaku usaha sebesar 87,6. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Balai Besar POM di Jakarta meraih nilai indeks kepuasan pelaku usaha **tertinggi** dari tiga balai pembanding yang setara. Balai Besar POM di Surabaya memiliki nilai **indeks yang terendah**.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dilihat dari jumlah responden dan jumlah kegiatan selama tahun 2021 Balai Besar POM di Jakarta menduduki peringkat pertama dari 33 Balai Besar dan Balai dengan jumlah kegiatan 32 (tiga puluh dua) dan jumlah responden 1142 (seribu seratus empat puluh dua).

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah pembinaan penerapan CPPOB secara bertahap kepada UMKM di Bidang Pangan oleh petugas Balai Besar POM di Jakarta telah dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Cara Pengolahan Pangan yang Baik di DKI Jakarta. Melalui pendampingan secara berkesinambungan, diharapkan UMKM Pangan tersebut dapat menerapkan aspek-aspek CPPOB secara bertahap.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jakarta adalah meningkatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang ada. Untuk pengujian sampel pihak ketiga dilakukan untuk memaksimalkan layanan pengujian pihak ketiga agar tepat waktu dan memuaskan penerima layanan. Untuk layanan

informasi terkait obat dan makanan dilakukan baik terhadap masyarakat yang datang langsung ke Kantor Balai Besar POM di Jakarta maupun terhadap masyarakat yang mencari informasi melalui telepon ataupun media sosial seperti *instagram, facebook, dan twitter*. Layanan informasi melalui *Whatsapp* meningkatkan jumlah layanan informasi dan pengaduan di Balai Besar POM di Jakarta dan meningkatkan kecepatan respon yang diberikan. Respon yang cepat terhadap pertanyaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan BBPOM di Jakarta. Kepuasan pelaku usaha dinilai dari Indeks Kepuasan Pelaku Usaha yang setiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun sebelumnya capaian IKEPU sebesar 85,53 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 86,7. Ini tentunya menggambarkan kenaikan terhadap kepuasan yang diperoleh melalui survey yang dilakukan. Rekomendasi untuk perbaikan peningkatan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha bisa disiasati dengan melakukan bimbingan dan pembinaan dengan cara yang lebih baik dan lebih inovatif misalnya dengan memberdayakan para JakPreneur yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang akan dimulai pada tahun 2022

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output	Input (anggaran)	IE	TE	
-----------	--------	------------------	----	----	--

	T	R	%	T	R	%			Capaian TE
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.6	86.7	100,12%	56.977.100	56.943.540	%99,94	0,00	1,00	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -0 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

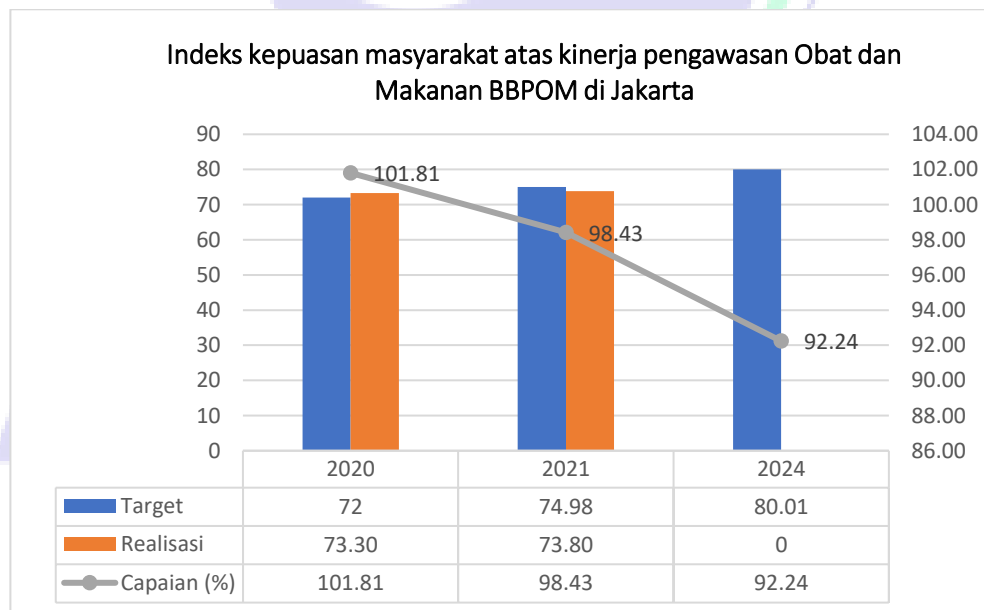
a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 12. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	74,98	73,8	98,43	Baik

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 73,8 (Cukup Baik) mengalami peningkatan sebesar 0,5 poin bila dibandingkan indeks tahun 2020 sebesar 73,3 (Cukup Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 74,98 diperoleh capaian kinerja sebesar 98,43% (kinerja Baik). Nilai capaian ini lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101,81% (Kinerja Baik) dengan target sebesar 72. Hal ini disebabkan adanya peningkatan *baseline* target yang cukup signifikan di tahun 2021, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.



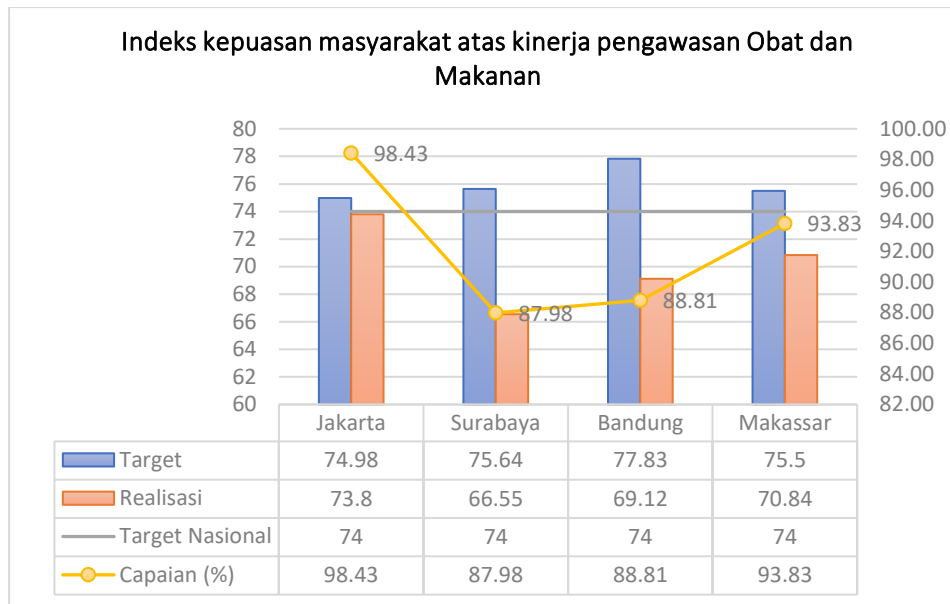
Target akhir renstra RPJMN 2020-2024 adalah 80,01. Realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 73,80 ini memiliki capaian sebesar 92,24% dengan kategori kinerja Baik. Melalui berbagai upaya peningkatan kinerja BBPOM di Jakarta, khususnya dalam hal pengawasan dan KIE Obat dan Makanan, nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di akhir tahun 2024 diharapkan akan tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan dengan realisasi indeks oleh Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Makassar. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Jakarta sebesar 73,8 (Cukup Baik), BBPOM di Makassar sebesar 70,84 (Cukup Baik), BBPOM di Bandung sebesar 69,12 (Cukup Baik), dan BBPOM di Surabaya sebesar 66,55 (Cukup Baik).

BADAN POM



Gambar 13 Perbandingan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Makassar masuk ke dalam kategori Baik secara berturut-turut sebesar 98,43% dan 93,83%. Sedangkan, BBPOM di Bandung dan Balai Besar POM di Surabaya memiliki capaian kategori Cukup sebesar 88,81% dan 87,98%. Hal ini karena target yang dimiliki BBPOM di Bandung dan Surabaya lebih tinggi dibandingkan Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Makassar.

Apabila dibandingkan dengan target nasional indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 74, tidak ada balai yang melampaui target nasional dari keempat balai yang dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 masih berada di bawah target kinerja. Kondisi pandemi Covid-19 secara tidak langsung menjadi salah satu faktor BPOM lebih dikenal masyarakat melalui informasi keamanan vaksin, pemberian izin EUA (*emergency use authorization*), informasi mengenai Obat Covid-19, Suplemen Kesehatan, dan Obat Tradisional untuk peningkatan daya tahan tubuh di masa pandemi dan penyediaan laboratorium untuk pengujian Covid-19 serta penyuluhan terkait perilaku hidup sehat di era *new normal*. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu meningkat serta diikuti oleh ekspektasi terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, sehingga indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta belum mencapai target yang ditetapkan.

Hal yang sama juga terjadi secara nasional yang ditunjukkan oleh hasil indeks kepuasan masyarakat tingkat nasional adalah 68,89 termasuk dalam kategori cukup puas dan belum melampaui target nasional sebesar 74. Sehingga ke depannya diperlukan KIE yang lebih intensif dan menyeluruh untuk meningkatkan layanan pemberian informasi kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media.

Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu melalui intensifikasi publikasi berbagai program pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan lintas sektor dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta, konsultasi publik, pemanfaatan *subsite* dan media sosial melalui berita aktual dan infografis yang menampilkan informasi mengenai kinerja pengawasan yang lebih menarik.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang tercapainya indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 antara lain:

- 1) Penerapan inovasi peningkatan kinerja, seperti LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi *Whatsapp*), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi *Online*), Laron Baja (Verifikasi *Lartas Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) yang memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada di BBPOM di Jakarta

sehingga masyarakat dapat merasakan dampak secara langsung dari kinerja pengawasan BBPOM di Jakarta.

- 2) Terselenggaranya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti intensifikasi pengawasan dan Razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar, dan produk ilegal serta program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.

f. Evaluasi Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masa mendatang, diperlukan kegiatan publikasi yang lebih masif terkait berbagai program BBPOM di Jakarta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan pesan utama untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan sehingga masyarakat mengetahui program pengawasan dan dapat merasakan dampak atas kinerja BBPOM di Jakarta dan pada akhirnya

dapat meningkatkan kepuasan atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 14 Kegiatan fasilitasi UMKM Pangan



Gambar 15 Kegiatan Desk CAPA layanan sertifikasi

BADAN POM

UNIT LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN (ULPK)
BBPOM DI JAKARTA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

021-8430406/48 (Telp)
021-8430407/49 (Faks)

0822-1126-7771

jkb_bppom@indosat.com
ulpk_bppom@ppom.go.id

@BPOMJakarta

R. Al-Syehbah 133
Gedung Jakarta Tower
13B/02

BPOMJAKARTA

Senin-Jumat
jam 8.00-16.00

BBPOMJAKARTA

Kami Telah Hadir di
MAL PELAYANAN PUBLIK
Provinsi DKI Jakarta

Setiap Hari Selasa
Jam 08.00 - 16.00

Jalan HR. Rasuna Said
Kuningan, Jakarta Selatan
(Lantai 3)

Gambar 16 Akses ULPK BBPOM di Jakarta

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	74,98	73,8	98,43 %	156.071.850	155.859.022	99,86%	0,99	-0,01	75%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -0.01 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran **“Tidak Efisien”**. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 13. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	90	95,61	106,32	Baik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori Mutu Pelayanan	Interval Indeks
Tidak Baik (D)	25,00-64,99
Kurang Baik (C)	65,00-76,60
Baik (B)	76,61-88,30
Sangat Baik (A)	88,31-100,00

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dilakukan dengan survei yang dilakukan mulai 18 Februari s.d. 14 Juni 2021 terhadap 188 responden. Survei kepuasan masyarakat tahun 2021 pada Balai Besar POM di Jakarta dilakukan terhadap 2 (dua) jenis layanan, yaitu layanan pengujian (4 responden) dan layanan informasi dan pengaduan (184 responden).

Hasil survei pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh nilai sebesar **95,61** melebihi target nilai yang ditetapkan yaitu 90,00 sehingga diperoleh **capaian sebesar 106,23%** dengan kategori kinerja **Baik**. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa mutu layanan BBPOM di Jakarta mendapat kategori A (Sangat Baik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan pada BBPOM di Jakarta sebagai berikut:

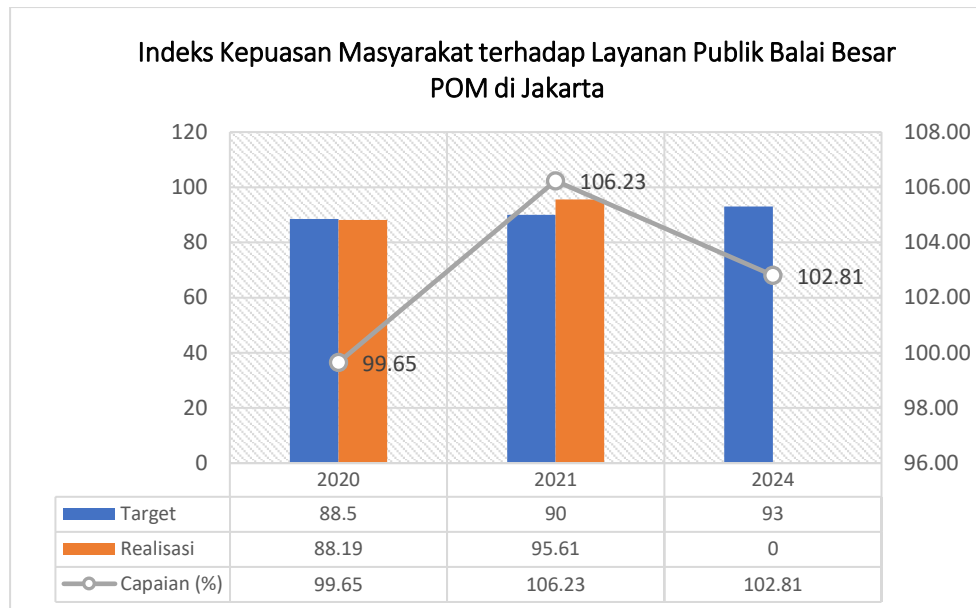
Unsur Pelayanan		Nilai
U1	Persyaratan	95,30

Unsur Pelayanan		Nilai
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	94,24
U3	Waktu Penyelesaian	95,45
U4	Biaya/Tarif	95,74
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,30
U6	Kompetensi Pelaksana	96,19
U7	Perilaku Pelaksana	96,81
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,10
U9	Sarana dan Prasarana	95,39
Nilai		95,61

Sedangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat per jenis pelayanan dan per unsur pelayanan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Pengujian	95,83	95,83	91,67	100,00	95,83	100,00	95,83	91,67	91,67	95,37
Layanan Informasi dan Pengaduan	95,29	94,20	95,53	95,65	95,29	96,11	96,83	96,20	95,47	95,62

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 95,61 telah melampaui target kinerja sebesar 90 sehingga diperoleh capaian sebesar 106,23%. Nilai indeks meningkat sebanyak 7,42 dari nilai indeks tahun 2020 yaitu sebesar 88,19. Adapun nilai survei kepuasan masyarakat per unsur pelayanan pada BBPOM di Jakarta tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Unsur Pelayanan		2020	2021	Naik/Turun
U1	Persyaratan	84,65	95,30	10,65
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	84,82	94,24	9,42
U3	Waktu Penyelesaian	88,28	95,45	7,17
U4	Biaya/Tarif	88,12	95,74	7,62
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	87,29	95,30	8,01
U6	Kompetensi Pelaksana	91,09	96,19	5,1

Unsur Pelayanan		2020	2021	Naik/Turun
U7	Perilaku Pelaksana	92,24	96,81	4,57
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	90,10	96,10	6,0
U9	Sarana dan Prasarana	87,13	95,39	8,26
Nilai		88,19	95,61	7,42

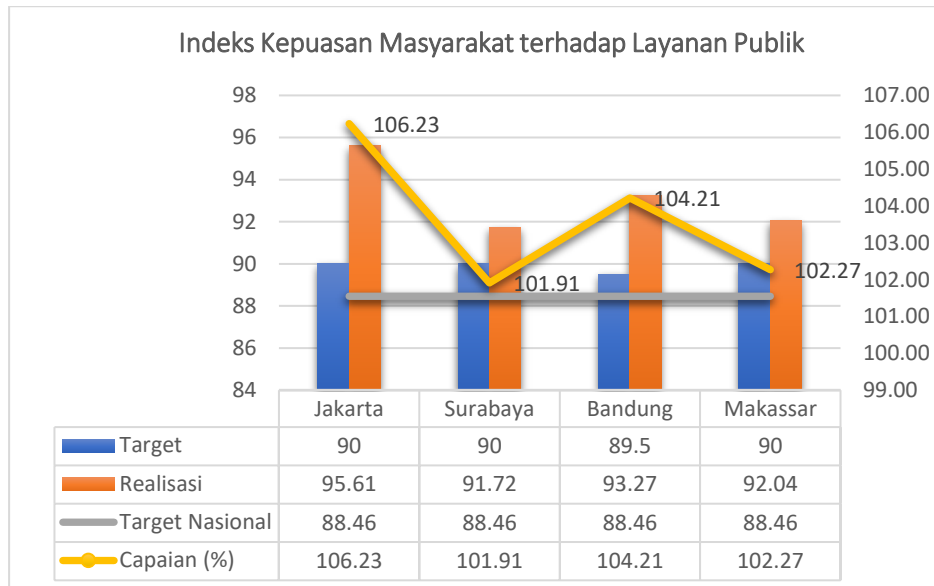
Dari unsur pelayanan di atas, unsur persyaratan memberikan kontribusi kenaikan terbesar dan unsur kompetensi pelaksana memberikan kontribusi paling kecil. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan pada semua unsur pelayanan.

Nilai capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 106,23% meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 99,65%. Target kinerja tahun 2021 juga meningkat dari tahun 2020 yaitu dari 88,5 menjadi 90. Oleh karena itu, dapat dilihat dari data tersebut bahwa kinerja indikator kepuasan indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat tahun 2020-2021.

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 93, realisasi tahun 2021 menghasilkan capaian sebesar 102.81 dengan kategori Baik. Oleh karena itu, BBPOM di Jakarta optimis dapat melampaui target akhir renstra 2020-2024 dengan terus meningkatkan kinerja layanan public selaras dengan komitmen BBPOM di Jakarta yang konsisten memberikan layanan prima dan komitmen

untuk mencapai zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 18 Perbandingan indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan dengan realisasi indeks oleh Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Makassar. Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2021 secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Jakarta sebesar 95,61 (Sangat Baik), BBPOM di Bandung sebesar 93,27 (Sangat Baik), BBPOM di Makassar sebesar 92,04 (Sangat Baik), dan BBPOM di Surabaya sebesar 91,72 (Sangat Baik). Capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta,

Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Makassar, dan Balai Besar POM di Surabaya masuk ke dalam kategori Baik secara berturut-turut sebesar 106,23%; 104,21%; 102,27%; dan 101,91%. Capaian ini dapat dibandingkan antar keempat balai karena memiliki *baseline* target yang sama yaitu 90 dan 89.5 untuk BBPOM di Bandung. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 88.46, maka realisasi indeks keempat balai sudah melampaui.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 95,61 dengan kategori A (Sangat Baik). Beberapa faktor penyebab keberhasilan dari pencapaian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sosialisasi ke masyarakat terkait informasi layanan informasi dan pengaduan di BBPOM di Jakarta baik secara *online* maupun tatap muka. Pelayanan secara *online* terutama melalui *Whatsapp* dan media sosial (*Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*) meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dengan peningkatan jumlah layanan informasi dan pengaduan melalui media *Whatsapp*. Pelayanan yang cepat dan informasi yang benar juga membantu pelaku usaha untuk mengerti alur pengurusan nomor izin edar.



Gambar 17 Peningkatan jumlah layanan informasi tahun 2020-2021

- 2) Optimalisasi implementasi rencana tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2020 terhadap seluruh layanan sesuai dengan saran/masukan yang dipergunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana BBPOM di Jakarta sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan yang mudah diakses dan transparan. Salah satu bentuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik BBPOM di Jakarta yaitu telah tersedianya loket yang terpisah untuk masing-masing jenis layanan dan ruangan tertutup khusus untuk pengaduan di *front office* sehingga mudah diakses. Hal ini juga merupakan salah satu perbaikan yang dilakukan berdasarkan masukan hasil SKM tahun 2020 terkait pelayanan dan kenyamanan tempat yang semakin ditingkatkan serta jarak antara ruang layanan sehingga tidak mengganggu proses pelayanan yang berbeda.



Gambar 18 Loker layanan publik BBPOM di Jakarta



Gambar 19 Ruang tertutup untuk pengaduan

- 4) Peningkatan layanan pengujian yang dapat disampaikan secara *online* melalui *Whatsapp* atau e-mail kepada petugas penerima sampel.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 antara lain:

- 1) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mandiri yang pelaporannya dilakukan setiap bulan serta monitoring dan evaluasi terhadap SKM mandiri yang dilakukan per triwulan sebagai bentuk pemantauan dan perbaikan yang bersifat terus-menerus sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelaksanaan inovasi pelayanan publik Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan sertifikasi dan layanan informasi obat dan makanan yang lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat adanya masukan dari hasil SKM periode sebelumnya bahwa lokasi kantor BBPOM di Jakarta sulit untuk dijangkau.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil SKM tahun 2020 yaitu peningkatan pelayanan dan kenyamanan ruang pelayanan, telah dilakukan berbagai upaya tindak lanjut meliputi peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik yang memenuhi standar unit pelayanan publik yang mudah diakses dan transparan serta penambahan alternatif masyarakat dalam mengakses layanan yang ada di BBPOM di Jakarta baik secara tatap muka dengan implementasi inovasi pelayanan publik

Kerling Jakarta dan Sultan Betawi maupun secara *online* untuk layanan informasi dan pengaduan serta layanan pengujian melalui *Whatsapp*.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai rekomendasi perbaikan hasil SKM periode selanjutnya terkait persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur serta produk spesifikasi jenis pelayanan antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi petugas layanan, khususnya terkait teknik komunikasi yang baik sehingga aliran informasi dapat lebih persuasif.
- 2) Menyediakan sarana komunikasi yang memadai untuk memudahkan petugas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan kaji ulang terkait dokumen standar pelayanan publik secara internal dan melakukan dengar pendapat dengan pihak *stakeholder* untuk mendapatkan saran perbaikan.
- 4) Sosialisasi prosedur/alur pelayanan secara lebih luas kepada masyarakat menggunakan media sosial serta kanal informasi lain.
- 5) Melakukan kaji ulang terkait *timeline* yang ditetapkan secara internal.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian standar pelayanan dengan realisasi pelaksanaan pelayanan.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam

pencapaian target indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	90	95,61	106,23%	1.111.991.500	1.105.313.395	99,40%	1,07	0,07	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.07 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan sarana prasarana dalam pelaksanaan layanan publik baik secara *offline* dan *online* serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan layanan publik dalam rangka pencapaian *output* indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jakarta yang meningkat.

Dari pencapaian 3 target indikator pada sasaran strategis 3, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2 + NPI 3}{3}$$

3

$$NPS = \frac{100.12 + 98.43 + 106.23}{3}$$

$$NPS = 101.59$$

Dengan NPS 101.59, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 13. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	92,19	103,58	BAIK

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan

ketidaksiesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

Pelaku usaha;

Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

(1) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

(2) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

(3) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

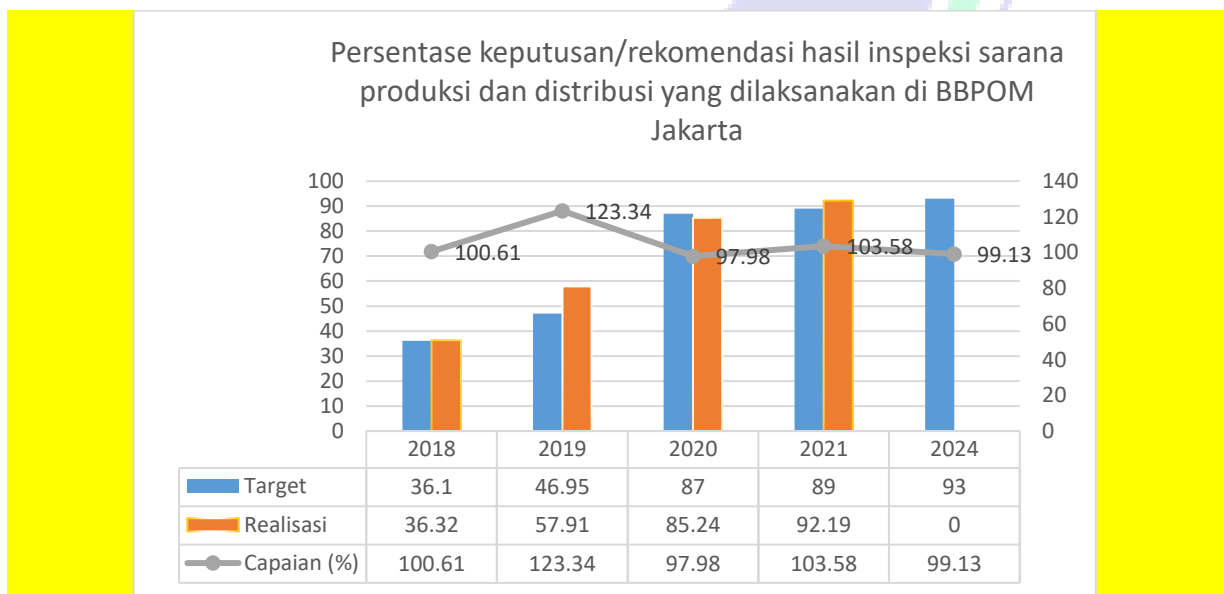
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

(4) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2021 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 103,58% dengan **kriteria BAIK.**

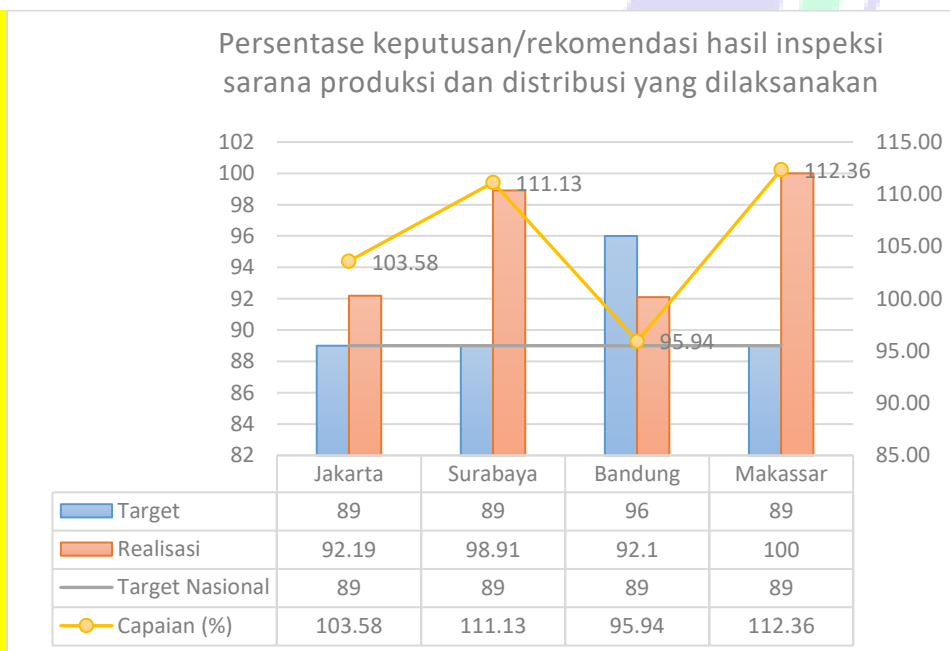
b. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan tahun 2018-2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 20. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2021 dengan tahun 2018-2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Persentase capaian tahun 2020 sebesar 97,98 % dengan kriteria “Baik”, sedangkan persentase capaian tahun 2021 sebesar 103,58 % juga dengan kriteria “Baik”. Capaian sampai tahun 2021 **lebih tinggi** dibandingkan tahun 2020 sehubungan dengan meningkatnya realisasi dari target yang ditetapkan sehingga dapat disimpulkan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun tidak significant, dan capaian ini melebihi nilai target akhir Renstra RPJMN 2020-2024 sebesar 99,13 %.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara dan target nasional



Gambar 21. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah mencapai melebihi target nasional sama dengan Balai Besar POM di Bandung (dengan kategori Baik), dan juga Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar POM di Makassar (keduanya kategori Sangat Baik).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja sudah melebihi target yang tersebut dipengaruhi oleh.

Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan.

- Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan.
- Pusat semakin responsif terhadap rekomendasi dari BBPOM di Jakarta sehubungan dengan koordinasi lebih intensif dengan unit pusat tentang tindak lanjut dari rekomendasi Balai maupun Laporan dari Balai

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem (Spreadsheet) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada system ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta.
- Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan spreadsheet Diskoria yang dikelola oleh Bagian Tata Usaha BBPOM di Jakarta.
- Adanya kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam spreadsheet Roti Buaia (Rekapitulasi Respon terhadap Tindak Lanjut Balai Besar POM di Jakarta).
- Adanya monitoring khusus untuk rekapitulasi respon dari pusat.
- Untuk komponen “rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain” masih rendah (62.5 %) hal ini sehubungan dengan tindak lanjut oleh pusat sering disampaikan ke UPT jauh dari tanggal penyampaian rekomendasi tersebut bahkan hingga melampaui tahun berjalan sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan di tahun berjalan. Perlu perkuatan dalam koordinasi dari UPT ke pusat dan kontrol dalam surat rekomendasi yang disampaikan ke pusat untuk tindak lanjut segera dari pusat. Diperlukan juga control secara terpadu antara UPT dengan unit pusat sehingga Tindaklanjuti dari hasil

rekomendasi dari UPT dapat ditindaklanjuti oleh pusat sesuai timeline yang telah ditetapkan

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi internal Triwulan IV pada tahun 2021 disimpulkan bahwa evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya (2020) sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif sehingga pada akhir tahun 2021 nilai Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sebesar 103,58 % sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari 4 (empat) komponen penyusun rekomendasi yang dilaksanakan / ditindaklanjuti sbb :

No.	Keputusan/Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi (%)	Rata-Rata Realisasi (%)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	477	477	100	92.2
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	82	82	100	
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	128	80	62.5	
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang	48	51	106.3	

No.	Keputusan/Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi (%)	Rata-Rata Realisasi (%)
	ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT				

Rekomendasi dari tahun sebelumnya adalah dengan membuat sistem control surat masuk dan tindaklanjut yang dilakukan Balai besar POM di Jakarta. Sistem yang diciptakan Roti Buaiya yang efektif mendukung pencapaian target ini.

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja adalah :

1. Untuk komponen “rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain” masih rendah (62.5 %) Perlu perkuatan dalam koordinasi dari UPT ke pusat dan kontrol dalam surat rekomendasi yang disampaikan ke pusat untuk tindak lanjut segera dari pusat. Diperlukan juga control secara terpadu antara UPT dengan unit pusat sehingga Tindaklanjut dari hasil rekomendasi dari UPT dapat ditindaklanjuti oleh pusat sesuai timeline yang telah ditetapkan
2. Memperkuat inovasi Roti Buiya dan Si DOEL dengan membuat sistem peringatan dan batas waktu secara otomatis sehingga ada warning untuk timelines

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	92,19	103,58%	142.442.750	142.358.851	100%	1,04	0,04	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.04 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 14. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN 2021 (%)	KRITERIA
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	78,02	104,03	BAIK

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha;
- 2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana

produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

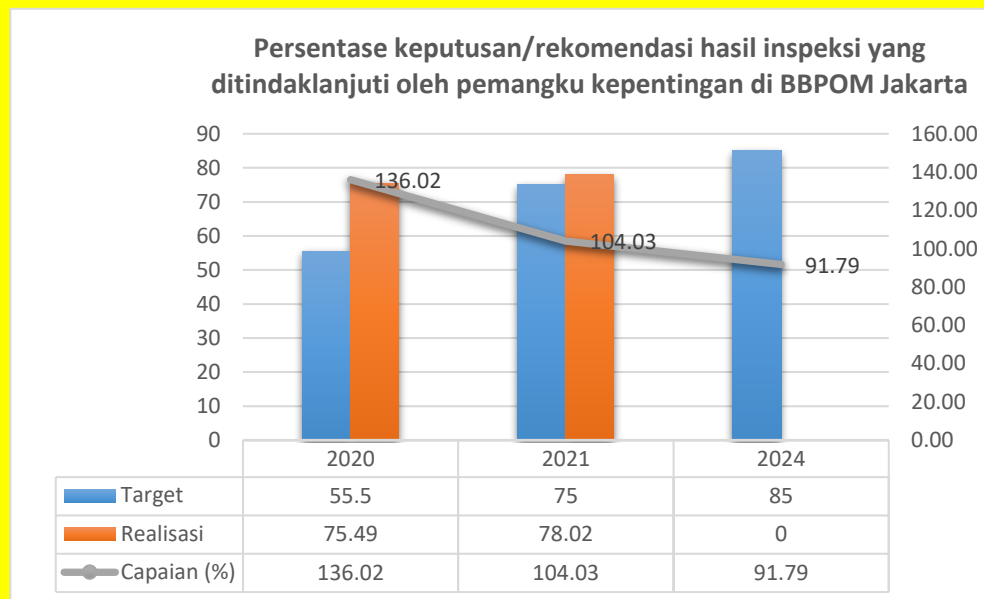
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepalalintas sektor}} \times 100\%$$

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,02% telah mencapai target yang ditetapkan yaitu lebih dari 75%. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 104,03 % dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

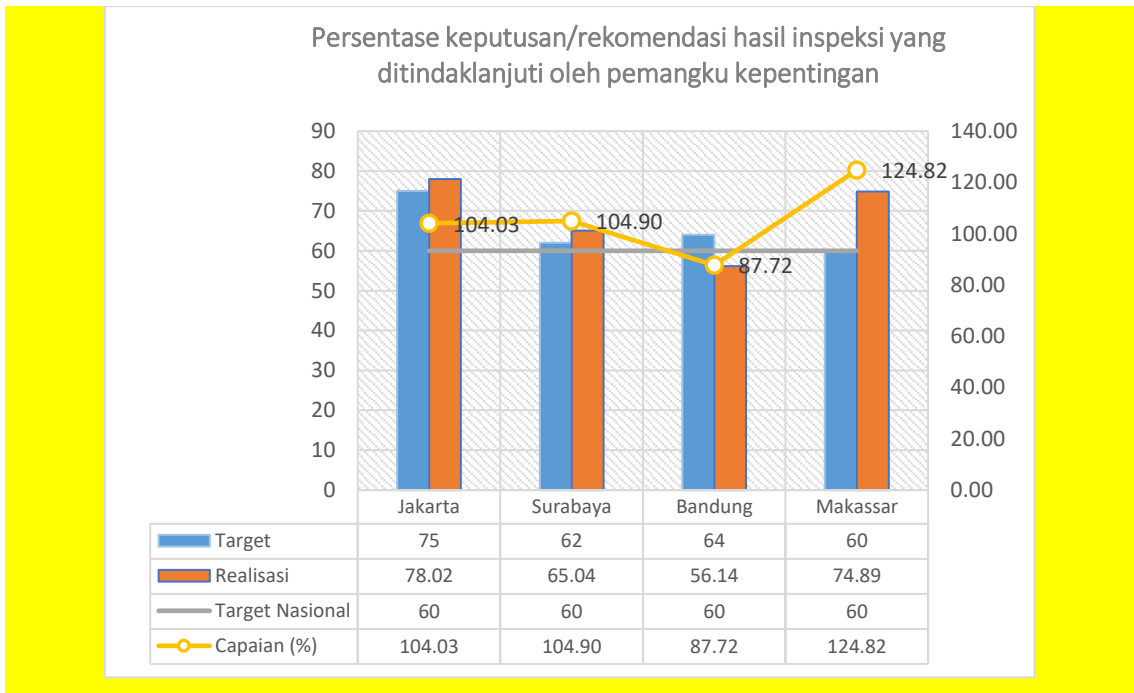


Gambar 22. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024.

Persentase capaian tahun 2021 sebesar 104,03 % (realisasi 78,02 % dari target 75 %) dengan kriteria “Baik”, sedangkan persentase capaian tahun 2020 sebesar 136,02 % juga dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Capaian tahun 2021 **lebih rendah** dibandingkan tahun 2020 tetapi penurunan tidak signifikan dan tidak dapat disimpulkan sehubungan perbedaan target. Dan capaian ini sudah mencapai melebihi nilai target akhir Renstra RPJMN 2020-2024 sebesar 91,79 %.

c. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 23. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional Tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah mencapai target nasional sama dengan Balai Besar POM di Surabaya (dengan kriteria Baik), Balai Besar POM di Bandung (kriteria Cukup) dan Balai Besar POM di Makassar (kriteria Tidak Dapat Disimpulkan). Semuanya telah mencapai melebihi target nasional (60 %)

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Semakin banyak jumlah respon dari pelaku usaha terhadap surat tindak lanjut yang dikirim BBPOM di Jakarta maka akan semakin tinggi capaian indikator kinerjanya.
- Semakin banyak tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor maka akan semakin tinggi juga capaian indikator kinerjanya. Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait, melalui aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta juga dengan BPOM pusat, sudah berjalan dengan baik sehingga semakin meningkatnya pembinaan yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan terhadap sarana PIRT yang melanggar.
- Adanya kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam spreadsheet Roti Buaia (Rekapitulasi Respon terhadap Tindak Lanjut Balai Besar POM di Jakarta).

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Semakin dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan retail kecil di pasar tradisional maupun pinggiran wilayah DKI Jakarta.
- Mengirimkan surat tembusan tindak lanjut hasil pemeriksaan (hardcopy dan lewat email) kepada Suku

Dinas Kesehatan dan lintas sector terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana.

- Kegiatan pendampingan secara komprehensif terhadap tindaklanjut yang dilakukan lintas sektor terkait dengan Kegiatan Pertemuan dan rapat evaluasi serta pendampingan smart BPOM
- Kegiatan pendampingan pemenuhan toold pengawasan PIRT yang dilakukan secara bertahap

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi internal Triwulan IV pada tahun 2021 disimpulkan bahwa evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya (2020) sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif sehingga pada akhir tahun 2021 nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sebesar 104,03 % sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari 2 (dua) komponen penyusun rekomendasi yang dilaksanakan / ditindaklanjuti sbb :

No.	Keputusan/Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi (%)	Rata-Rata Realisasi (%)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	477	276	57.86	78

2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	54	98.18	
---	---	----	----	-------	--

Untuk komponen “keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha” masih rendah (57.86 %) namun angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan adanya kemudahan akses dalam penyampaian CAPA dan kemudahan pelaku usaha berkomunikasi dengan inspektur dalam penyelesaian CAPA terkait temuan hasil inspeksi. Selanjutnya akan semakin didorong kembali kesadaran dari pelaku usaha untuk menyelesaikan CAPA dan menyampaikan buktinya kepada inspektur sehingga diharapkan semua rekomendasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sepenuhnya / 100 %.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan :

- Memperkuat evaluasi pada sistem si DOEL dengan membuat pemberitahuan otomatis kepada pelaku usaha jika belum menindaklanjuti hasil pengawasan Balai Besar POM di Jakarta
- Optimalisasi pemenuhan tool pemenuhan pengawasan oleh Lintas Sektor terkait
- Monitoring dan Evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan lebih optimal dengan pemanfaatan inovasi dan pengembangan inovasi yang telah ada

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	78,02	104,03%	142.442.750	142.358.851	99,94%	1,04	0,04	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.04 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel
15.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN 2021(%)	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	97,23	114,39	Sangat Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- (1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- (2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- (5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
- (6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT SK
- (7) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 97,23% dari target yang ditetapkan 85 %, jika dihitung terhadap target capaian sampai tahun 2021 sebesar 114,39% dengan kriteria “sangat baik”. Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan sampai dengan triwulan empat 2021 sebanyak 619 (enam ratus Sembilan belas). Keputusan yang tepat waktu sebanyak 609 (enam ratus Sembilan) yang memenuhi *timeline* yang telah ditetapkan dan sebanyak 10 (sepuluh) keputusan sertifikasi tidak tepat waktu. Sebanyak 619 (enam ratus Sembilan belas) keputusan merupakan kumulatif dari penyelesaian permohonan tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari 107 (seratus tujuh) keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2020 dan 512 (lima ratus dua belas) keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2021

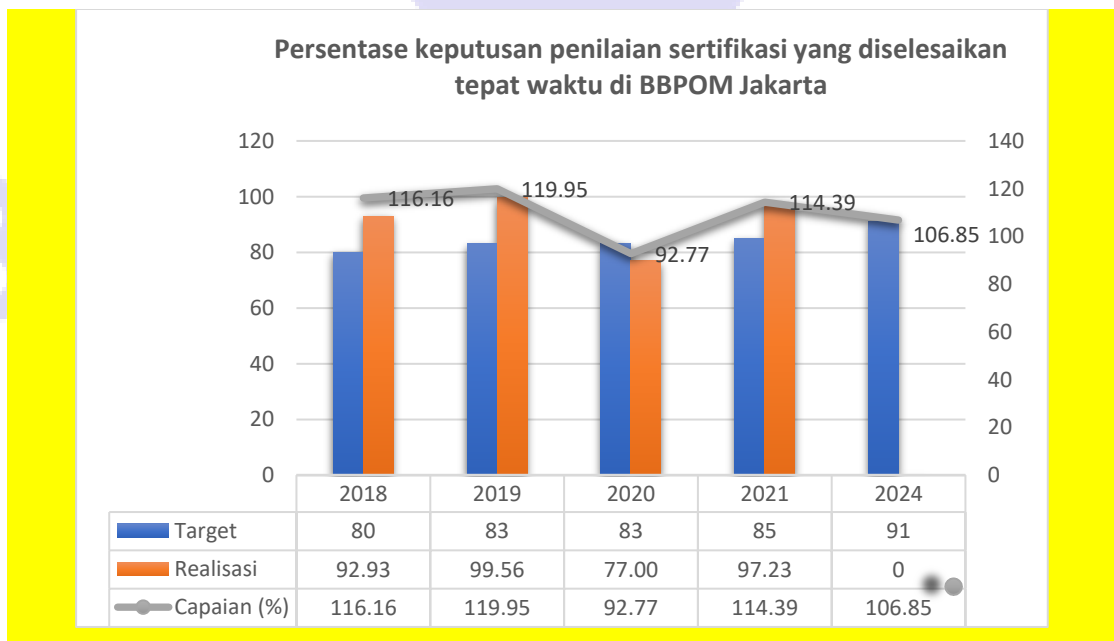
Terdapat perbedaan definisi operasional pada keputusan Sertifikasi tahun 2021, yaitu, keputusan sertifikasi tahun 2020 adalah jumlah rekomendasi yang diterbitkan terhadap permohonan yang diterima tahun 2020, sedangkan

keputusan sertifikasi tahun 2021 adalah jumlah permintaan tindakan perbaikan yang diterbitkan untuk permohonan yang diterima tahun 2021.

Pada tahun 2021 terdapat 521 (lima ratus dua puluh satu) permohonan yang diterima di Balai Besar POM di Jakarta dan telah diterbitkan keputusan sebanyak 512 (lima ratus dua belas). Permohonan yang belum terbit keputusan disebabkan karena dilakukan berkas permohonan diterima di akhir bulan Desember 2021 dan direncanakan untuk dilakukan audit pada awal bulan Januari 2022,

Adapun jumlah permohonan pengujian sampel sampai triwulan keempat 2021 sebanyak 54 (lima puluh empat) dan semuanya dapat diselesaikan tepat waktu

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2018-2020 dan target akhir periode renstra 2020-2024



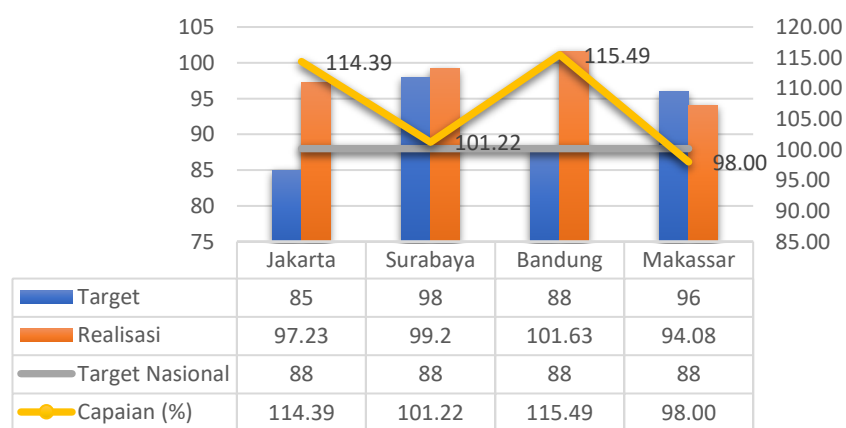
Gambar 24. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2021

Berdasarkan tabel di atas realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam hal penilaian sertifikasi di Balai Besar POM di Jakarta.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta dan balai lain yang setara melebihi target nasional, Balai Besar POM di Pontianak memiliki **realisasi tertinggi** dibandingkan 3 balai lainnya yang setara.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



Gambar 24. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain

Berdasarkan **Gambar 20** diketahui bahwa realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta dan balai lain yang setara melebihi target nasional. Balai Besar POM di Bandung memiliki **realisasi tertinggi** dibandingkan 3 balai lainnya yang setara.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan subsidi tenaga dari subkelompok substansi inspeksi dan dari

kelompok substansi infokom yang memiliki kompetensi audit.

Namun dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta efisiensi SDM yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat melebihi target yang telah ditetapkan

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan di tahun 2021 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

1. Fasilitasi UMKM Pangan secara simultan meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM Pangan Olahan membuat proses yang terjadi pada UMKM lebih cepat. Bukan hanya rekomendasi yang tepat waktu untuk pemeriksaan sarana Balai akan tetapi izin edar produk Pangan MD juga dapat dipercepat diperoleh oleh pelaku usaha.
2. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para

pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. *Desk CAPA* sampai dengan triwulan keempat 2021 diselenggarakan pada 9 Februari 2021, 18 Juni 2021 dan 16 Setember 2021 yang diselenggarakan secara daring dan 16 Desember 2021 diselenggarakan secara luring. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan

3. Tantangan memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan ramah tentunya telah menjadi tuntutan masyarakat kini. Balai Besar POM di Jakarta sangat menyadari hal ini dan perlu didukung oleh kompetensi yang mumpuni dari setiap orang yang bertugas memberikan pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut maka beberapa kali dilakukan pelatihan dan diseminasi oleh peserta pelatihan.
4. Terbitnya *e-book* Sertifikasi Komoditi Distribusi Kosmetik untuk memudahkan pelaku usaha mengakses informasi jika akan mengajukan permohonan rekomendasi baik sebagai importir kosmetik maupun sebagai pemberi kontrak produksi ke Balai Besar POM di Jakarta. E-book ini dapat diakses dan telah dipublikasikan oleh Balai Besar POM di Jakarta.
5. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada 22 Juni 2021 dengan narasumber utama dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang membahas tentang penetapan kategori pangan dengan

peserta pelaku usaha yang difasilitasi oleh BBPOM di Jakarta

6. Kegiatan Bimtek yang diberikan kepada petugas AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) dan petugas call center Dinas DMPTSP yang diselenggarakan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juni 2021
7. Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling (Kerling) yang ditujukan untuk mendekatkan akses layanan kepada pelaku usaha. Kegiatan tersebut dilakukan di 5 (lima) wilayah yang ada di Provinsi DKI Jakarta
8. Kegiatan desk registrasi yang diselenggarakan bersama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 2 Maret 2021, 25 Juni 2021 dan 28 September 2021 dan 11 dan 12 November 2021 untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh nomor izin edar.
9. Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh BBPPOM di Jakarta kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both BBPOM di Jakarta yang berda di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan

10. Pendampingan UMKM Bersama lintas sektor

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang tergabung dalam Jackpreneur. Adapaun kegiatan tersebut adalah Kolaborasi dengan Dinas PPKUKM dalam penyelenggaraan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang tergabung

dalam Jackpreneur dan Bimbingan Teknis Kepada Bunda Bunda Jackpreneur maupun para pelaku usaha yang merupakan binaan Dinas dan Suku Dinas PPKUKM di 6 Wilayah DKI Jakarta.

11. Kegiatan Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Informasi Keliling)

Kegiatan ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan konsultasi baik dalam rangka sertifikasi maupun pemberian informasi ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan di lima wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

1. Sebagian sarana pemahaman terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
2. Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan *awareness* dari pelaku usaha.
3. Kekurangan sumber daya dari petugas Balai POM di Jakarta juga membuat pelayanan kurang optimal karena beban kerja yang berlebih. Hal ini buktikan dengan peningkatan jumlah permohonan di tahun 2021, pada

tahun 2020 jumlah permohonan yang masuk 290 sedangkan pada tahun 2021 jumlah permohonan yang diterima oleh Balai Besar POM di Jakarta adalah 521. Hal ini pulalah yang menyebabkan adanya putusan yang diterbitkan tidak tepat waktu.

4. Fasilitasi UMKM yang masif dilakukan oleh lintas sector terkait yang hanya sampai mengeluarkan IUMK. Hal ini mempengaruhi juga kecepatan dalam melakukan sertifikasi tepat waktu dengan banyaknya pelaku usaha yang ingin mendapatkan ijin edar tetapi kemampuan terbatas.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk peningkatan kinerja berikutnya akan dikembangkan beberapa hal :

- a. Akan terus dilakukan program *desk CAPA* yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumberdaya *desk CAPA* akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran *desk CAPA* adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian *CAPA*
- b. Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan *sharing knowledge* antara petugas di Kelompok substansi Pemeriksaan dan Kelompok substansi Infokom

- c. Melakukan simpifikasi SOP dan dokumen atau formulir yang digunakan pada saat melakukan audit maupun pelaporan dan penerbitan keputusan sertifikasi dan penyesesuaian dengan peraturan terbaru utamanya OSS RBA.
- d. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara *online* dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik
- e. Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM.
- f. Memperkuat layanan prima dalam pendampingan e-sertifikasi untuk produk pangan, kosmetika dan Obat Tradisional

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	97,23	114,39%	120.083.000	120.078.677	100%	1,14	0,14	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.14 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan

anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 16. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	69,02	115,03	SANGAT BAIK

Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit

transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

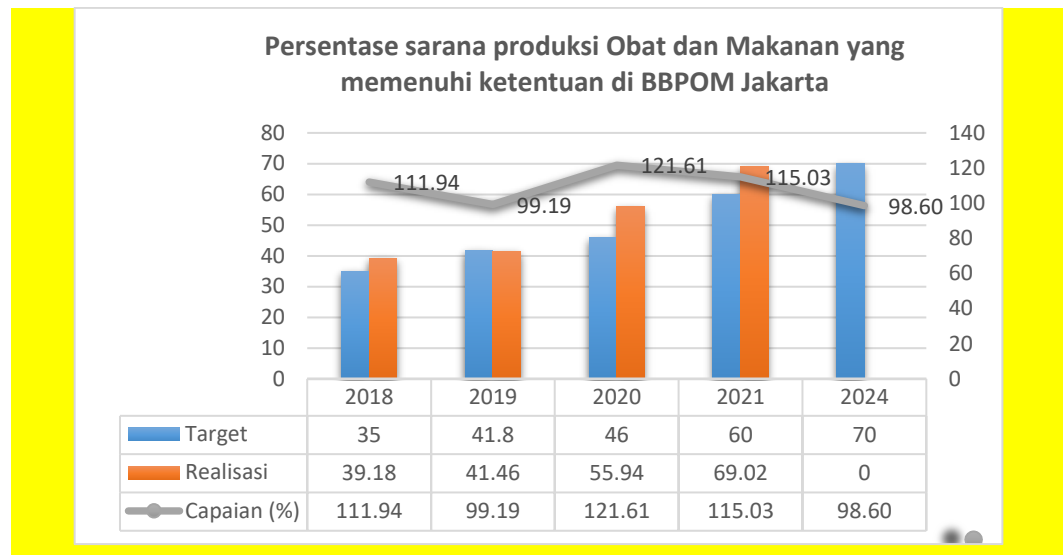
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan.

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu lebih dari 60% dengan kriteria "**sangat baik**". Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa sebanyak 115,03%.

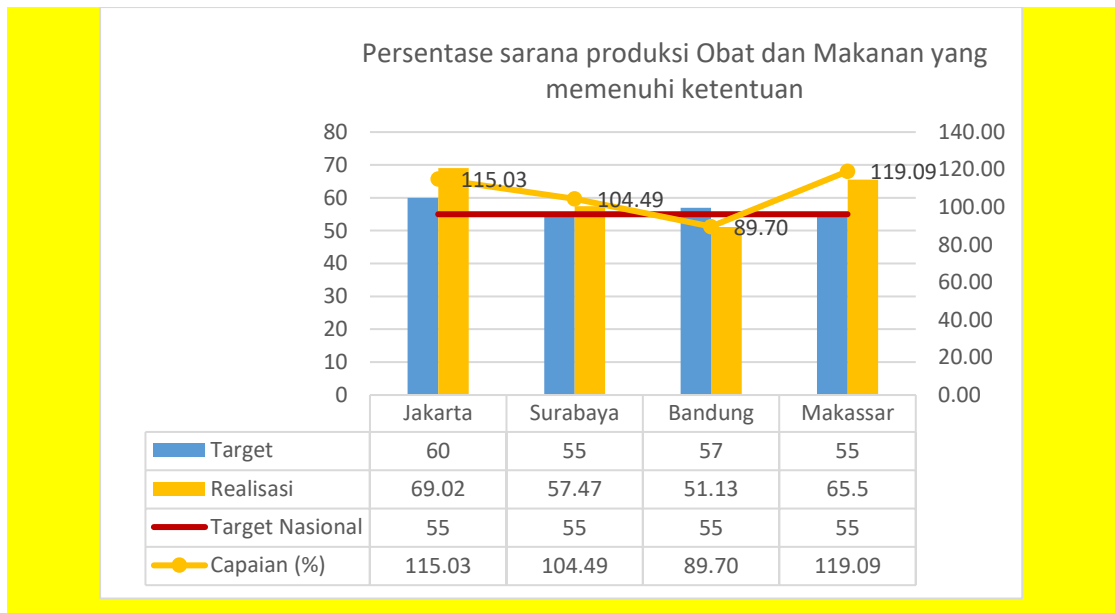
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2018 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 25. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Persentase capaian tahun 2021 **lebih rendah** dibandingkan tahun 2020, tetapi tidak bisa disimpulkan karena tahun 2020 hasilnya kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Pada tahun sebelumnya realisasi persentase sarana memenuhi ketentuan cukup banyak dan juga meningkat pada tahun 2021 karena meningkatnya target yang ditetapkan. Dan capaian ini mencapai melebihi nilai target akhir Renstra RPJMN 2020-2024 sebesar 98,60 %.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 26. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah mencapai target nasional sama dengan Balai Besar POM di Makassar (dengan kriteria Sangat Baik), Balai Besar POM di Bandung (kriteria Cukup) dan Balai Besar POM di Surabaya (kriteria Baik). Semuanya telah mencapai melebihi target nasional (55 %).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 115,03 % **sudah melebihi target** yang ditentukan. Hasil pemeriksaan sarana produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	18	14	4
2.	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	6	4	2
3.	Industri Obat Tradisional (IOT)	8	5	3
4.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
5.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	35	26	9
6.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5	5	0
7.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	3	3	0
8.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	5	3	2
9.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10.	Industri Kosmetik	71	51	20
11.	Industri Pangan	111	85	26
12.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	64	29	35
TOTAL		326	225	101

Walaupun secara umum persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan **sudah melebihi target** yang ditentukan, tetapi terdapat sarana produksi yang tidak mencapai target indicator antara lain PIRT. Kegagalan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Dari uraian capaian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian memenuhi ketentuan yang rendah banyak pada UMKM yaitu Industri Rumah Tangga Pangan.

2. Pemeriksaan sarana produksi UMKM tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu.
3. Rendahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi cara produksi yang baik dan menerapkan cara produksi yang baik pada sarana produksinya
4. Capaian memenuhi ketentuan lain yang masih kurang yaitu pada sarana IOT dan IOT yang memproduksi suplemen kesehatan, hal ini karena sarana tersebut masih belum melakukan aktivitas sesuai standar Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik, karena terdapat pembaruan standar Pedoman CPOTB sehingga masih diperlukan asistensi/pembimbingan/pembinaan untuk penerapan aspek aspek CPOTB tersebut.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara produksi yang baik.
2. Melakukan pertemuan secara intens dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk menegaskan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemberian ijin sarana terutama untuk Industri Rumah Tangga Pangan sehingga yang diberi Ijin adalah yang benar-benar memenuhi kriteria sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan, misalnya untuk produk yang tidak bisa diproduksi oleh Industri rumah tangga pangan seperti olahan daging, *frozen food*, minuman untuk tidak dikeluarkan lagi ijin PIRTnya dan diarahkan untuk mendaftarkan produk ke Badan POM untuk mendapatkan

MD sehingga pengendalian cara produksi yang baik akan meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Belum adanya form pemeriksaan khusus untuk UMKM dan form pemeriksaan sarana produksi pangan sama untuk semua jenis kategori pangan sehingga menyulitkan pemenuhan untuk sarana UMKM. Hal ini dari 2 tahun terakhir sudah diusulkan untuk revisi form 166 pemeriksaan sarana produksi pangan. Telah ada solusi dan inovasi dari Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang untuk membuat form 62 untuk UMKM akan tetapi form ini belum dapat diimplementasikan karena belum final dan belum disahkan.

Kemampuan Sumberdaya dalam jumlah dan kualitas pembinaan oleh Lintas Sektor terkait masih terbatas dan bervariasi dari setiap wilayah

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi (CPOB), industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional/IOT (CPOTB), industri kosmetik (CPKB), industri pangan (CPPOB), dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
- *Desk CAPA* (*corrective action preventive action*) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di tahun 2021, capaian melebihi dari target yang ditetapkan dengan kriteria "Sangat Baik". Sehingga dengan hasil ini memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja di Balai Besar POM di Jakarta.

Dari rekomendasi tahun lalu untuk mengusulkan perbaikan form pemeriksaan sarana produksi pangan, telah terlihat ada proses revisi form tersebut dan menunggu disahkan

Untuk perbaikan kinerja akan dilakukan :

1. Bimtek pemenuhan CPKB, CPOTB dan CPPOB
2. Kolaborasi fasilitasi UMK Pangan Olahan wilayah DKI Jakarta agar fasilitasi tidak parsial dan UMK mampu memenuhi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
3. Mengoptimalkan saluran komunikasi berupa Forum Komunikasi dengan pelaku usaha sehingga terinfo peraturan terbaru dan komunikasi aktif tentang pemenuhan cara produksi yang Baik

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	69,02	115,03%	39.864.000	39.809.480	99,86%	1,15	0,15	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.15 dengan capaian tingkat efisiensi

100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran **“Efisien”**. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

14. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 18. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPIAN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	73	79,21	108,51	BAIK

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

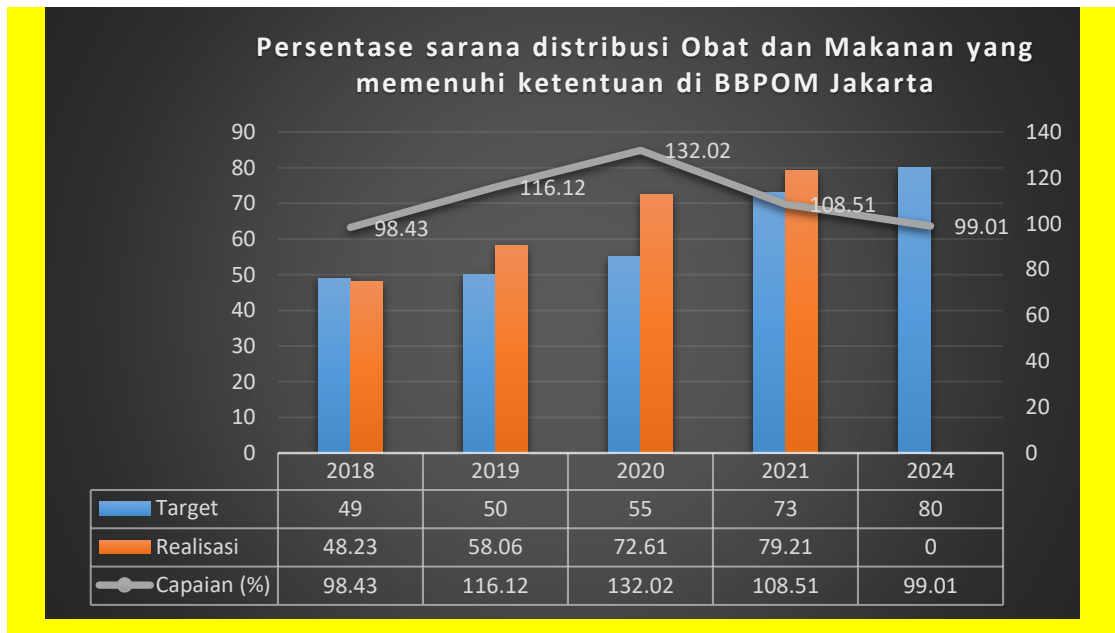
Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- (1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- (2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- (3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 108,51 % dengan kriteria “Baik”.

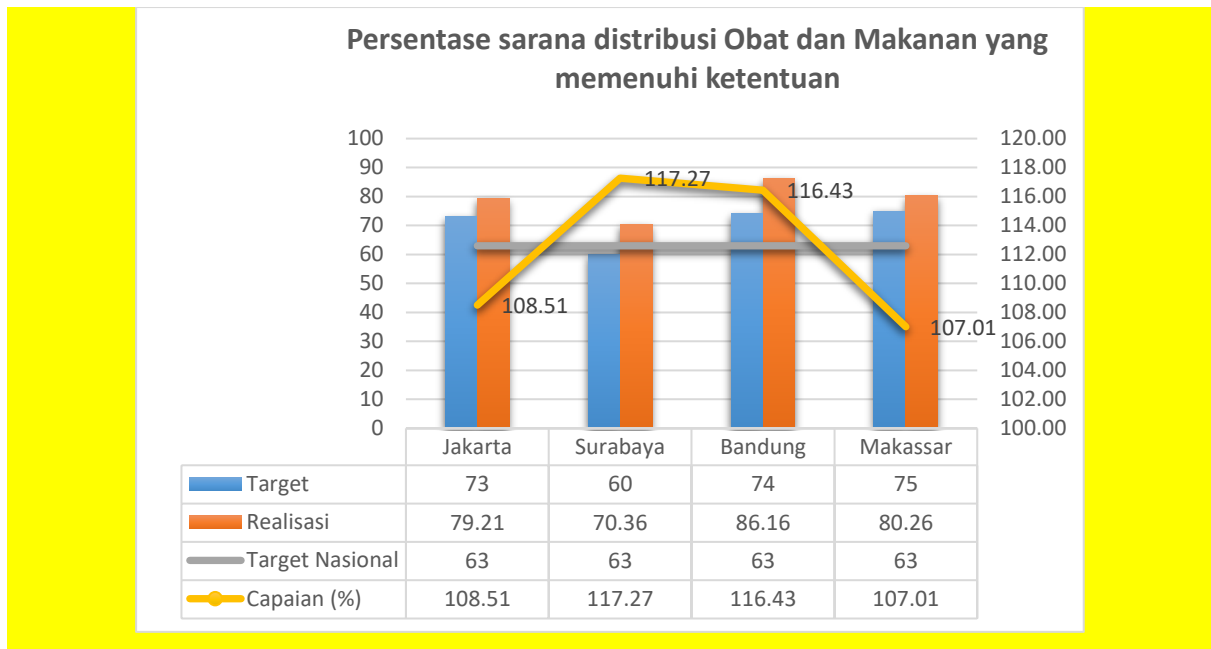
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2018-2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 27. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Penetapan definisi operasional baru sesuai Reviu Renstra 2020-2024 tentang kriteria memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan menyebabkan realisasi tahun 2021 **menurun** dibandingkan tahun 2020 dengan kriteria Sangat Baik, tetapi penurunan ini tidak dapat disimpulkan karena capaian tahun 2020 termasuk kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta telah **berhasil meningkatkan** persentase pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sehingga melebihi target nasional.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional**



Gambar 28. Perbandingan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dibandingkan dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional Tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 telah mencapai target nasional sama dengan Balai Besar POM di Makassar (dengan kriteria Baik), dan juga Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Surabaya (kriteria Sangat Baik). Semuanya telah mencapai melebihi target nasional (63 %).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2021 s/d Triwulan 3 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	113	75	38
2.	Apotek	120	71	49
3.	Toko Obat	37	23	14
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	13	11	2
5.	Rumah Sakit (RS)	59	57	2
6.	Puskemas	280	278	2
7.	Klinik	52	31	21
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	141	110	31
10.	Fasilitas Distribusi Suplemen	31	23	8
11.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	199	173	26
12.	Fasilitas Distribusi Pangan	355	257	98
	TOTAL	1400	1109	291

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.
- Masih pandemi Covid-19 di tahun 2021 sehingga sebagian besar pemeriksaan dilakukan secara online/virtual
- Pemeriksaan untuk saryanfar (Puskesmas, Klinik, RS) sebagian besar adalah pemeriksaan intensifikasi vaksin Covi-19, mengingat masa pandemic ini diperlukan pengawasan khusus terhadap sarana penyimpanan dan pelayanan vaksin Covid-19 untuk menunjang keberhasilan program vaksinasi Covid-19 agar mutu dan khasiatnya terjaga.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan:

- a. Peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi yang ada dan menerapkan sanksi yang lebih tegas seperti jika masih ditemukan apotek yang melakukan penjualan obat Covid-19 (Ivermectin dll) dalam jumlah relative besar tanpa resep dokter diberikan sanksi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)
- b. Pembinaan kepada stake holder misalnya fasilitasi pelatihan terkait distribusi CCP (vaksin) dan pelatihan lain

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Masih ditemukan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang melakukan distribusi dan pengadaan obat antar apotek, misalnya jaringan apotek Kimia Farma.
 - ✓ Kurangnya pengetahuan pelaku usaha seperti toko obat dan sarana distribusi retail terkait peraturan yang berlaku
- Usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya:

1. Memaksimalkan penerapan system online yang ada sehingga kendala Sumber Daya dapat diatasi.
2. Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaikan dan kegiatan pencegahan terhadap pencapaian *output*.
3. Koordinasi lebih intensif dengan stake holder terkait

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain Pelatihan aspek aspek Cara Distribusi Obat yang Baik. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.
- Sistem dalam penetapan target pemeriksaan yang lebih tepat dengan menggempur pendistribusian dari sarana legal ke sarana illegal.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)*

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di tahun 2021, capaian sudah melebihi target yang ditetapkan dan hasil ini memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja di Balai Besar POM di Jakarta.

Untuk rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya dengan meningkatkan kompetensi pelaku usaha telah dilakukan. Dibentuklah Forum Komunikasi antar Pelaku Usaha.

Rekomendasi Perbaikan :

1. Memperkuat peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam mengoptimalkan pelayanan obat pada Apotek, Toko Obat dan Klinik dengan Bimtek pelaku usaha
2. Dengan penerapan Undang-undang Cipta Kerja harus dilakukan perkuatan pengawasan post market dan lebih intensif melakukan pendampingan pelaku usaha dalam label dan penandaan produk obat dan makanan
3. Pendampingan secara terus menerus untuk pengelolaan vaksin pada sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	79,21	108,51 %	188.044.400	187.964.682	99,96 %	1,09	0,09	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.09 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

15. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta	4,20	4,54	108,10	BAIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) *Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);*
- 2) *Profesionalitas SDM (18%);*
- 3) *Sarana Prasarana (15%);*
- 4) *Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);*
- 5) *Konsultasi dan Pengaduan (15%);*
- 6) *Inovasi (7%).*

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

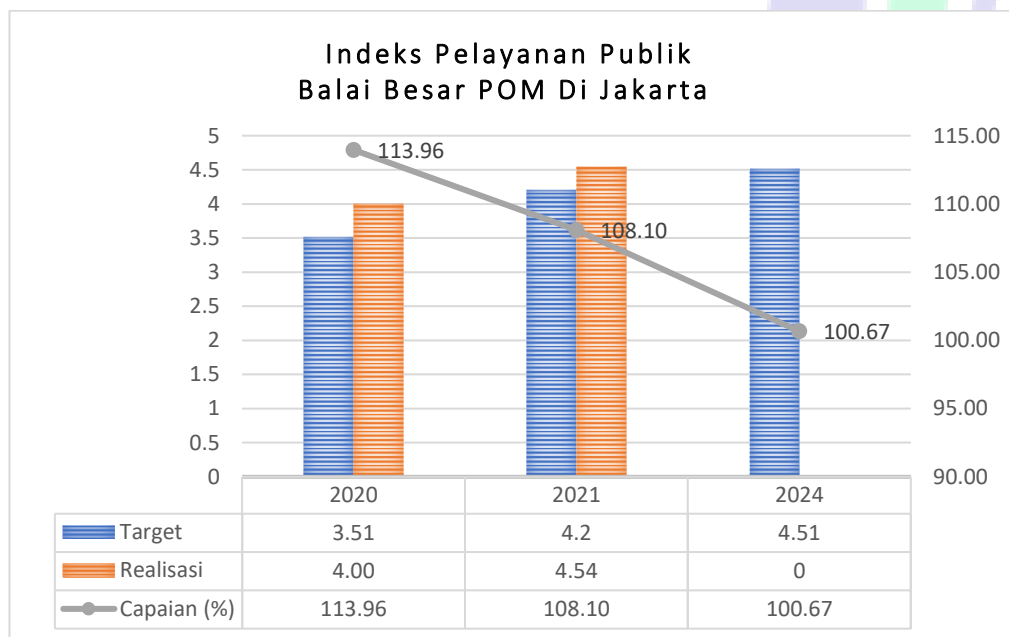
Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 21 Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2021

Berdasarkan hasil penilaian internal kinerja UPP BPOM yang telah dilaksanakan pada periode Mei-Juni 2021, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BBPOM di Jakarta diperoleh sebesar **4,54 (A/ Pelayanan Prima)**. IPP yang diperoleh BBPOM di Jakarta telah melampaui target tahun 2021, yaitu 4,20 **dengan capaian 108,10%**, sehingga diperoleh kinerja dengan kriteria

Baik. Dengan hasil ini, BBPOM di Jakarta telah berhasil mencapai Pelayanan Prima dan menjadi 5 (lima) besar UPP BPOM terbaik tahun 2021 setelah BBPOM di Denpasar, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Biro Hukum dan Organisasi, dan BBPOM di Yogyakarta.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

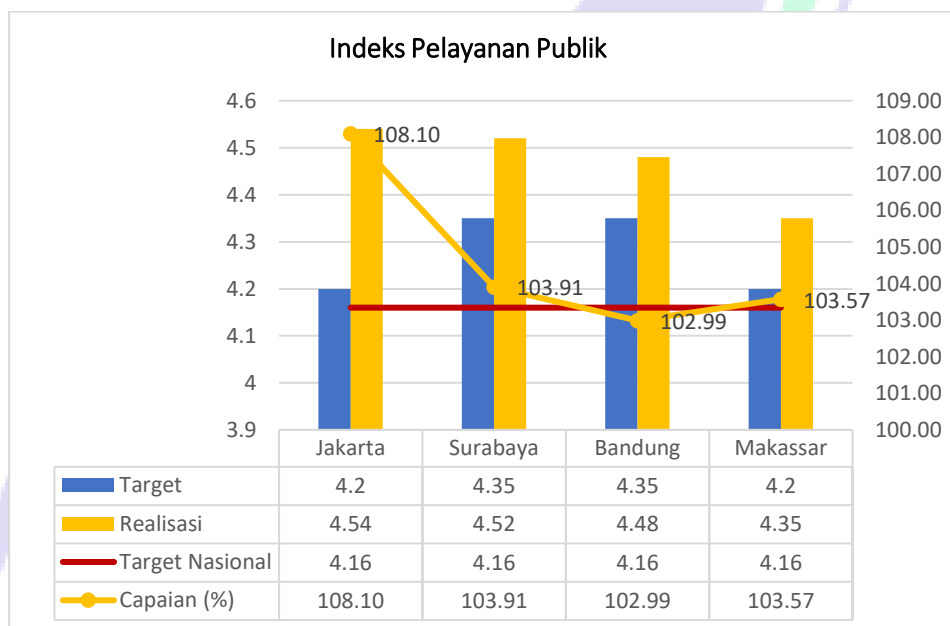


Gambar 32. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dan tahun 2020

Indeks pelayanan publik (IPP) di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 4,54 (Pelayanan Prima) meningkat secara signifikan dari tahun 2020 sebesar 4,00 (Baik). Realisasi IPP tahun 2021 ini telah melampaui target sebesar 4,20 dengan capaian sebesar 108,10% (kategori Baik). Begitu pula capaian tahun 2020 juga telah melampaui

target sebesar 3,51 dengan capaian 113,96% (kategori Sangat Baik). Adapun capaian yang lebih tinggi di tahun 2020 karena *baseline* target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan target tahun 2021. Apabila nilai realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2024 sebesar 4,51, maka diperoleh capaian sebesar 100,67% (kategori Baik). Oleh karena itu, dengan konsistensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik BBPOM di Jakarta secara terus-menerus diharapkan dapat melampaui indeks pelayanan publik di tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 33. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan dengan realisasi indeks oleh Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Makassar. Indeks pelayanan publik tahun 2021 secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Jakarta sebesar 4,54 (Pelayanan Prima), BBPOM di Surabaya sebesar 4,52 (Pelayanan Prima), BBPOM di Bandung sebesar 4,48 (Sangat Baik), dan BBPOM di Makassar sebesar 4,35 (Sangat Baik).

Capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Makassar, dan Balai Besar Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam kategori Baik secara berturut-turut sebesar 108,10%; 103,91%; 103,57%; dan 102,99%. Target indeks BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Makassar sama, yaitu sebesar 4,2 sehingga capaian indeks pelayanan publik BBPOM di Jakarta tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Makassar. Begitu pula target BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung sama, yaitu 4,35 sehingga capaian BBPOM di Surabaya lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Bandung. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 4,16, keempat balai pembanding yang setara di atas sudah melampaui nilai yang ditetapkan. Keberhasilan capaian Indeks Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2021 ini hingga memperoleh Pelayanan

Prima dengan nilai 4,54 dapat disebabkan oleh beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pada aspek kebijakan layanan, SK standar pelayanan telah mencakup 14 komponen sesuai dengan Permenpan RB No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Layanan dan juga sudah mencakup seluruh layanan, meliputi Layanan Pengujian Sampel Obat dan Makanan Pihak Ketiga, Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan Sertifikasi.
- 2) Sudah tersedianya sistem antrian elektronik dibagi untuk setiap jenis layanan, nomor antrian sudah ditampilkan di layar, diarahkan ke loket yang dituju serta dipandu dengan pengeras suara.



Gambar 29 Mesin antrian *online*

- 3) Penyusunan Standar Pelayanan sudah melibatkan *stakeholders* (lurah, akademisi, dan pelaku usaha) serta telah memanfaatkan hasil masukan survei kepuasan masyarakat (SKM) dalam proses penyusunannya.
- 4) Standar pelayanan sudah dipublikasikan di area ruang pelayanan (berupa *leaflet/brosur/poster/banner*, buku

saku/katalog), baliho di ruang terbuka layanan publik, media cetak koran, *subsiste* serta media sosial.



Gambar 30 Standar pelayanan publik di area terbuka ruang perpustakaan daerah



Gambar 31 Standar pelayanan publik pada media cetak

- 5) Maklumat pelayanan telah dipublikasikan dalam bentuk poster, *banner*, buku saku/katalog, media cetak koran, *subsiste*, media sosial dan di ruang terbuka publik.
- 6) Pengisian SKM oleh seluruh pengguna layanan baik secara langsung dan/ atau *online* baik yang permohonannya disetujui maupun ditolak.

- 7) Informasi hasil SKM telah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai tempat dan media informasi (media sosial, *subsite*, baliho/banner, leaflet, buku saku/katalog, media cetak koran).
- 8) Telah dilakukan SKM secara mandiri, hasil SKM dan bentuk saran serta rekomendasi telah ditindaklanjuti dan digunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan.
- 9) Telah dibuat SK tim layanan publik yang dikelompokkan berdasarkan jenis layanan dan profilnya dapat diakses di *subsite*.
- 10) Adanya jam kerja layanan harian dari 08.00-16.00 tanpa jeda waktu istirahat dengan sistem istirahat bergilir tanpa menghentikan pelayanan publik saat istirahat serta adanya layanan konsultasi *extra time* pada hari libur/malam hari melalui media sosial (Instagram dan Twitter).
- 11) Pelaksana layanan sudah dilengkapi dengan pakaian seragam khusus, identitas nama, PIN/atribut/logo unit pelayanan dan mempraktikkan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi).
- 12) Tersedianya sarana prasarana khusus untuk kelompok rentan/penyandang difabel, berupa area parkir khusus, kursi roda, loket khusus, toilet khusus dan petugas layanan khusus).



Gambar 32 Locket pelayanan khusus untuk penyandang difabel

- 13) Adanya fasilitas toilet yang mencakup toilet terpisah antara pria dan wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun jongkok dilengkapi wastafel dan toiletries.
- 14) Telah tersedianya ruang layanan khusus yang tertutup untuk pengaduan masyarakat yang terpisah dari loket pelayanan lainnya di bagian depan kantor sehingga mudah diakses.
- 15) Informasi pengelolaan dan pengaduan, buku Q&A konsultasi dan *e-book* sertifikasi sudah tersedia di *subsite* dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.
- 16) Telah tersedia informasi non elektronik yang mendukung pelayanan yang diketahui seluruh lapisan masyarakat berupa *leaflet*, *banner* yang dipublikasikan di ruang publik dan didistribusikan ke *stakeholder* berupa perpustakaan daerah, kantor pemerintah lainnya, seperti kantor kelurahan, kantor walikota, kantor suku dinas kesehatan.
- 17) Adanya inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun dan dapat direplikasi, yaitu Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kegiatan

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 hingga mencapai Pelayanan Prima, antara lain:

- 1) Penambahan jenis layanan berupa Layanan Sertifikasi ke dalam Standar Pelayanan BBPOM di Jakarta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan dan SKM mandiri yang dilakukan secara rutin tiap Triwulan dan bulanan sebagai acuan dalam perbaikan standar pelayanan secara terus-menerus.
- 3) Intensifikasi pemanfaatan *subsiste* dan media sosial sebagai sarana publikasi dan layanan yang tidak terbatas waktu dan tempat.
- 4) Peningkatan kualitas sarana prasarana berupa renovasi ruang layanan, pembangunan toilet yang memadai, pengadaan mesin antrian elektronik serta fasilitas kantin dan ATK untuk pengguna layanan.
- 5) Peningkatan inovasi pelayanan publik agar dapat diterapkan secara optimal untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menerima layanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta, seperti LAILA (layanan informasi dan pengaduan melalui aplikasi Whatsapp), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi Online), Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), e-book sertifikasi, Kerling Jakarta (Kegiatan

Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling BBPOM Jakarta) dan layanan permohonan pengujian yang sudah dapat dilakukan secara *online* melalui *Whatsapp* maupun *e-mail*.

6) Pelatihan Penerapan Budaya Prima kepada seluruh pegawai yang dilakukan dengan metode *hybrid* (kombinasi luring dan daring) dengan tema “*Customer Service Excellent Mindset and Implementation*” pada 9 April 2021.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks pelayanan publik tahun 2021 ini berhasil meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan telah tercatat sebagai keberhasilan BBPOM di Jakarta meraih pelayanan prima. Adapun evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode tahun 2020, meliputi:

1) Aspek Kebijakan Pelayanan

Rekomendasi yang terkait meliputi monev terhadap Standar Pelayanan, pemanfaatan masukan hasil monev pengaduan masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik dan pemasangan Standar Pelayanan Publik yang dapat dibaca dengan mudah di ruang pelayanan berupa leaflet/banner, media cetak dan *website*.

Tindak lanjut dari rekomendasi ini sudah dilaksanakan seluruhnya, yaitu sudah dilakukannya monev Standar Pelayanan dengan memanfaatkan masukan saran dari hasil SKM, standar dan maklumat pelayanan pun sudah dipublikasikan berupa

leaflet/brosur/poster/banner, buku saku/katalog, baliho, media cetak koran, subsite, dan media sosial serta telah dipublikasikan di ruang pelayanan publik dan area terbuka.

2) Aspek Profesionalisme SDM

Rekomendasi yang terkait aspek ini meliputi implementasi penggunaan atribut berupa PIN/logo Unit Pelayanan serta profil pelaksana yang dipublikasi di ruang pelayanan dan data dukung penerapan kode etik pelayanan dan penerapan sanksi yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan meliputi sudah dilengkapinya pelaksana layanan dengan pakaian seragam khusus, identitas nama, PIN/atribut/logo unit pelayanan dan mempraktikkan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi), profil pelaksana layanan juga sudah dipublikasi di ruang pelayanan dan subsite.

3) Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

Rekomendasi berupa subsite UPP BPOM dilengkapi dengan unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga serta data sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik berupa sistem data informasi pelayanan yang mengacu subsite, aplikasi proses bisnis mengacu qms.pom.go.id, sistem pengelolaan pengaduan mengacu Simpel LPK, SKM mengacu Simolekdesi, dan SDM mengacu SIASN.

Tindak lanjut yang telah dilakukan meliputi pemutakhiran data sistem informasi pelayanan publik di subsite yaitu informasi terkait standar pelayanan, maklumat pelayanan, profil pelaksana layanan, pengelolaan dan pengaduan, buku Q&A konsultasi dan e-book sertifikasi sudah tersedia di subsite dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.

4) Aspek Konsultasi dan Pengaduan

Rekomendasi berupa penambahan data dukung dokumen/arsip untuk tamu yang datang langsung serta rekapitulasi hasil pengaduan sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Tindak lanjut yang telah dilakukan berupa telah tersedianya buku katalog di ruang pelayanan yang berisi standar pelayanan, maklumat pelayanan, hasil SKM, data pengaduan sehingga mudah untuk diakses tamu yang datang langsung.

5) Aspek Inovasi

Rekomendasi berupa implementasi inovasi secara terus-menerus dan monev berkelanjutan untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat dan selanjutnya dapat direplikasi serta diikutsertakan dalam Kompetisi Pelayanan Publik dan/ atau penghargaan lainnya.

Tindak lanjut yang telah dilakukan ialah implementasi inovasi Laron Baja (Verifikasi Lartas Online Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru) sebagai inovasi yang telah diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat selama lebih dari 1 (satu) tahun secara berkelanjutan dan

sedang dalam proses untuk direplikasi oleh unit BPOM lainnya.

Selain itu, terdapat pula rekomendasi baru untuk peningkatan kinerja periode berikutnya, meliputi:

- 1) Perlu dibuat laporan implementasi penilaian pemberian *reward* dan *punishment* tiap bulannya.
- 2) Perlunya surat edaran mengenai seragam Senin sampai dengan Jumat bagi pegawai dan petugas pelayanan publik BBPOM di Jakarta.
- 3) Optimalisasi layanan publik di mall pelayanan Publik dan Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan penambahan trip kegiatan Kerling bekerjasama dengan Lintas Sektor terkait sehingga semakin mendekatkan pelayanan publik kepada pelaku usaha dan masyarakat
- 4) Memperluas akses layanan publik dengan pemanfaatan tenaga AJIB (Anatar Jemput Ijin Bermotor) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang ada 267 kelurahan wilayah Dki Jakarta

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks pelayanan publik di lingkup Balai	4,2	4,54	108,10%	160.801.300	160.582.023	99,86%	1,08	0,08	100%

Besar POM di Jakarta									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.08 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sistem informasi dalam pelaksanaan layanan publik dalam rangka pencapaian *output* indeks pelayanan publik BBPOM di Jakarta yang meningkat.

Dari pencapaian 6 target indikator pada sasaran strategis 4, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI\ 5 + NPI\ 6}{6}$$

6

$$NPS = \frac{103.58\% + 104.03\% + 114.39\% + 115.03\% + 108.51\% + 108.1}{6}$$

6

$$NPS = 108.94\%$$

Dengan NPS 108.94%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

16. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 22 Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	REALISASI	CAPAIAN TAHUN	KRITERIA
	2021		20201(%)	
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	93	93,83	100,89	Baik

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan

3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online* survei. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01-75,00	Cukup Eektif
75,01-85,00	Efektif
85,01-95,00	Sangat Efektif
95,01-100	Sangat Efektif Sekali

Adapun untuk target kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta mengalami revisi berdasarkan Surat Sekretaris Utama No. B-

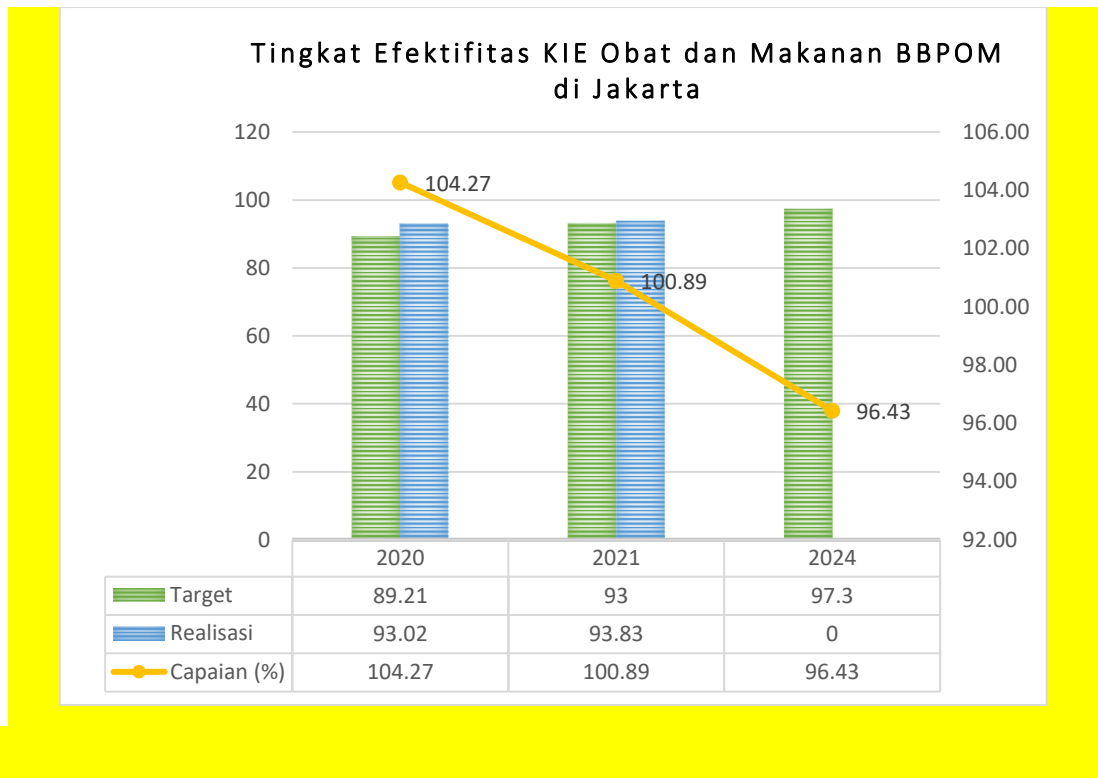
PR.01.02.2.21.11.21.570 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 tanggal 8 November 2021 dari semula 90,99 menjadi 93.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 diperoleh nilai **93,83 (Sangat Efektif)** melebihi target yang telah ditetapkan yaitu **93 (100,89%)** dengan kriteria **Baik**.

Perhitungan Indeks Efektivitas KIE tahun 2021 merupakan akumulasi hasil pengukuran Triwulan I hingga IV tahun 2021. Nilai ini diperoleh dari 273 responden survei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan selama periode tahun 2021.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2021 diperoleh sebesar 93,83 (Sangat Efektif). Nilai ini menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 93,02 (Sangat Efektif). Capaian tahun 2021 sebesar 100,89% (Baik) dengan target sebesar 93, sedangkan capaian tahun 2020 sebesar 104,27% (Baik) dengan target sebesar 89,21. Terjadi kenaikan target yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021.

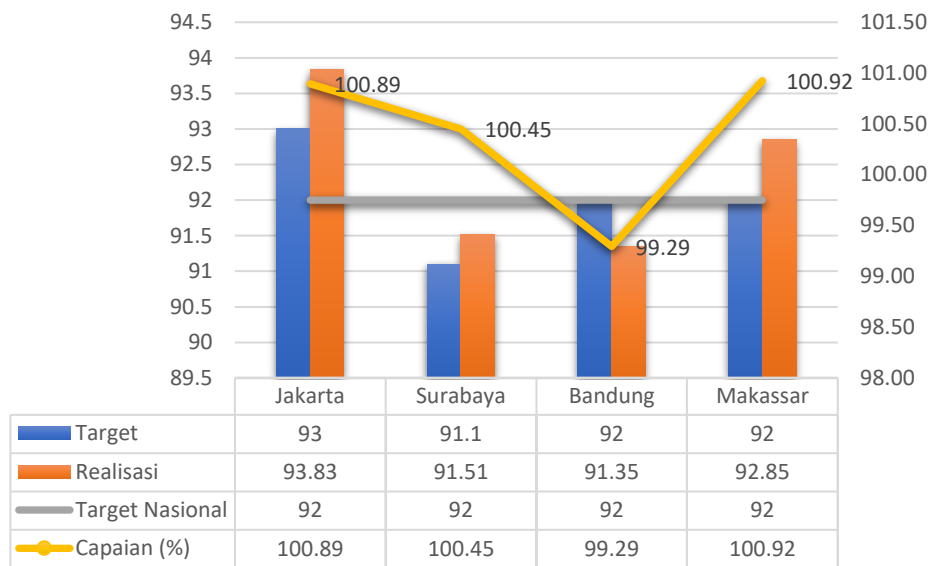


Gambar 34. Perbandingan tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Apabila nilai realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2024 sebesar 97,3, maka diperoleh capaian sebesar 96,43% (kategori Baik). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dalam meningkatkan efektifitas KIE, misalnya dengan menambah variasi metode KIE sehingga target akhir tahun 2024 dapat tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan



Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan dengan realisasi indeks oleh Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Makassar. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Jakarta sebesar 93,83; Balai Besar POM di Makassar sebesar 92,85; Balai Besar POM di Surabaya sebesar 91,51; dan Balai Besar POM di Bandung sebesar 91,35 yang semuanya masuk ke dalam kategori efektifitas Sangat Efektif. Capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Makassar masuk ke dalam kategori Baik secara berturut-turut sebesar 100,89%; 100,45%; 99,29%; dan 100,92%. Hanya Balai Besar POM di Bandung yang belum melampaui terget kinerja tahun 2021. Apabila dilihat dari terget, Balai Besar POM di Jakarta memiliki target paling tinggi yaitu sebesar 93 disertai dengan

realisasi yang paling tinggi pula. Jika dibandingkan dengan target nasional 92, hanya Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Makassar yang telah berhasil melampauinya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Terselenggaranya KIE langsung kepada masyarakat melalui Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, sebanyak 10 (sepuluh) titik di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah peserta total 4500 orang dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.



Gambar 33 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat

- 2) Terselenggaranya kegiatan KIE Obat dan Makanan secara mandiri melalui kegiatan Pembinaan UMK Pangan di daerah destinasi wisata Kepulauan Seribu pada triwulan II dan KIE dalam Rangka Pengawasan Desa Pangan Aman pada triwulan IV dengan total peserta keseluruhan sebanyak 150 orang.



Gambar 34 Pelaksanaan kegiatan pembinaan UMK Pangan di daerah destinasi wisata Kepulauan Seribu

- 3) Intensifikasi sosialisasi dan KIE mengenai Obat dan Makanan melalui media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, dan video sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.
- 4) Adanya penurunan level Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga KIE dan penyebaran informasi dapat lebih banyak dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, yaitu berupa bimbingan teknis yang memungkinkan peserta KIE berinteraksi dua arah sehingga materi dapat mudah dipahami.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kegiatan

Pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 ini ditunjang oleh berbagai program yang telah berjalan, meliputi:

- 1) Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video. Salah satunya adalah implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (*Instagram, Facebook, dan Twitter*).
- 2) Program bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan Kader dan Komunitas Keamanan Pangan pada program prioritas nasional keamanan pangan secara langsung sehingga meningkatkan pemahaman terhadap konten informasi yang diberikan.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Evaluasi dan analisis terhadap hasil survei diperlukan untuk mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif di masa mendatang. Selain itu, juga diperlukan tindak lanjut berupa koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi BPOM sebagai pengolah survei apabila ada kendala penggunaan aplikasi Evaluasi KIE.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	93	93,83	100,89%	1.624.100.000	1.624.098.100	100,00%	1,01	0,01	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.01 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian KIE dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal penyampaian KIE Obat dan Makanan.

17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 23. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	40	40	100	Baik

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,

3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi bulanan dan Triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20%	Februari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	5%	Februari-Juni (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 1-TW 2)
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah <ul style="list-style-type: none">- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%)- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%)	15%	Juli-September (TW 3)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15%	Oktober-Desember (TW 4)
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20%	Oktober-Desember (TW 4)

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
	Total Skor	100 %	

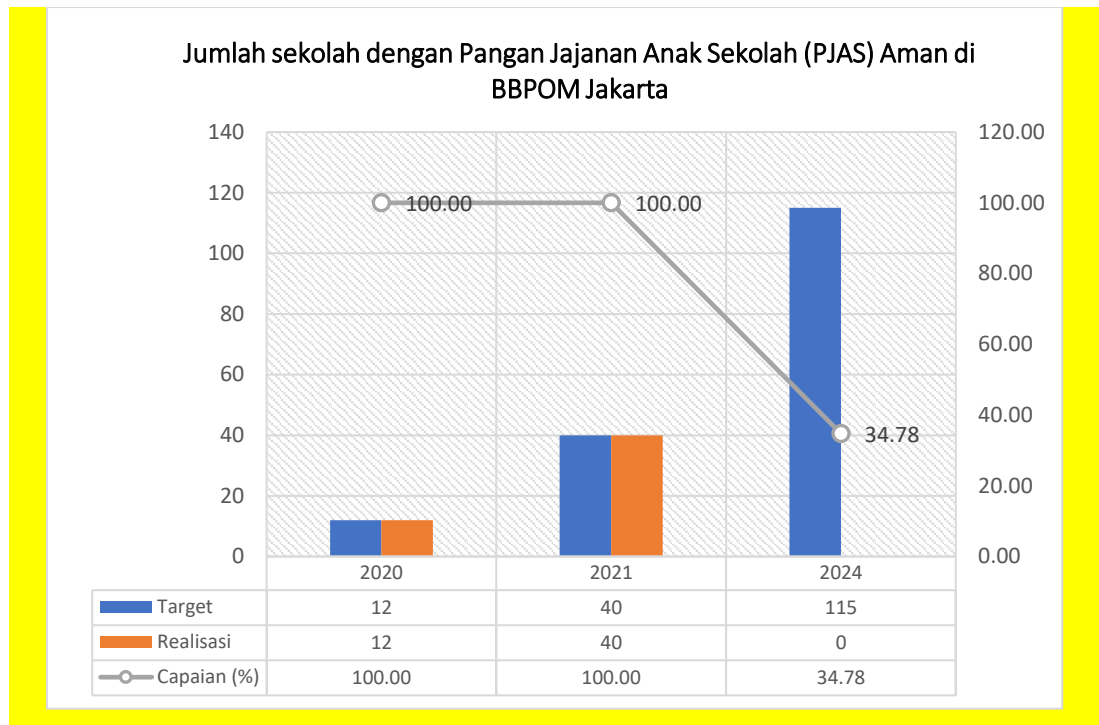
Adapun untuk pembobotan tahapan program PJAS tahun 2021 terdapat revisi berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan No. B-PM.02.04.55.553.10.21.263 perihal Penyampaian Perubahan Bobot Tahapan Program PJAS tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi/Paket Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawasan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
Total Skor		100%	

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 adalah **40 sekolah**. Hal ini sudah sesuai dengan terget sebesar 40 sehingga diperoleh **capaian sebesar 100,00%** dengan kriteria kinerja **Baik**. Apabila dirinci dari realisasi per tahapan kegiatan intervensi PJAS tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor (%)	Realisasi Progress (%)				Total Progress (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20	20				20
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10		10			10
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15		15			15
4	Pemberian Paket Edukasi/Paket Informasi Keamanan Pangan	10		10			10
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	15			15		15
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20				20	20
7	Pengawasan	10				10	10
Total Skor (%)		100	20	25	15	30	100

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 35. Perbandingan presentase capaian tahapan intervensi PJAS aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020 dan 2021

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 sebanyak 40 sekolah dengan capaian sebesar 100.00% (kriteria Baik). Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 adalah sebanyak 12 sekolah dengan capaian sebesar 100.00%. Jumlah target dan realisasi renstra 2020-2024 bersifat akumulatif. Target tahun 2020 pada awalnya adalah 20 sekolah. Karena adanya penurunan target Balai Besar/Balai POM tahun 2020 akibat adanya penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19 dan berdasarkan Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan POM Nomor T-PM.01.03.55.553.07.20.143 tanggal 30 Juli 2020 perihal program intervensi keamanan PJAS dalam

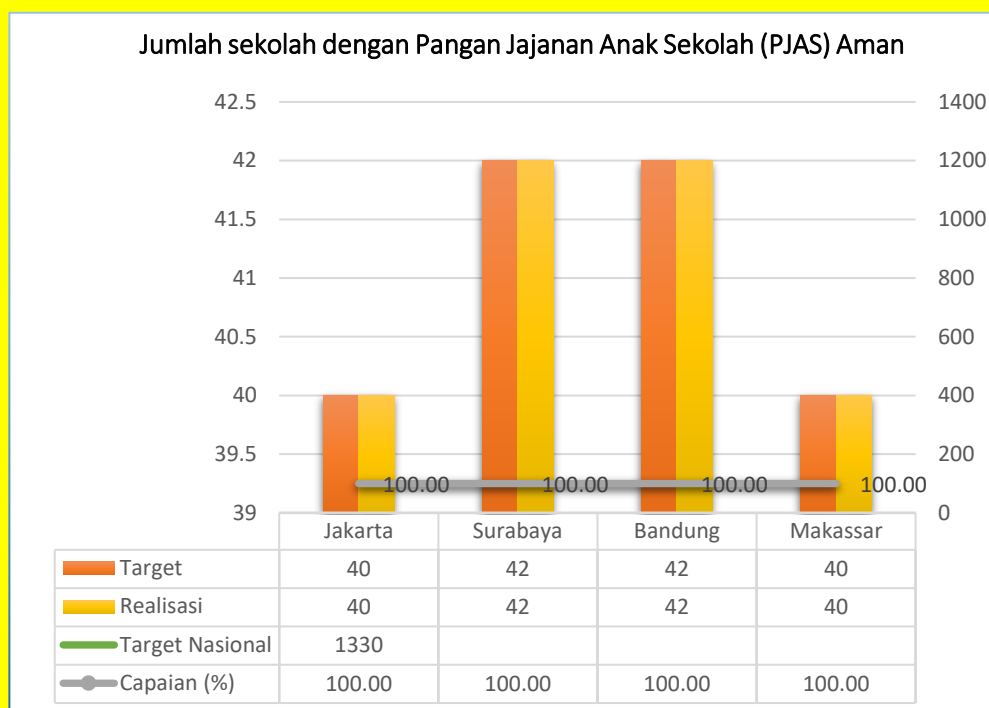
tatatan normal baru tahun 2020, terdapat penurunan target sekolah menjadi 12 sekolah tertera dalam KAK Advokasi Lintas Sektor PJAS. Adapun 8 sekolah lainnya menjadi *carried over* sekolah yang diintervensi tahun 2021.

Apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 115 sekolah, diperoleh capaian sebesar 34,78%. Target ini akan dicapai pada akhir tahun 2024 karena jumlah sekolah yang diintervensi selama periode RPJMN 2020-2024 akan bertambah seiring dengan pelaksanaan program pada periode hingga akhir tahun 2024 yaitu 65 sekolah tahun 2022, 90 sekolah tahun 2023 dan 115 sekolah tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional

Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman oleh Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar di Bandung, dan Balai Besar di Makassar tahun 2021 secara berturut-turut adalah 40 sekolah, 42 sekolah, 42 sekolah, dan 40 sekolah.

BADAN POM



Gambar 35 Perbandingan jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara. Realisasi jumlah sekolah intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00% dengan kinerja Baik. Program intervensi PJAS di 34 provinsi memiliki target jumlah sekolah tahun 2021 secara nasional sebanyak 1330.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

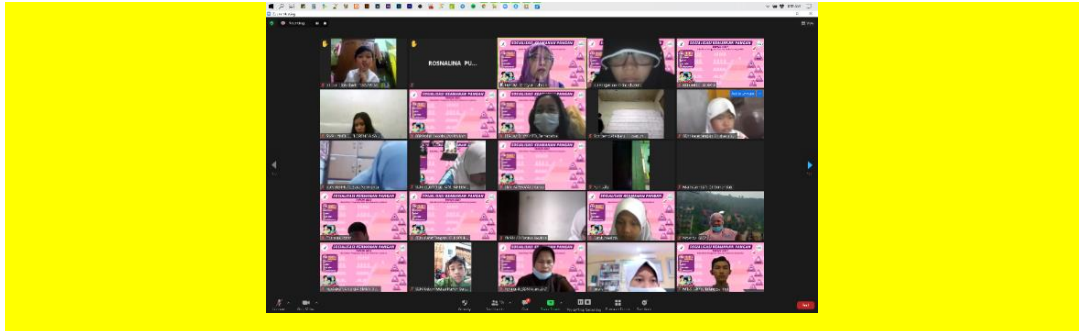
Penyebab keberhasilan capaian program intervensi PJAS di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 ini antara lain:

- 1) Adanya sinergisme dan dukungan lintas sektor terkait seperti Pemda, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu Program Keamanan Pangan pada 26 Maret 2021.



Gambar 36 Kegiatan advokasi keamanan pangan terpadu kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2021

- 2) Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan secara *daring* pada 1 April 2021 kepada 73 sekolah yang terdiri atas 28 sekolah intervensi PJAS dan 45 sekolah yang hanya mendapatkan paket edukasi keamanan pangan dan sosialisasi keamanan pangan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman.



Gambar 37 Kegiatan sosialisasi keamanan pangan

3) Terlaksananya Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah secara *luring* pada 6 April 2021 yang diikuti oleh 28 sekolah intervensi baru tahun 2021 yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) sekolah dan 3 (tiga) madrasah di Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga kader keamanan pangan dapat memahami materi mengenai penerapan keamanan pangan untuk mencapai PJAS aman.



Gambar 38 Kegiatan bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah

- 4) Telah dilakukan pemberian paket edukasi/paket informasi keamanan pangan terhadap sekolah yang diintervensi dalam rangka pelaksanaan program PJAS tahun 2021.
- 5) Telah disusunnya dokumen rencana aksi program pangan sekolah sebagai bentuk komitmen sekolah dalam implementasi keamanan pangan secara mandiri.
- 6) Telah dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi PJAS tahun 2021 dengan terlaksananya *Workshop* Monev Program Keamanan Pangan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 yang melibatkan *stakeholder-stakeholder* terkait, meliputi Walikota, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Direktur Perumda Pasar Jaya, Bappeda, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 28 Sekolah yang diintervensi PJAS Tahun 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat.



Gambar 39 Workshop monev program keamanan pangan terpadu kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2021

7) Adanya forum komunikasi dengan kader keamanan pangan dari sekolah-sekolah intervensi memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tahapan program PJAS.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan sekolah intervensi PJAS mengenai pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah pada tahapan monitoring program serta intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader yang dilakukan melalui media *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* sehingga informasi dan respon dapat diberikan dan diterima secara cepat. Selain itu, koordinasi melalui komunikasi yang efektif ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan program intervensi PJAS. Adanya program pengawalan terhadap sekolah yang telah diintervensi melalui media komunikasi *Whatsapp* juga menjadi penunjang tercapainya tujuan program intervensi PJAS, khususnya dalam memastikan sekolah-sekolah yang telah diintervensi melaksanakan program keamanan PJAS secara berkelanjutan. Pelaksanaan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan secara intensif juga menunjang keberhasilan pelaksanaan program intervensi PJAS aman.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Rekomendasi yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan program PJAS tahun sebelumnya adalah optimalisasi

komunikasi untuk mengatasi Kader Keamanan Pangan yang kesulitan dalam menyiapkan dokumen program, terlebih karena terbatasnya pertemuan secara tatap muka dalam memberikan penjelasan. Sebagai tindak lanjut telah dilakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan membuat forum komunikasi melalui *Whatsapp* dengan para kader keamanan pangan sekolah yang memudahkan dalam melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program. Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor dan sekolah target, yaitu dengan menjalin hubungan yang erat dengan *stakeholder-stakeholder* terkait melalui forum komunikasi via *Whatsapp* yang sudah dibentuk dan dengan pertemuan dalam rangka diskusi dan koordinasi terkait program baik secara tatap muka maupun secara daring via *Zoom Meeting*.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40	40	100,00%	354.018.000	353.767.400	99,93%	1,00	0,00	100%

di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program terutama pelaporan dan koordinasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal kemampuan menyampaikan materi bimtek keamanan pangan dan program intervensi PJAS.

18. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 24. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai besar POM di Jakarta	14	14	100	Baik

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan

teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang menjadi sasaran intervensi dapat terdiri dari desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi tahun 2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta ialah 14 kelurahan yang meliputi 9 kelurahan intervensi baru dan 5 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020. Sembilan kelurahan intervensi baru berada di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai lokus kota program prioritas nasional keamanan

pangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang terdiri atas Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Kenari, Kelurahan Harapan Mulia, Kelurahan Cikini, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Galur, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Sumur Batu, dan Kelurahan Rawasari. Sedangkan lima kelurahan lainnya adalah kelurahan yang telah diintervensi tahun 2020 yang berada di Kota Administrasi Jakarta Timur, terdiri atas Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kelurahan Pondok Ronggon, Kelurahan Kramat Jati, dan Kelurahan Kalisari.

Realisasi bulanan dan Triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

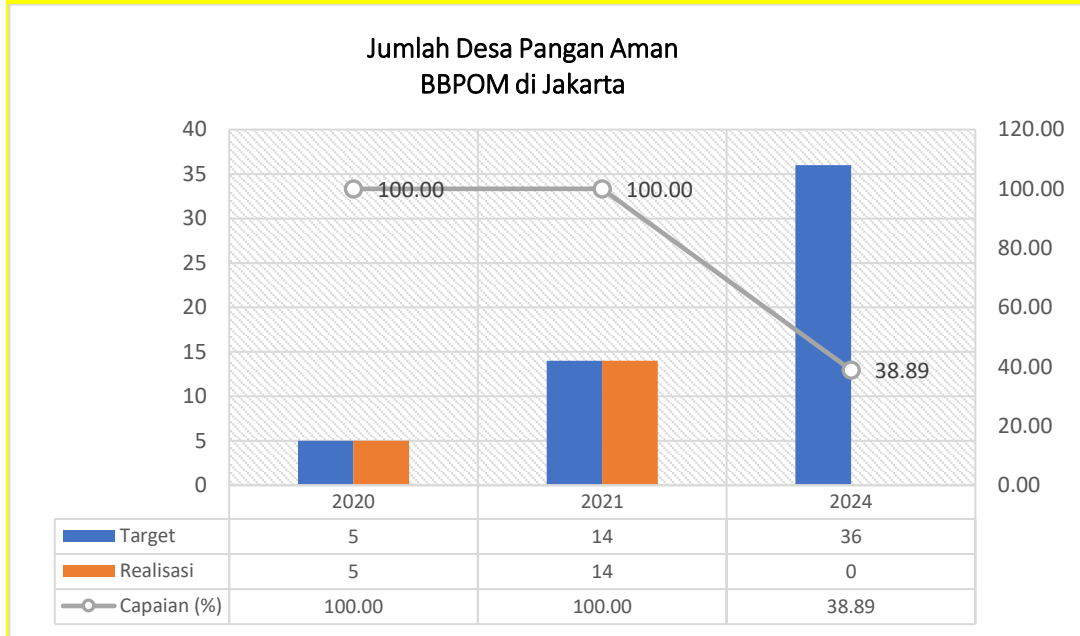
No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, <i>rapid test</i> , dll.	5%	Januari-April (TW 1-TW 2)
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli (TW 2-TW 3)
4	Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15%	Mei-Oktober (TW 2-TW 4)
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni-November (TW 2-TW 4)
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	- Pre Intervensi: Mei-Oktober (dapat dilakukan bersamaan dengan bimtek komunitas) - Post Intervensi: November (dapat dilakukan bersamaan dengan

			pengambilan data/survei post intervensi)
7	Monitoring dan Evaluasi	15%	November-Desember (TW 4)
8	Pengawalan	10%	Juni-Desember (TW 2-TW 4)
Total Skor		100%	

Realisasi jumlah desa/kelurahan pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 adalah **14 kelurahan**. Hal ini sudah sesuai dengan terget sebesar 14 sehingga diperoleh **capaian sebesar 100,00%** dengan kriteria kinerja **Baik**. Apabila dirinci dari realisasi per tahapan kegiatan intervensi Desa Pangan Aman tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor (%)	Realisasi Progress (%)				Total Progress (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20	20				20
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, <i>rapid test</i> , dll.	5	5				5
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15		15			15
4	Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15		5	10		15
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10			5	5	10
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10			5	5	10
7	Monitoring dan Evaluasi	15				15	15
8	Pengawalan	10				10	10
Total Skor (%)		100	25	20	20	35	100

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 37. Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 dan 2021

Realisasi jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 sebanyak 14 kelurahan dengan capaian sebesar 100.00% (kriteria Baik). Realisasi jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 adalah sebanyak 5 kelurahan dengan capaian sebesar 100.00%. Jumlah target dan realisasi renstra 2020-2024 bersifat akumulatif. Target tahun 2020 pada awalnya adalah 7 kelurahan. Karena adanya penurunan target Balai Besar/Balai POM tahun 2020 akibat adanya penyesuaian

anggaran akibat pandemi Covid-19, target desa/kelurahan intervensi tahun 2020 menjadi 5 kelurahan dengan 2 kelurahan menjadi *carried over* yang diintervensi tahun 2021 sesuai dengan Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan POM Nomor B-PM.01.01.55.551.01.21.17 tanggal 12 Januari 2021 perihal pelaksanaan desa pangan aman tahun 2021.

Apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 36 desa, diperoleh capaian sebesar 38,89%. Target ini akan dicapai pada akhir tahun 2024 karena jumlah desa/kelurahan yang diintervensi selama periode RPJMN 2020-2024 akan bertambah seiring dengan pelaksanaan program pada periode hingga akhir tahun 2024 yaitu 21 kelurahan tahun 2022, 28 kelurahan tahun 2023 dan 36 kelurahan tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional

BADAN POM



Gambar 38. Perbandingan jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi jumlah jumlah desa pangan aman oleh Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar di Bandung, dan Balai Besar di Makassar tahun 2021 secara berturut-turut adalah 14 desa, 19 desa, 19 desa, dan 12 desa. Realisasi jumlah desa intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00% dengan kinerja Baik. Program intervensi desa pangan aman di 34 provinsi memiliki target jumlah desa/kelurahan tahun 2021 secara nasional sebanyak 427.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi *progress* tahapan program Desa Pangan Aman tahun 2020 ialah 100%. Adanya PSBB karena pandemi Covid-19 ini menyebabkan beberapa tahapan intervensi Desa Pangan Aman ini terhambat khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tahapan Fasilitasi Keamanan Pangan, Intensifikasi Keamanan Pangan mengharuskan adanya visitasi oleh petugas BBPOM di Jakarta ke sarana-sarana produksi dan pengolahan pangan komunitas di kelurahan. Oleh karena itu, pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah minimal petugas dan Kader Keamanan Pangan yang turun ke lapangan setelah pemberlakuan PSBB dan situasi penyebaran Covid-19 dapat terkendali.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Penyebab keberhasilan capaian program Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021, yaitu:

- 8) Adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diselenggarakan pada 23 Maret 2021 dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 26 Maret 2021.



Gambar 40 Kegiatan audiensi dengan Walikota Jakarta Pusat

- 9) Terbentuknya Tim Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan yang aktif dalam melaksanakan kegiatan keamanan pangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan surat keputusan yang dibuat oleh masing-masing kelurahan intervensi.
- 10) Kader Keamanan Pangan Kelurahan (Kader Keluarga, Masyarakat, dan Sekolah) yang telah dibekali materi keamanan pangan dan kompetensi dalam melakukan pendampingan dalam penerapan keamanan pangan dan penulisan materi kepada komunitas kelurahan melalui kegiatan bimtek keamanan pangan untuk Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan yang diselenggarakan secara *luring* bertempat di 9 (sembilan) kelurahan yang diintervensi tahun 2021 pada 7-26 Juni 2021.



Gambar 41 Kegiatan bimtek kader keamanan pangan kelurahan

11) Komunitas desa/kelurahan yang terpapar keamanan pangan meliputi masyarakat desa (ibu rumah tangga, remaja, komunitas sekolah (guru, penjaja kantin, siswa dll), pelaku usaha pangan di desa (industri rumah tangga pangan, warung makan, PKL, ritel/toko) melalui kegiatan bimtek untuk komunitas desa/kelurahan yang diselenggarakan secara *luring* di 9 (sembilan) kelurahan intervensi tahun 2021 pada 22 Juni-18 September 2021.



Gambar 42 Kegiatan bimtek untuk komunitas desa

12) Telah dilakukannya pendampingan praktek keamanan pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan pelaku usaha pangan desa dalam menerapkan keamanan pangan melalui kegiatan fasilitasi keamanan pangan oleh kader keamanan pangan kelurahan

didampingi oleh petugas BBPOM di Jakarta kepada komunitas kelurahan pada triwulan III-IV tahun 2021.

- 13) Telah dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan *pre* dan *post* intervensi di kelurahan-kelurahan intervensi sehingga diperoleh data hasil pengujian sampel yang digunakan untuk memastikan praktek keamanan pangan sudah diterapkan di desa/kelurahan.
- 14) Dilakukannya pengujian sampel pangan pada 5 (lima) kelurahan yang diintervensi tahun 2020 sebagai bentuk pengawalan pelaksanaan program desa pangan aman.
- 15) Terlaksananya *Workshop* Monev Program Keamanan Pangan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Pangan Aman tahun intervensi 2021 dengan *stakeholder-stakeholder* terkait, meliputi Walikota, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Direktur Perumda Pasar Jaya, Bappeda, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ketua Tim Penggerak PKK, Camat, Lurah dan Tim Keamanan Pangan Pangan dari Kelurahan yang diintervensi Desa Pangan Aman tahun 2021 (Kelurahan Cikini, Rawasari, Bendungan Hilir, Kenari, Sumur Batu, Harapan Mulia, Gunung Sahari Utara, Petojo Selatan, Galur).
- 16) Telah disusunnya dokumen rencana aksi keamanan pangan oleh masing-masing kelurahan intervensi tahun

2021 sebagai bentuk komitmen pelaksanaan program keamanan pangan secara berkelanjutan.

17)Terbentuknya forum komunikasi dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan dari kelurahan intervensi juga memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intervensi Desa Pangan Aman.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain: (1) optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor kelurahan melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu serta memudahkan dalam proses komunikasi pada perencanaan hingga pelaksanaan program; (2) pelaporan tahapan kegiatan melalui sistem gkpd.pom.go.id sebagai bentuk pemantauan kegiatan secara berkala dan aktual; (3) kegiatan KIE dalam rangka pengawalan keamanan pangan secara *daring* untuk meningkatkan dan memelihara pengetahuan kader keamanan pangan dari kelurahan-kelurahan yang telah diintervensi tahun sebelumnya; (4) proses pengambilan dan *input data pre* dan *post* intervensi yang didukung oleh petugas *surveyor* yang terlatih sehingga dapat selesai tepat waktu.



Gambar 43 Kegiatan KIE dalam rangka pengawalan desa pangan aman

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Melalui kegiatan monitong dan evaluasi program periode sebelumnya, telah diperoleh beberapa rekomendasi, diantaranya peningkatan koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan serta metode bimtek kader dan komunitas secara tatap muka, mengingat adanya kendala di tahun 2020 berupa pembatasan kegiatan akibat pandemi *Covid-19* sehingga pelaksanaan bimtek pada tahun 2020 secara *daring* dinilai kurang efektif dalam menyampaikan teknis pelaksanaan program dan materi keamanan pangan. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2021, telah dilakukan berbagai upaya, yaitu intensifikasi koordinasi melalui forum komunikasi dengan kelurahan intervensi dan OPD terkait yang dilakukan melalui *Whatsapp* dan diskusi pembahasan program baik secara tatap muka maupun *daring* melalui *Zoom*, bimtek kader dan komunitas secara tatap muka sehingga pemahaman kader dan komunitas dapat lebih baik karena kegiatan lebih fokus dan interaksi lebih intens. Agar

target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor kelurahan.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	14	14	100,00%	783.316.000	783.315.500	100,00%	1,00	0,00	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program terutama pelaporan dan koordinasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal kemampuan menyampaikan materi bimtek keamanan pangan dan program intervensi desa pangan aman.

19. Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 25 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	2	2	100	Baik

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh

dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan cara ritel pangan yang baik (CRPB) oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya,
- 2) Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ialah 2 (dua) pasar yaitu 1 (satu) pasar intervensi baru dan 1 (satu) pasar pengawalan intervensi tahun 2020. Satu pasar intervensi baru adalah Pasar Gembrong Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan satu pasar pengawalan intervensi tahun 2020 adalah Pasar Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Realisasi bulanan dan Triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Survei Pasar	5%	Januari (TW 1)
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15%	April-Mei (TW 2)
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20%	April (TW 2)
5	Penyuluhan	5%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
6	Kampanye	5%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20%	September-Oktober (TW 3-TW 4)
8	Lomba Pasar Aman	10%	Desember (TW 4)
Total Skor		100%	

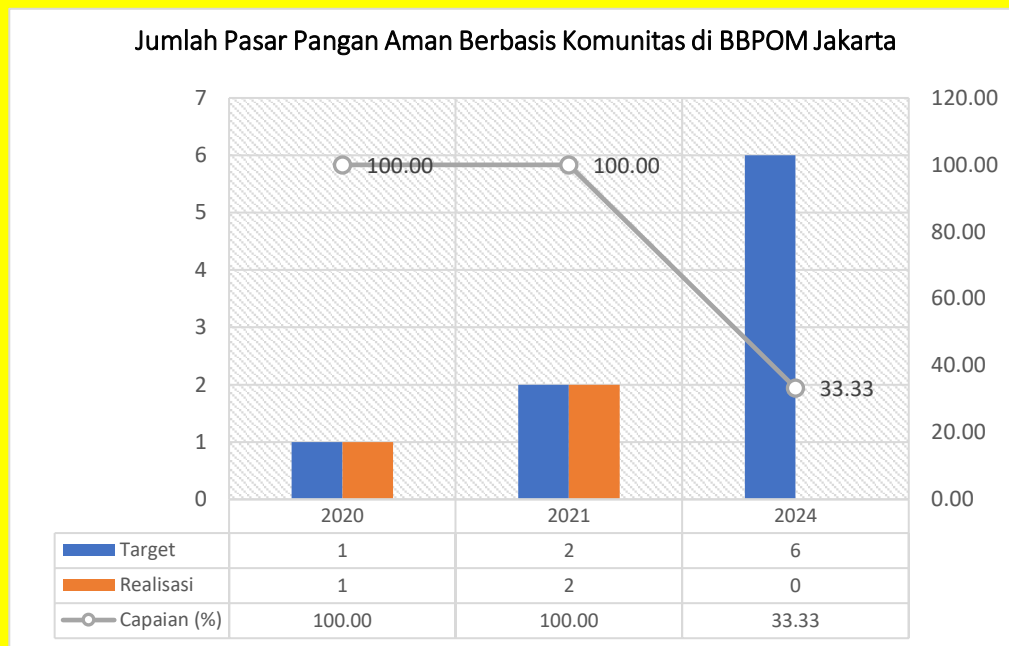
Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

adalah **2 pasar**. Hal ini sudah sesuai dengan target sebesar 2 sehingga diperoleh capaian sebesar **100,00%** dengan kriteria kinerja **Baik**. Apabila dirinci dari realisasi per tahapan kegiatan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor (%)	Realisasi Progress (%)				Total Progress (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Advokasi	20	20				20
2	Survei Pasar	5	5				5
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15		15			15
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20		20			20
5	Penyuluhan	5		5			5
6	Kampanye	5		5			5
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20			20		20
8	Lomba Pasar Aman	10				10	10
Total Skor (%)		100	25	45	20	10	100

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 sebanyak 2 pasar dengan capaian sebesar 100.00% (kriteria Baik). Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 adalah sebanyak 1 pasar dengan capaian sebesar 100.00%. Jumlah target dan realisasi renstra 2020-2024 bersifat akumulatif.

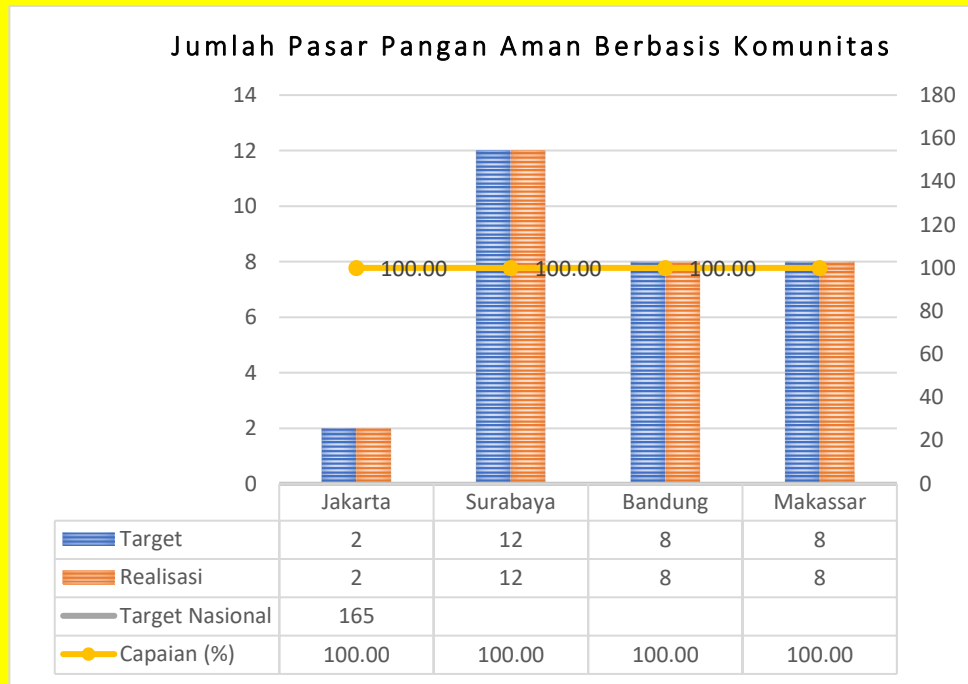


Gambar 39. Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020 dan 2021

Apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 6 pasar, diperoleh capaian sebesar 33,33%. Target ini akan dicapai pada akhir tahun 2024 karena jumlah pasar yang diintervensi selama periode RPJMN 2020-2024 akan bertambah seiring dengan pelaksanaan program pada periode hingga akhir tahun 2024 yaitu 3 pasar tahun 2022, 4 pasar tahun 2023 dan 6 pasar tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Realisasi jumlah jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas oleh Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar di Bandung, dan Balai Besar di Makassar tahun 2021 secara berturut-turut adalah 2 pasar, 12 pasar, 8 pasar, dan 8 pasar



Gambar 40. Perbandingan Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi jumlah pasar intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00% dengan kinerja Baik. Program intervensi pasar pangan aman berbasis

komunitas di 34 provinsi memiliki target jumlah pasar tahun 2021 secara nasional sebanyak 165.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan tercapainya pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini antara lain:

- 1) Kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya dalam pelaksanaan kegiatan melalui forum komunikasi baik secara tatap muka maupun *online*.
- 2) Adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan pada 26 Maret 2021.
- 3) Petugas pengelola pasar yang terlatih dalam melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan *test kit* serta dalam melakukan pelaporan hasil pengawasan setelah terlaksananya bimtek petugas pengelola pasar/pelatihan fasilitator pasar pangan aman berbasis komunitas pada 7 April 2021 yang dilakukan secara *luring*.



Gambar 44 Bimtek petugas pengelola pasar

- 4) Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan dan tidak menjual bahan berbahaya atau produk yang mengandung abhan berbahaya melalui kegiatan Penyuluhan Pedagang Pasar pada 17 Juni 2021 secara *luring*.



Gambar 45 Penyuluhan pedagang pasar Gembrong Baru

- 5) Meningkatnya kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar yang terdiri atas (pengelola pasar, pedagang, pembeli dan masyarakat umum) mengenai keamanan pangan di pasar tradisional melalui kegiatan Kampanye Pasar Aman pada 22 Juni 2021.



Gambar 46 Kampanye pasar aman

- 6) Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi program pasar pangan naman berbasis komunitas melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan *test kit* Kimia dan pengujian mikrobiologi.
- 7) Telah dilakukan *Workshop* Monev Program Keamanan Pangan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun intervensi 2021 dengan stakeholder-stakeholder terkait, meliputi Walikota, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Direktur Perumda Pasar Jaya, Bappeda, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajer Area 03, Kepala Pasar Gembrong,

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain: (1) kegiatan survei pasar yang dilakukan sebelum pelaksanaan program pada 24 Maret 2021, bertujuan untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya dan mengidentifikasi pedagang pasar serta inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya; (2) optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dengan pengelola pasar dapat berjalan dengan efektif dan kontinu serta memudahkan dalam proses komunikasi pada perencanaan hingga pelaksanaan program; (3) pelaporan tahapan kegiatan melalui sistem sipaman.pom.go.id sebagai bentuk pemantauan kegiatan secara berkala dan aktual.



Gambar 47 Kegiatan survei pasar

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Rekomendasi pelaksanaan program pada periode sebelumnya yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petugas dan pedagang pasar tentang keamanan pangan agar tujuan program pasar aman dari bahan berbahaya dapat tercapai. Sebagai tindak lanjut telah dilakukan peningkatan pengetahuan pengelola dan petugas pasar yang lebih intensif melalui kegiatan bimbingan teknis dan forum komunikasi secara *daring* serta pembinaan terhadap pedagang yang menjual produk yang mengandung bahan berbahaya melalui kegiatan intensifikasi monitoring dan evaluasi.

Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar target, contohnya komunikasi melalui forum komunikasi *Whatsapp* dan pertemuan diskusi baik secara tatap muka maupun secara *daring* via *Zoom*.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja	2	2	100,00%	100.431.000	100.431.000	100,00%	1,00	0,00	100%

Balai Besar POM di Jakarta									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program terutama pelaporan dan koordinasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal kemampuan menyampaikan materi bimtek keamanan pangan dan program intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 5, yang dinyatakan dalam bentuk progress, maka belum dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4}{4}$$

$$NPS = \frac{108.89 + 100.00 + 100.00 + 100.00}{4}$$

$$NPS = 100.22\%$$

Dengan NPS 100.22%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil dalam mencapai sasaran meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 20. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	90.85	90.85	Baik

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka.

Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/ *SOP*.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

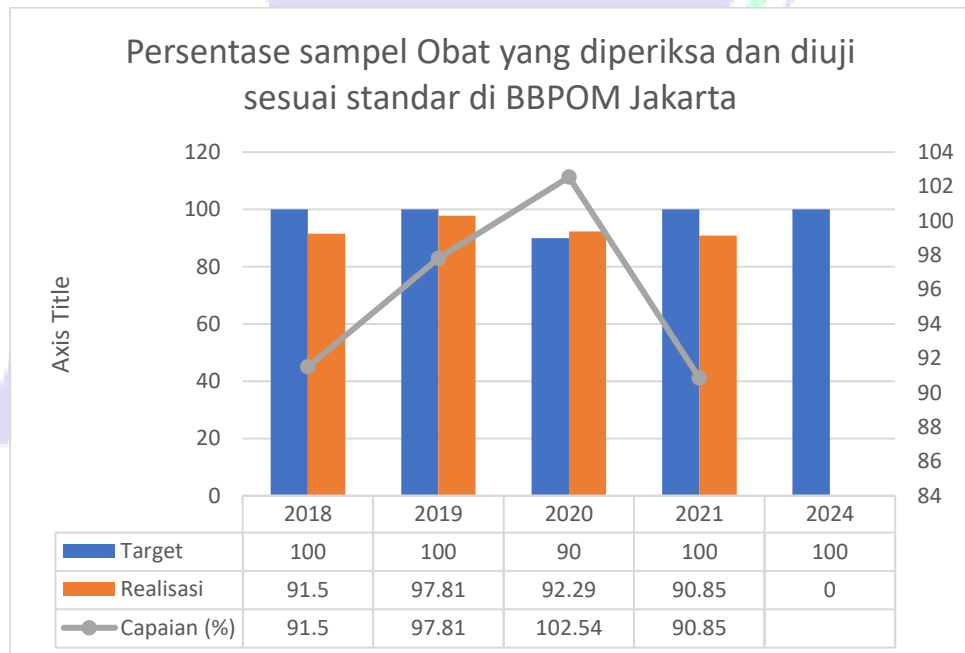
Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat satu tahun}} \times 100\%$$

Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta mencapai target yang ditetapkan yaitu 90.85% dengan kriteria **“Baik”**. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2018-2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

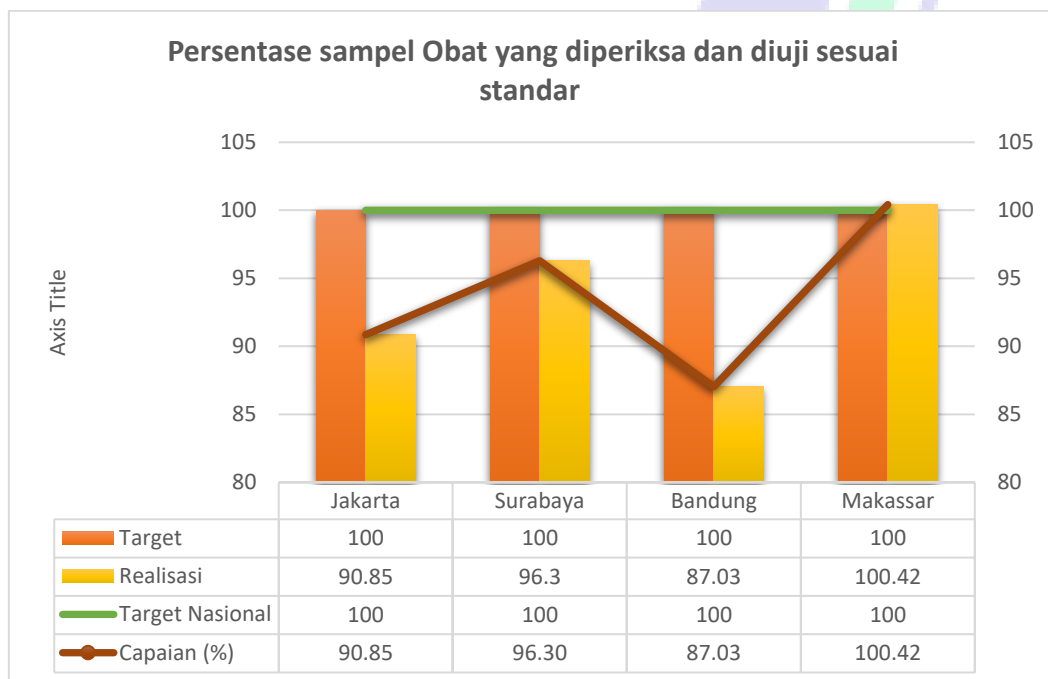


Gambar 48. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021

Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM Jakarta sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 terus meningkat, sedangkan tahun 2021 capaian 90.85% mengalami penurunan sebesar 11.69% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu terjadi keterlambatan penyelesaian pengujian (melebihi timeline pengujian yang sudah ditetapkan, yaitu 30 hari kerja), antara lain 2 sampel obat (cangkang kapsul) yang diuji di BBPOM di Yogyakarta salah satunya masih dalam proses uji absah di PPPOMN. Keterlambatan penyelesaian pengujian juga disebabkan oleh kondisi pandemic Covid 19 yang mengalami peningkatan mulai bulan Juli 2021 sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan jumlah pegawai yang WFH (*Work From Home*). Dengan proporsi pegawai WFH yang lebih besar maka pengujian sampel menjadi tertunda. Selain itu juga ada penyesuaian target presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari semula 90,5% menjadi 100%, sehingga capaian menjadi lebih rendah. Tahun 2024 target presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tetap 100%, namun kami optimis tahun depan bisa meningkat kembali sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan **Gambar 49** diketahui bahwa realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Balai Besar POM Jakarta berada di bawah target nasional bersama dua balai lainnya yang setara. Sedangkan Balai Besar POM di Makassar berada di atas target nasional. Capaian Balai Besar POM di Jakarta 90.85% (baik), Balai Besar POM di Surabaya 96.30%(baik), Balai Besar POM di Bandung 87.03% (cukup) dan Balai Besar POM di Makassar 100.425 (baik).



Gambar 49. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2021 adalah 90.85%, masih belum memenuhi target yang ditetapkan (100 %). Hal ini disebabkan kondisi pandemic Covid 19 yang meningkat pada bulan Juli-Agustus 2021 yang membuat Sebagian besar penguji terpaksa WFH, sehingga time line pengujian sampel sebagian tidak terpenuhi.

Tahun 2021 terdapat 1794 sampel yang diperiksa sesuai standar dari target 1791 sampel. Sampel yang masuk dan diuji di laboratorium ada 1782 sampel. Terdapat 12 sampel yang tidak diuji di laboratorium karena tanpa izin edar (TIE) yaitu 11 sampel obat tradisional dan 1 sampel suplemen kesehatan. Dari total sampel yang masuk ke laboratorium, terdapat 1619 sampel diuji dengan parameter uji kritis yang lengkap sesuai Pedoman *Sampling* dan memenuhi timeline pengujian (sesuai standar).

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan dari laboratorium obat

- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah, telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten. Juga dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan capaian kinerja sebagaimana disebutkan dalam butir diatas.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2021.

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	90,85%	90,85%	265.365.900	263.064.900	99,13%	0,92%	-0,08%	75%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -0.08 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 21. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	96.42	96.42	Baik

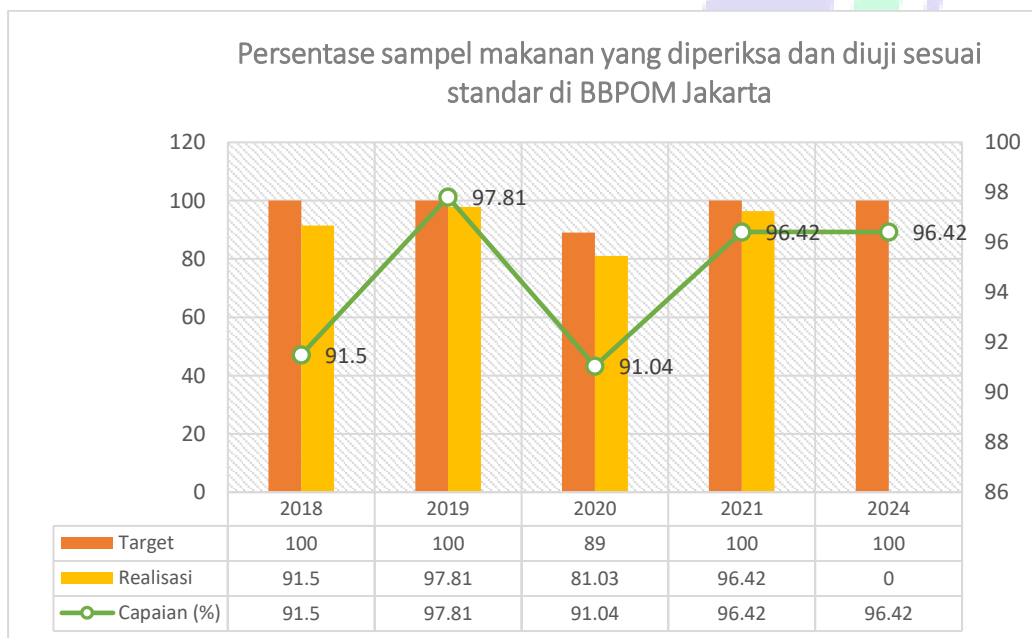
Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Capaian persentase pemenuhan pengujian makanan sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 96.42% dengan kriteria “**Baik**”. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM yaitu memenuhi parameter kritis dan memenuhi *timeline*.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan 3 tahun sebelumnya dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 50. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021

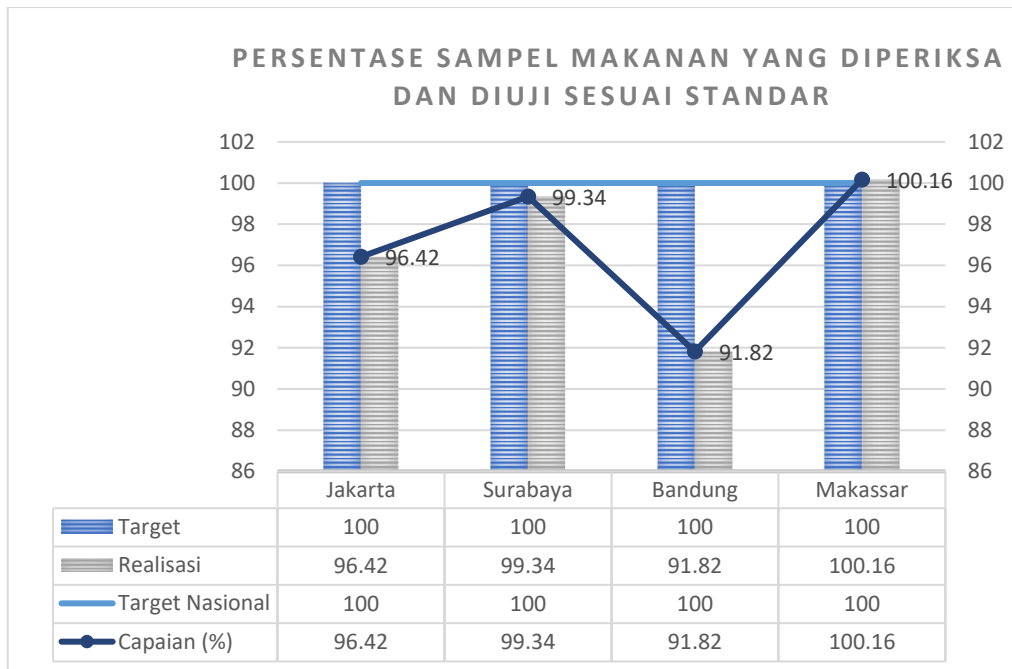
Realisasi persentase persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 **meningkat**, hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta **berhasil**

meningkatkan kualitas pengujian laboratorium untuk selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan POM. Berdasarkan grafik diatas mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 nilai capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM di Jakarta mengalami kenaikan dan penurunan, baru setelah tahun 2021 terdapat peningkatan dan diharapkan nilai capaian semakin meningkat di tahun 2024. Nilai Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Jakarta mulai tahun 2018 sampai tahun 2021 belum pernah mencapai target Balai yang telah ditentukan, kecuali di tahun 2020 yang terjadi penurunan target.

c. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan **Gambar 51** diketahui bahwa realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta **berada di** atas target nasional bersama tiga balai lainnya yang setara.

BADAN POM



Gambar 51. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Berdasarkan Gambar grafik di atas, nilai capaian persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya Balai Besar POM di Makassar yang pernah mencapai Target Nasional dan target balainya, yaitu 100.16%. Sedangkan tiga balai lainnya yaitu Balai besar POM di Jakarta (96.42%), Balai Besar POM di Surabaya (99.34%) dan Balai Besar POM di Bandung (91.82%) hampir mendekati target Nasional (100%) dan target balai masing-masing.

d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2021 adalah 96.42%, belum mencapai target

yang ditetapkan yaitu 100%. Penurunan persentase realisasi pemenuhan pengujian sampel sesuai standar pada tahun 2021 disebabkan jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat pengujian pada sampel acak sebesar 24 sampel dan pada sampel target sebesar 22 sampel serta penyelesaian pengujian yang lebih lama dikarenakan sampel tidak memenuhi syarat dan kondisi pandemic Covid-19 yang mengharuskan sebagian besar penguji WFH (terutama pada periode Juli – Agustus 2021). Jumlah sampel pangan yang diuji tidak sesuai standar timeline banyak menyumbang penurunan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam setahun laboratorium Pangan melakukan verifikasi metode analisis sebanyak minimal 12 metode analisis.
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk

menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.

- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan melakukan berbagai kegiatan sebagaimana dijelaskan pada butir f secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan capaian persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar akan semakin meningkat dan mencapai 100% pada akhir RPJMN tahun 2024.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah

analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	96,42%	96,42%	146.664.900	139.229.644	94,93%	1,02	0,02	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.02 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien.

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2}{2}$$

$$NPS = \frac{90.85\% + 96.42\%}{2}$$

$$NPS = 93.64\%$$

Dengan NPS 93.64%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil dalam mencapai sasaran meningkatnya efektivitas

pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

22. Tingkat Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 22. Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI SI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Tingkat Persentase keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	54	58,61	108,54	Baik

Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 adalah **melebihi target** yang ditetapkan yakni sebesar **108,54%** atau tingkat keberhasilan **58,61**. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan dengan target 2021 yakni sebesar **54,00**. Berdasarkan nilai perbandingan tersebut, kinerja terkait indikator meningkatnya efektivitas penindakan

obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta **telah berhasil** dicapai dengan kriteria "**baik**".

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara]

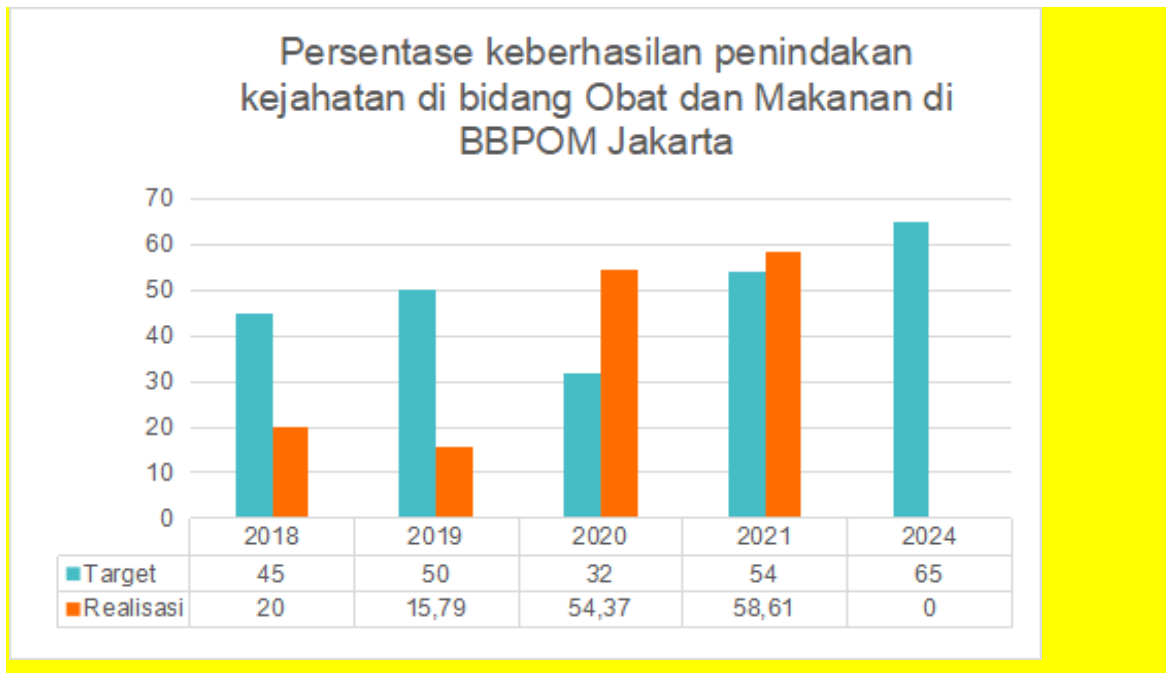
Nilai Tingkat Keberhasilan:

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

b. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018-2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

BADAN POM



Gambar 48. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target akhir periode Renstra RPJMN 2020 – 2024

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dan 2020 adalah terdapat peningkatan capaian dari **54,37** di tahun 2020 menjadi **58,61** di tahun 2021. Peningkatan kinerja sebesar ini sebagai hasil dari proses penyidikan mulai dari SPDP tahun 2021 hingga penyelesaian berkas perkara carry over yang diselesaikan di tahun 2021. Terkait data realisasi tahun 2018 dan 2019 tidak dapat disandingkan dengan data tahun 2020 dan 2021. Indikator kinerja utama pada kedua periode ini, periode 2018-2019 dan periode 2020-2021, berbeda dalam hal perhitungan capaian kinerjanya. Pada periode 2018 dan 2019, penilaian keberhasilan penindakan berdasarkan perhitungan persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2. Namun jika

perbedaan metode perhitungan tersebut diabaikan, maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kinerja penindakan terus meningkat.

Pada tahun 2021 ini, capaian Kelompok Substansi Penindakan adalah menangani 6 (enam) perkara sesuai target. Adapun tahapan dari keenam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

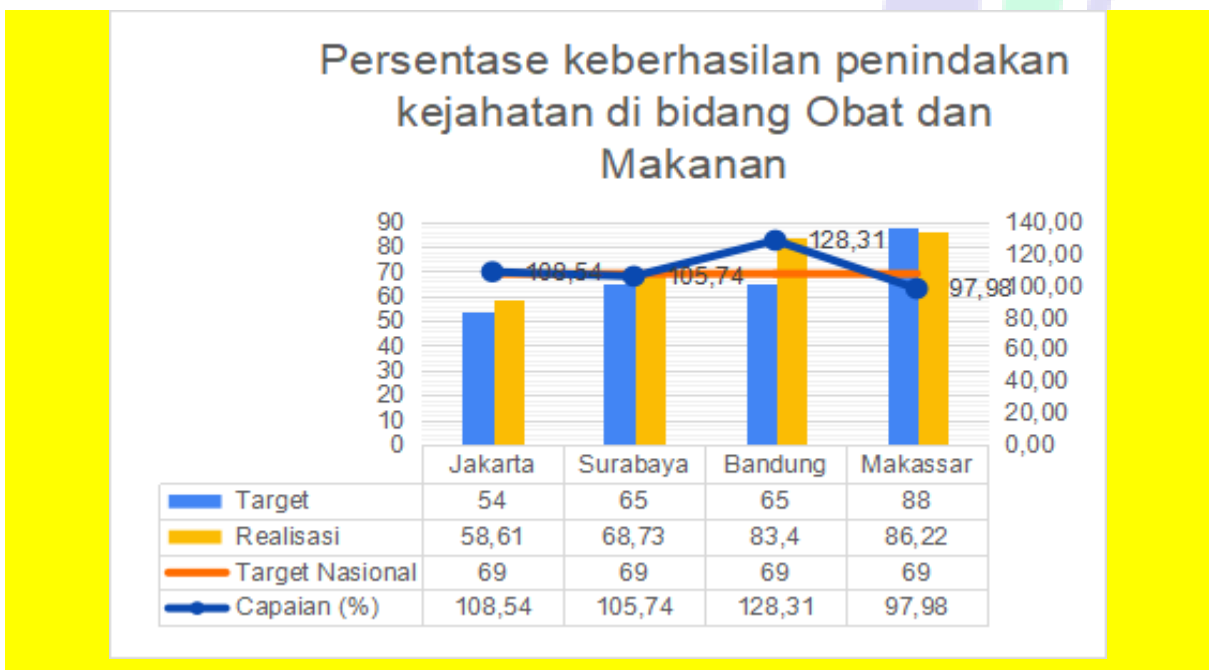
- 2 (dua) perkara berada di tahap SPDP,
- 3 (tiga) perkara tahap 1 atau penyerahan berkas kepada Jaksa, dan
- 1 (satu) perkara telah selesai tahap 2 atau telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa.

Perbandingan capaian indikator kinerja selama 4 (empat) tahun terakhir terlihat pada gambar 1. Terdapat kenaikan target tahun 2021 dibanding dengan target tahun 2020. Target ini terus meningkat hingga tahun 2024 yang merupakan akhir periode Renstra RPJMN 2020 - 2024.

c. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini dibandingkan antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Makassar. Perbandingan kinerja juga dibandingkan dengan target nasional yakni sebesar 65,00. Kinerja 4 (empat) UPT ini disajikan pada gambar 2 berikut. Berdasarkan realisasi tersebut, diketahui bahwa capaian Balai Besar POM di Jakarta,

Surabaya dan Makasar adalah **baik** sedangkan capaian Balai Besar POM di Bandung **tidak dapat disimpulkan (>120%)**. Target yang ditetapkan untuk Balai Besar POM di Jakarta lebih kecil jika dibandingkan dengan 3 (tiga) UPT yang lain maupun target nasional. Penetapan target ini sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.01.02.2.21.07.21.326 tanggal 12 Juli 2021.



Gambar 52. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2021 dengan Balai lain.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisa terhadap keberhasilan Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target

meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Sinergi dengan *Criminal Justice System* (CJS) yang optimal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Penyidik PNS selalu melakukan sinergi dalam bentuk koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Pencapaian tahun 2021 ini merupakan hasil dari koordinasi yang baik dengan CJS yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara. Sebagai hasil dari koordinasi yang semakin optimal maka beberapa perkara tunggakan menunjukkan perkembangan ke arah penyelesaian perkara yang mempengaruhi indikator kinerja. Optimalisasi koordinasi dengan CJS ini berupa pelaksanaan gelar perkara maupun ekspose bersama antara PPNS dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta. Adanya koordinasi intensif ini berdampak pada kesepahaman antara penyidik dan jaksa dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap tindak pidana obat dan makanan yang ditangani.

2. Kerja sama lintas sektor lain secara intensif

Sejalan dengan meningkatnya sistem perdagangan secara daring melalui berbagai platform *e-commerce* maka terdapat potensi peningkatan kejahatan bidang obat dan makanan melalui sistem perdagangan tersebut. Penanganan perkara sampai dengan akhir tahun 2021 juga didominasi oleh temuan pelanggaran kejahatan obat dan makanan secara daring.

Untuk memperkuat pengawasan dalam ranah perdagangan daring tersebut maka dijalin kerja sama dengan lintas sektor terkait penyedia layanan *e-commerce* atau *marketplace* antara lain PT. Shopee International Indonesia dan PT. Tokopedia. Kerja sama ini terjalin semakin intensif sehubungan dengan permintaan keterangan sebagai saksi yang dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian pemenuhan unsur pasal yang disangkakan dalam perkara pidana obat dan makanan.

3. Monitoring dan evaluasi penanganan perkara yang optimal

Capaian tahun 2021 ini juga merupakan hasil dari implementasi monitoring dan evaluasi penanganan perkara yang optimal. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bukti komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan perjanjian kinerja yang disepakati pada awal tahun anggaran.

Kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin juga dilakukan bersama dengan Direktorat Penyidikan BPOM dalam menangani semua perkara yang ditangani PPNS Balai Besar POM di Jakarta. Hal ini berdampak cukup signifikan dalam menyelesaikan perkara tunggakan.

4. Kompetensi PPNS yang terus meningkat

Setiap tahun diadakan peningkatan kompetensi PPNS baik melalui pengembangan kompetensi formal seperti pelatihan, *workshop*, maupun informal melalui diskusi intensif dengan ahli atau narasumber yang kompeten. Upaya peningkatan kompetensi PPNS ini sangat dibutuhkan mengingat proses penanganan perkara yang sangat dinamis.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam mewujudkan capaian kinerja, kegiatan yang dilakukan merupakan serangkaian kegiatan sejak pengumpulan informasi hingga penyelesaian perkara. Kegiatan ini melibatkan peran aktif seluruh personil di Kelompok Substansi Penindakan. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Operasi intelijen dan patroli siber

Kedua kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi, pendalaman informasi, upaya memperoleh bukti permulaan yang cukup, dan berperan pula dalam pengungkapan atau deteksi setelah kegiatan penindakan dilakukan.

Modus kejahatan obat dan makanan di tengah berlangsungnya pandemi Covid-19 ini terus berkembang. Cara-cara konvensional mulai digeser dengan yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Kondisi ini membuat tim intel dan siber terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sehingga bisa terus berkinerja.

2. Kegiatan verifikasi lartas obat dan makanan melalui pos (Laron Baja) dalam fungsi cegah tangkal

Kegiatan verifikasi barang kiriman untuk keperluan pribadi melalui jasa kiriman pos internasional masih terus dilakukan. Program ini berdampak secara tidak langsung dalam keberhasilan pencapaian kinerja. Memasuki tahun kedua implementasinya, program Laron Baja dirasakan makin berdampak pada upaya cegah tangkal peredaran obat dan makanan ilegal selama pandemi Covid-19.

Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut pengawasan barang kiriman, antara lain dengan deteksi dini peredaran barang

pribadi untuk kepentingan komersial melalui *marketplace* dan sosialisasi batasan atau ketentuan yang berlaku.

3. Gelar perkara

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan koordinasi merupakan kegiatan yang berdampak langsung dalam pencapaian target kinerja. Gelar perkara merupakan program atau kegiatan koordinasi yang dilakukan secara rutin dan intensif. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan rekomendasi tahun 2020 bahwa perlu dilakukan intensifikasi koordinasi dengan lintas sektor maupun CJS terkait. Hal ini penting dilakukan karena penanganan/penyelesaian perkara tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh PPNS. Faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain: adanya petunjuk jaksa, perlu pemastian keberadaan saksi/tersangka, pemeriksaan ahli dari pihak eksternal.

Disamping itu, perhitungan indikator kinerja mencakup perhitungan penyelesaian perkara tahun berjalan dan perkara tunggakan/*carry over*. Proses penyelesaian perkara ini membutuhkan koordinasi dengan lintas sektor atau CJS terkait. Hasil dari rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan koordinasi yang semakin optimal sehingga berdampak pada penyelesaian perkara tunggakan yang mengarah pada

penyelesaian perkara. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi indikator kinerja tahun 2021.

Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan bahwa peningkatan efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan merupakan hasil dari upaya komprehensif kegiatan intelijen hingga penyidikan perkara. Terlepas dari dinamika yang terjadi khususnya dalam perubahan struktur organisasi pada Deputi Bidang Penindakan BPOM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya penyesuaian dan peningkatan kompetensi personel kelompok substansi penindakan terus dilakukan.

Berkenaan dengan persentase capaian kinerja, maka telah dilakukan pula revisi target kinerja dengan justifikasi hasil capaian kinerja tahun 2020 sebesar 54,37%. Dengan capaian kinerja tersebut serta pertimbangan faktor lingkungan strategis yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini target kinerja disesuaikan menjadi 54%.

Untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang, diperlukan upaya strategis untuk menyelesaikan tunggakan perkara yang masih tersisa. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah menyusun perencanaan kegiatan terhadap target dengan sistematis dan realistis. Situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung juga perlu menjadi faktor yang diperhitungkan dalam pencapaian kinerja mengingat pandemi ini berdampak terhadap sistem kerja personil. Selain itu, koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait tetap harus dioptimalkan.

g. Analisis terhadap penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran diperoleh dari indeks efisiensi dikurangi dengan standar efisiensi (1). Sedangkan indeks efisiensi merupakan hasil pembagian dari output terhadap input.

Pada tahun 2021 hasil penilaian tingkat efisiensi anggaran di Kelompok Substansi Penindakan adalah sebesar **0,09** atau capaian masuk ke dalam kategori **efisien (100%)**. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang sudah optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2021.

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54%	58,61%	108,54 %	1.042.636.000	1.042.404.417	99,98%	1,09	0,09	100%

Penggunaan anggaran untuk output perkara di bidang obat dan makanan sebesar Rp 544.808.639,- dari total anggaran Rp 545.034.000,- (99,96%) sementara dari output laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan telah digunakan sebesar Rp 497.595.778,- dari total anggaran Rp 497.602.000,- (99,99%). Realisasi penggunaan anggaran Kelompok Substansi Penindakan sebanyak Rp 1.042.404.417,- atau sebesar 99,98% dari total anggaran Rp 1.042.636.000,-.

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya telah terlaksana sesuai rencana secara efektif dan efisien. Capaian ini merupakan modal positif untuk melanjutkan kinerja di tahun berikutnya

Dari pencapaian 1 target indikator pada sasaran strategis 7, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasaraannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI}{1}$$

1

$$NPS = \frac{108.54}{1}$$

1

$$NPS = 108.54\%$$

Dengan NPS 108.54%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

23. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 23. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	REALISASI 2021%	REALISASI
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82.4	82.29	99.87	Baik

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM

Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

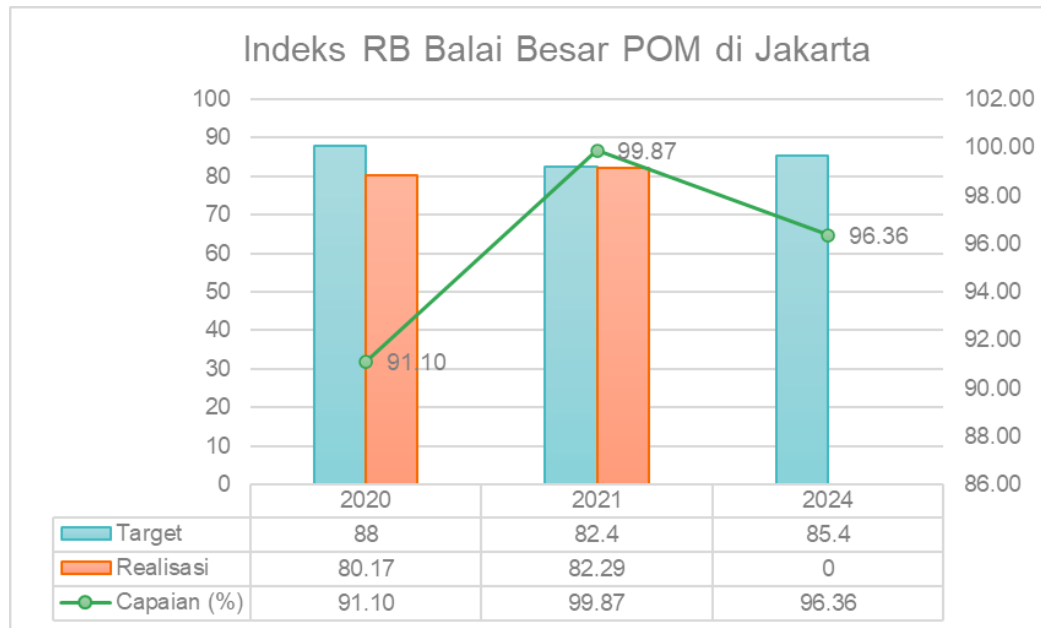
Nilai indeks dihitung dari Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil. Penilaian indeks RB

dilakukan oleh Inspektorat Utama pada akhir tahun. Hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PENILAIAN		Nilai	%	Keterangan	
PROSES (60)					
A.	I. MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	7,53	94,13%	MS	
	II. PENATAAN TATALAKSANA (7)	6,00	85,71%	MS	
	III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	8,05	80,54%	MS	
	IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	9,38	93,75%	MS	
	V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)	12,75	85,00%	MS	
	VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	9,35	93,49%	MS	
TOTAL PENGUNGKIT		53,06		MS	
HASIL (40)					
B.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	19,14	96%	MS	
	I.	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	14,25	95,00%	MS
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	4,89	97,85%	TMS
	II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	18,90	95%	MS
	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (15)	18,90	94,50%	MS	
TOTAL HASIL		38,04			
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		91,10			

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi selanjutnya dikonversi dengan konstanta 0.834 sesuai dengan rata rata penilaian KemenPANRB dengan BPOM, sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 adalah sebesar 82.29 dengan capaian terhadap target adalah 99.87% dengan kriteria

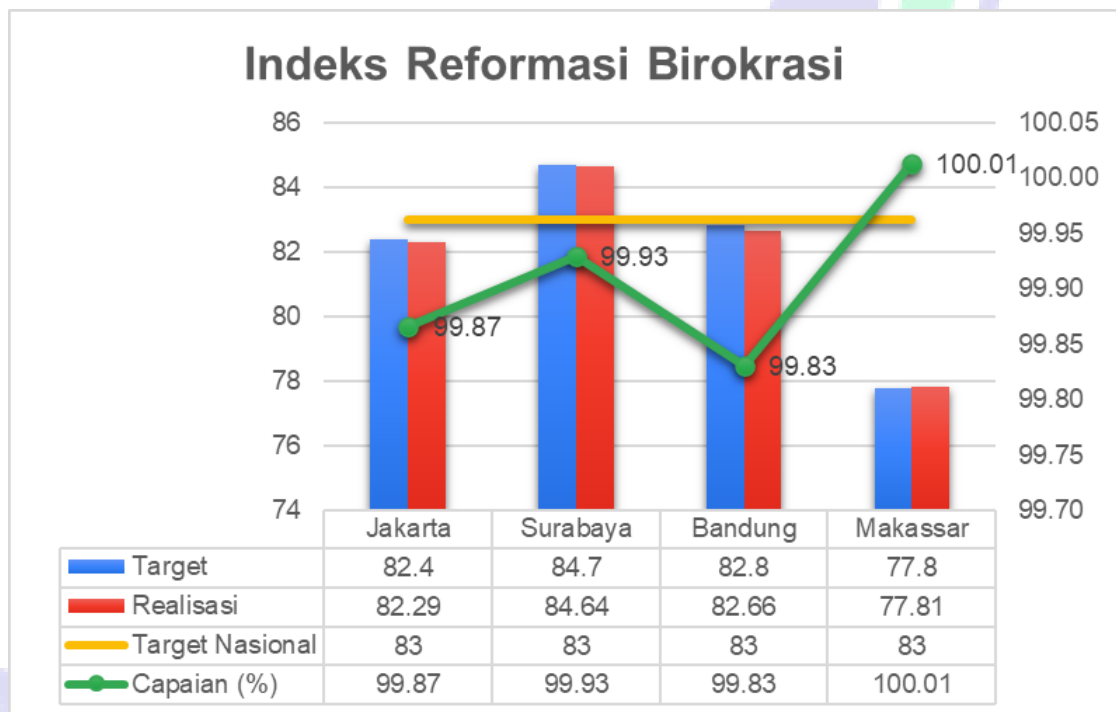
b. Perbandingan realisasi dan capaian 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024



Nilai Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang ditetapkan pada tahun 2020, sehingga perbandingan digambarkan pada tahun 2020 dan 2021. Terdapat penyesuaian target Indeks RB, sesuai dengan Reviu Renstra yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.11A5.12.21.13478 tanggal 18 November 2021 dari target 90 menjadi 82,4. Nilai target penyesuaian ini disusun berdasarkan tren capaian dan *roadmap* Balai Besar POM di Jakarta. Terdapat kenaikan realisasi dan capaian target pada tahun 2021 yang membuktikan dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan zona integritas di Balai Besar POM di Jakarta. Kontribusi capaian tahun 2021 terhadap target akhir RPJMN pada 2024 adalah sebesar

96.3% dengan kriteria . Target 2024 sebesar 85.4 ditetapkan sesuai *roadmap* Balai Besar POM di Jakarta mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebelum RPJMN berakhir pada tahun 2024. Hal ini merupakan tindak lanjut capaian Wilayah Bebas dari Korupsi yang diraih Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 40. Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain.

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi dengan 3 Balai Besar menunjukkan bahwa Jakarta, Surabaya dan Bandung belum memperoleh capaian 100%. Sedangkan Makassar

berhasil memperoleh capaian 100,01%. Namun jika dibandingkan dengan Indeks RB target nasional sebesar 83 , Surabaya telah melampaui target dengan realisasi 84.64. Hal ini sepadan dengan capaian Balai Besar POM di Surabaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Tahun 2021. Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Bandung telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2020 dan 2021, sehingga capaian pada 2021 harus terus ditingkatkan untuk meraih target selanjutnya yaitu WBBM. Makassar yang telah meraih target yang ditetapkan tetap harus meningkatkan kinerja karena target 2021 masih jauh dibawah target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 belum melampaui target 100%, walaupun masih dalam kategori Baik. Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 (dua) hasil pengawasan eksternal yang Belum Sesuai Saran (BSS);
- 2) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, namun belum terhadap seluruh pelatihan;

- 3) Telah membuat inovasi penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai karakteristik unit kerja, namun belum menggambarkan implementasinya
- 4) Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pada seluruh area perubahan belum dilaksanakan secara memadai
- 5) Secara umum belum dilakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja.
- 6) Telah mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inovasi untuk peningkatan pelayanan publik namun belum terdapat replikasi dari unit kerja lain.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi diantaranya adalah :

- 1) Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan unit kerja. Terhadap pelaksanaan rencana kerja dilakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan;
- 2) Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari Agent of Change (AoC) bersama dengan Kepala Balai yang berperan sebagai role model perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi dan berhasil meraih

prestasi sebagai Agen Perubahan Terbaik Badan POM Tahun 2021;

- 3) Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain Laron Baja (Verifikasi Lartas Online Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), MONAS (Melindungi dan Mengawasi Anak Sekolah), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi Online), E-Book Sertifikasi (Pangan, CPOTB Bertahap, dan Kosmetik), Inovasi LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi Whatsapp), Inovasi Link Layanan Publik Terintegrasi (Infografis dan Akses di Media Sosial): linktr.ee/bbpomjkt dan Inovasi Kerling (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling Balai Besar POM di Jakarta)
- 4) Disamping mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga berhasil meraih predikat Pelayanan Prima pada tahun 2021, BBPOM di Jakarta telah menetapkan Standar Pelayanan unit kerja dan mengimplementasikan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan. Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,78 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,8 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB
- 5) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Maret 2021, sehingga implementasi yang dinilai sampai dengan triwulan 1 Tahun 2021. Oleh karenanya nilai yang didapat belum optimal. Menindaklanjuti hal ini, saran perbaikan yang disampaikan tim penilai telah dilaksanakan. Selain itu program dan

rencana aksi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pada tahun 2021 telah seluruhnya dievaluasi dan dilaksanakan tindak lanjutnya sehingga diharapkan Nilai PMPZI tahun 2022 dapat meningkat.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Rekomendasi perbaikan kinerja terkait pada tahun 2020 adalah monitoring kinerja yang dilakukan secara lebih komprehensif dan optimalisasi kegiatan secara daring agar kondisi pandemi tidak menghambat capaian kinerja. Terhadap hal ini telah dilaksanakan kegiatan terkait penguatan Zona Integritas dalam rangka mendukung nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM baik kepada internal maupun eksternal (stakeholder) melalui berbagai media informasi
- 2) Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional (SIPT, SPIMKER, SIASN, SIMAK, SIRUP, e-planning, e-performance, dll)
- 3) Penerapan Program *Fraud Control Plan* pada Manajemen Risiko

- 4) Program-program Inovasi seperti Kerling (Kegiatan sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling), Sultan Betawi (Loket Mal Pelayanan Publik) serta pemanfaatan media sosial untuk layanan publik melalui penyampaian informasi melalui media sosial seperti ARIPIN (Asupan Rabuan Pintar),
- 5) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop untuk meningkatkan kompetensi dan menguatkan internalisasi RB kepada seluruh pegawai. Dengan telah diraihnya predikat WBK pada 2020, BBPOM di Jakarta menargetkan perolehan WBBM pada Tahun 2022. Oleh karenanya fokus kegiatan dilaksanakan untuk membangun pelayanan Prima melalui Sosialisasi UPP dan Pelayanan Prima tanggal 22-23 Juli 2021 dan Workshop UPP dan ICPA tanggal 26 dan 27 Agustus 2021
- 6) Perkuatan Komitmen Penegakan Zona Integritas menuju WBBM tanggal 27 Agustus 2021
- 7) Perkuatan Tata Laksana melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan tanggal 18 Oktober 2021, Awareness Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 tanggal 1 November 2021, Sosialisasi Sistem Penomoran Naskah Dinas tanggal 21 Desember 2021
- 8) Kegiatan Refleksi Satu Tahun Implementasi Wilayah Bebas Korupsi : Perkuatan dan Sinergisme menuju WBBM Tahun 2022 tanggal 22 November 2021

9) Capacity Building dalam Rangka Peningkatan Zona Integritas Menuju WBBM tanggal 25-26 dan 30 November 202

10) Prestasi yang berhasil diraih oleh Balai Besar POM di Jakarta yang mendukung Indeks Reformasi Birokrasi adalah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021, Agen Perubahan Terbaik Badan POM Tahun 2021, Pemenang Kedua Lomba Inovasi Pelayanan Publik Badan POM Tahun 2021 dan Raksa Nugraha Award Kategori Gold untuk Indonesia Consumer Protection Award Tahun 2021.

Alternatif solusi yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal secara berkala melalui aplikasi SAPA API

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelatihan yang diselenggarakan selama tahun 2021

Melakukan monitoring implementasi inovasi penerapan aturan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku berupa surat pernyataan disiplin (Ikrar Mantan Telatan) selama tahun 2021

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh area perubahan dan melaksanakan tindak lanjutnya melalui link pemantauan Mpok Siti (Monev dan Tindak Lanjut Program ZI)

Eskalasi inovasi Laronbaja pada menu E-BPOM

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target tingkat Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82.4	82,29	99,87	352.105.500	351.412.715	99,80%	1	0.00	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

24. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 24. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERI A
-------------------	-------------------	-----------	------------------------	-----------

Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	79,1	79,85	100,95	Baik
---------------------------------------	------	-------	--------	-------------

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:

- a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
- b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:

- a. Pemenuhan pengukuran (5%)
- b. Kualitas pengukuran (12,5%)
- c. Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 25. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Rentang nilai evaluasi AKIP pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

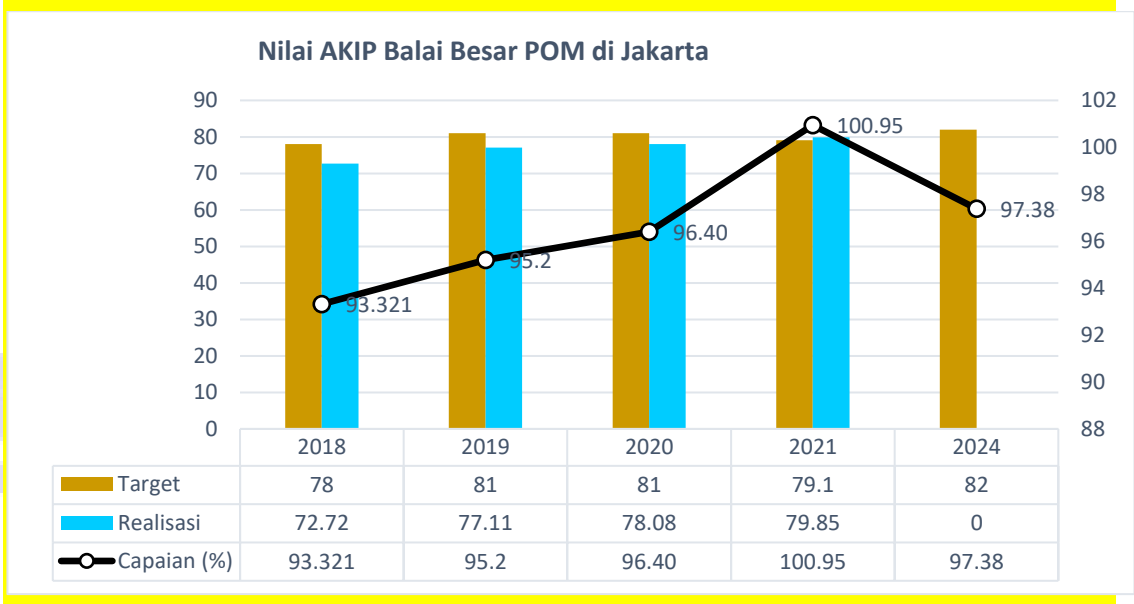
- (1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- (2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- (3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- (4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- (5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- (6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- (7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Pada tahun 2021, nilai AKIP BBPO di Jakarta berhasil mencapai target, realisasi 79,85 dengan target 79,1 sehingga diperoleh capaian kinerja 100,95% dengan kategori "BAIK". Berdasarkan kriteria penilaian SAKIP, nilai tersebut

termasuk dalam kategori nilai BB (Sangat Baik) sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Jakarta akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2018-2020 target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

BBPOM Jakarta berupaya mencapai target jangka menengah tersebut dengan mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Indikator AKIP BBPOM Jakarta ini mendukung Indikator AKIP Badan POM pada sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang efektif”.

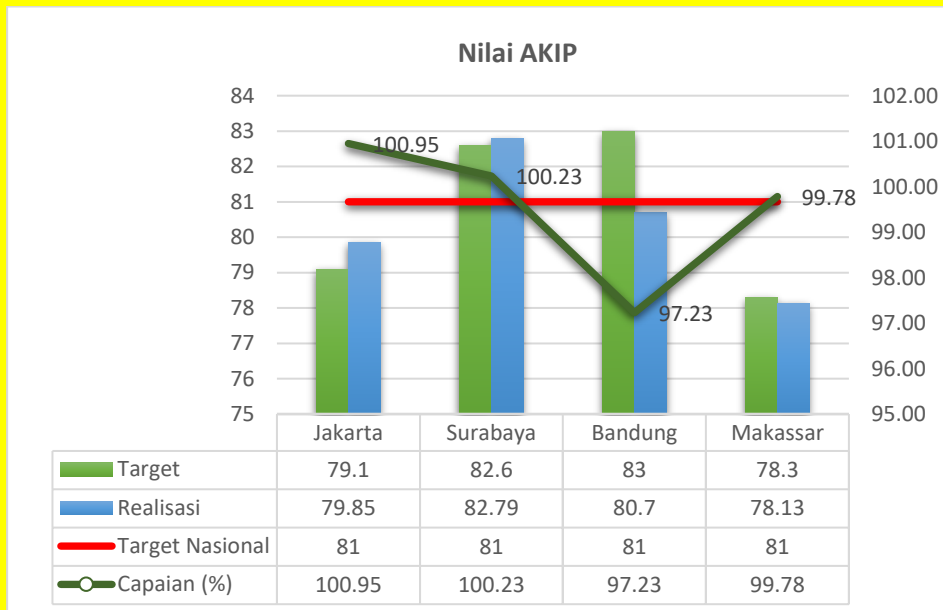


Gambar 53. Realisasi Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2018-2021

Berdasarkan grafik diatas, nilai AKIP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2018, dan berhasil mencapai target pada tahun 2021. Demikian juga halnya dengan capaian nilai AKIP. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM Jakarta berkomitmen untuk selalu mencapai target akuntabilitas kinerja.

Pada akhir periode Renstra RPJMN 2020-2024, target nilai AKIP ditetapkan 82. Bila realisasi nilai AKIP 2021 dibandingkan dengan target tahun 2024 tersebut, nilai capaian indikator adalah 97,38 dengan kategori “BAIK”.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 54. Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain.

Nilai AKIP tertinggi dicapai oleh BBPOM di Surabaya dengan nilai 82,79 dan berturut-turut BBPOM Bandung, BBPOM Jakarta dan BBPOM Makassar. Nilai AKIP yang melampaui target nasional hanya BBPOM di Surabaya. Secara umum, SAKIP BBPOM Surabaya dan BBPOM Bandung dinyatakan “MEMUASKAN” (nilai A), sedangkan BBPOM Jakarta dan BBPOM Makassar memperoleh kategori “SANGAT BAIK” (nilai BB).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 dibandingkan dengan 2021, terdapat peningkatan pada nilai perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja.

Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,86	26,74
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,38	19,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,94	13,56
d.	Evaluasi Internal	10	7,64	6,41
e.	Capaian Kinerja	20	13,26	13,76
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,08	79,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sedangkan pada komponen pengukuran kinerja nilai tetap dan terjadi penurunan pada komponen evaluasi internal. Secara rinci, hasil penilaian SAKIP BBPOM di

Jakarta tahun 2021 terhadap komponen dan subkomponen penyusunnya sebagai berikut:

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		Unit	
			Y	NILAI
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	89.13%	26.74
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	89.38%	8.94
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	100.00%	2.00
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	93.75%	4.69
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	75.00%	2.25
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	89.00%	17.80
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	100.00%	4.00
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	90.00%	9.00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6.00	80.00%	4.80
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	77.50%	19.38
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5.00	93.75%	4.69
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12.50	77.50%	9.69
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7.50	66.67%	5.00
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	90.43%	13.56
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3.00	100.00%	3.00
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7.50	92.86%	6.96
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4.50	80.00%	3.60
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	64.10%	6.41
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2.00	85.50%	1.71
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5.00	64.00%	3.20
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3.00	50.00%	1.50
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	68.81%	13.76
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7.50	60.00%	4.50
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12.50	185.23%	9.26
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	79.85 %	79.85

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, hal-hal yang berhasil meningkatkan nilai AKIP yaitu:

1) Perencanaan

- a. Adanya review renstra dan target kinerja dilengkapi dengan kertas kerja exercise yang mencakup baseline/ data capaian periode lalu
- b. Tersedia rencana aksi yang mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan
- c. Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta periode 2020-2024 yang direviu secara berkala dan dipublikasikan pada website Badan POM
- d. Monitoring rencana Aksi mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan serta rincian anggaran untuk memastikan bahwa program/ kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan
- e. Capaian target kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dan dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward)

2) Pengukuran

- a. Terdapat sistem pengumpulan data kinerja secara online melalui SI Pitung Kinerja yang dilengkapi dengan SOP Mikro, dan SK Tim Penanggungjawab
- b. Target kinerja Koordinator dan Sub Koordinator telah dimonitor dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

3) Pelaporan

- a. Adanya analisis terhadap penggunaan sumber daya dan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja
- b. Adanya analisis capaian indikator kinerja dan rekomendasinya

4) Evaluasi internal

- a. Laporan Kinerja Interim menyajikan informasi pencapaian kinerja, analisis mengenai capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan.
- b. Hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

5) Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2021 lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2020

Sedangkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai AKIP pada periode selanjutnya adalah:

- a) Melaksanakan cascading indikator kinerja sampai dengan level individu selaras dengan indikator kinerja unit kerja.
- b) Mekanisme bila terjadi kesalahan data belum disosialisasikan kepada pihak yang terkait
- c) Laporan Kinerja mencantumkan perbandingan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan target akhir periode renstra yaitu tahun 2024 serta perbandingan realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding dengan IKU Badan POM
- d) Peningkatan keandalan data kinerja yang disajikan sehingga mampu telusur dan andal serta dilengkapi dengan data dukung yang tepat

- e) Penggunaan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja
- f) Melengkapi notulen evaluasi internal dengan pembagian PIC dan timeline penyelesaiannya serta rencana aksi serta simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target AKIP yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Dokumen yang telah dilaporkan tepat waktu pada tahun 2021 meliputi dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen RKAKL/DIPA tahun 2021, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Interim 1, 2 3 dan 4 Tahun 2020.
2. Pelaksanaan kegiatan monev secara tepat waktu melalui beberapa aplikasi yaitu BOC, RHPK, SMART DJA, Bappenas dan e-performance. Ketepatan waktu pelaporan dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf Balai Besar POM di Jakarta, perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua poksi hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat, ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya tim evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing poksi, kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran,

keuangan, dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

3. Rapat evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala setiap bulan dalam rangka monitoring capaian kinerja dan merumuskan tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja
4. Program pengumpulan data kinerja online melalui SI-pitung Kinerja secara konsisten setiap bulan
5. Adanya SK Pedoman Penilaian Kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)*

Rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun 2020 telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan telah berdampak terhadap kenaikan nilai AKIP, yaitu:

1. Mempublikasikan Renstra 2020-2024 pada website BPOM dan subsite Balai Besar POM di Jakarta
2. Melengkapi kertas kerja dengan justifikasi penetapan target kinerja dengan penjelasan tren kenaikan/penurunan
3. Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar untuk pemberian reward/punishment
4. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja serta penanggungjawabnya
5. Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan

target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasikan perbaikan

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) antara lain anggaran. Berikut adalah Analisa efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target nilai AKIP di BBPOM Jakarta:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai AKIP	79,1	79,85	100,95	430.407.500	429.893.014	99,88	1,01	0,01	100%

Berdasarkan tabel tersebut, nilai tingkat efisiensi adalah 0,01 dengan capaian 100% dan termasuk dalam kategori “ Efisien”. Artinya, anggaran yang dialokasikan untuk indikator nilai kinerja anggaran telah berhasil melampaui target indikator tersebut. Selain itu, SDM juga sudah dimanfaatkan dalam pencapaian target nilai AKIP, dengan memberdayakan personil perwakilan dari masing-masing kelompok substansi dalam mengawal pelaporan kinerja sehingga pelaporan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 8, maka belum dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{99,87\% + 100,95\%}{2}$$

$$\text{NPS} = 100,41\%$$

Dengan NPS 100,41%, maka Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil dalam mencapai sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Jakarta yang optimal.

Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

25. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 26. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84.25	84.7	100.53%	Baik

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta pada Tahun 2021 dilakukan menggunakan kertas kerja yang telah disiapkan oleh Biro Umum dan SDM serta diinput kedalam aplikasi IP-ASN yang terintegrasi dengan data-data kepegawaian yang terdapat

dalam Sistem Informasi ASN (SIASN).

IP-ASN BPOM

Dashboard

Persiapan Data

Cut Off Data

Cut Off Data 2021

List Cut Off Data

Total Nilai IP : 10090 / 119 = 84.79

NILAI IP BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Nilai Rata - Rata Kompetensi	Nilai Rata - Rata Kinerja	Nilai Rata - Rata Disiplin	Nilai Rata - Rata Kualifikasi
SLTA Kejuruan	8	40	25	5	5
SLTA Umum	3	40	25	5	5
D1	2	40	25	5	5
D3	21	40	25	5	10
S1	31	40	25	5	15
Profesi	45	39.33	25	5	20
S2	9	36.67	25	5	20

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

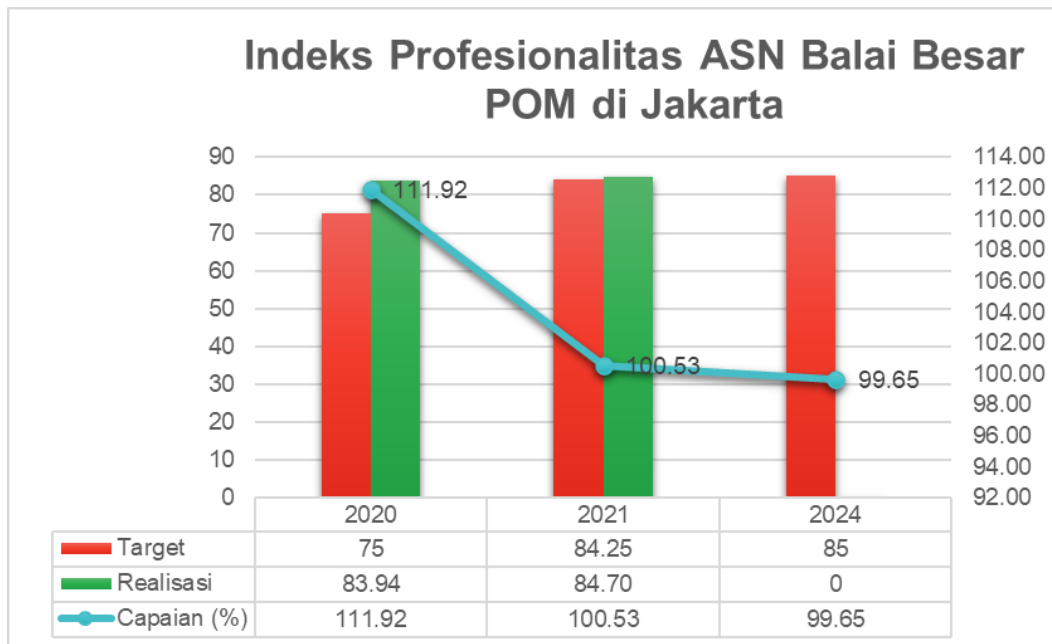
- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 adalah 84.70 dengan kategori tingkat profesionalitas ASN tinggi. Nilai ini telah melebihi rata rata Nasional Indeks Profesionalitas Badan POM Tahun 2021 sebesar 84.23 serta telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 84,25, sehingga diperoleh capaian sebesar 100.53% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

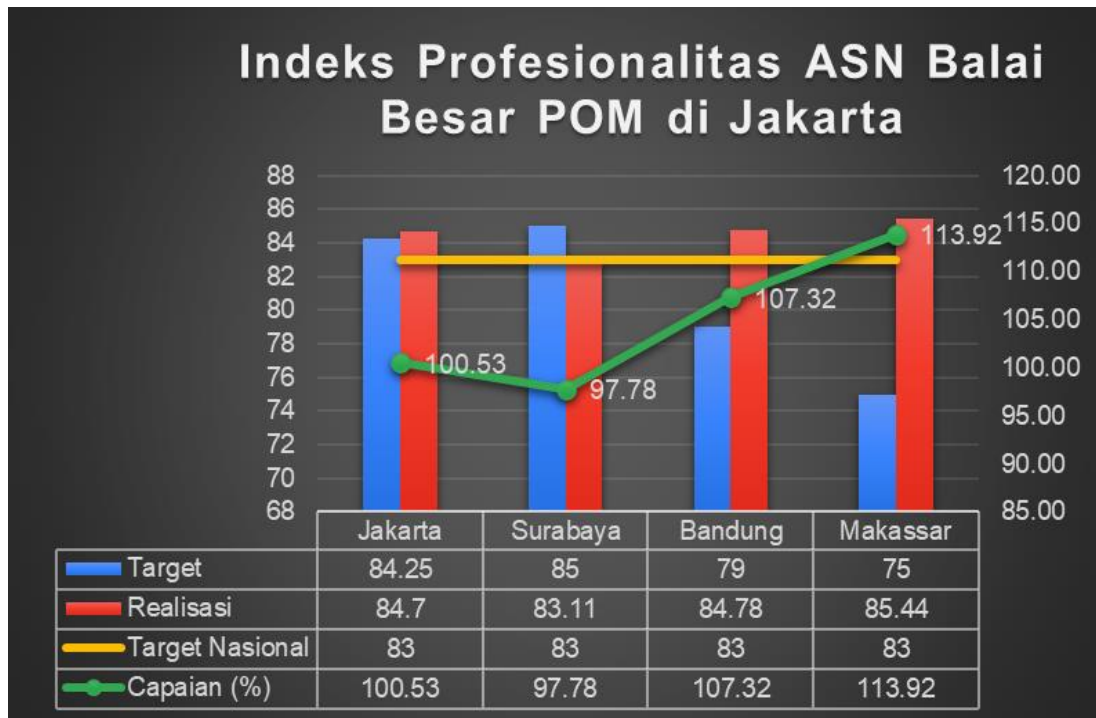
Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 memperoleh nilai 84.70, meningkat 0.76 poin dari tahun 2020. Pada reviu renstra Tahun 2021, target IP disesuaikan dengan baseline dan tren capaian serta pemetaan dimensi pegawai secara aktual dari target 75 menjadi 84.25. Capaian pada tahun 2020 sebesar 111.92 sedangkan Capaian pada tahun 2021 sebesar 100.53%, hal ini dikarenakan perbedaan penetapan target di tahun 2020 dan 2021 yang signifikan dan Capaian di tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan.

BADAN POM



Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 berkontribusi terhadap 99.65% target pada akhir RPJMN. Perlu dilakukan reviu kembali terhadap target Tahun 2024 sebesar 85 agar tidak terjadi capaian lebih dari 120% (kategori tidak dapat disimpulkan). Hal ini dikarenakan terus dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN sehingga diperkirakan target 85 dapat tercapai sebelum Tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan balai setara lainnya dan target nasional dan target nasional



Gambar 43. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN untuk Balai Besar POM di Jakarta dan UPT pembanding telah memperoleh kategori Baik dengan nilai lebih dari 100% kecuali untuk Surabaya. Realisasi dan capaian tertinggi diraih oleh Makassar dengan 85.44 dan 113.92%, diikuti Bandung dengan 84.78 dan 107.32%, Jakarta 84.7 dan 100.53% dan Surabaya dengan 83.11 dan 97.78%. Realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dan tiga balai lainnya telah melampaui target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 dapat mencapai target dikarenakan Balai Besar POM di Jakarta terus berupaya meningkatkan dimensi penilaian Indeks Profesionalitas, diantaranya :

1. Pada Dimensi kompetensi, telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan terhadap peningkatan kompetensi teknis kepada seluruh pegawai untuk memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahunnya. Melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, dapat dilakukan antisipasi bagi pegawai yang belum memenuhi 20 JP pada tahun berjalan untuk diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kompetensi baik dari internal maupun external Badan POM. Selain itu, telah dilakukan pemberian penugasan diluar tugas utama pegawai dari atasan langsung untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan sosial kultur.
2. Pada Dimensi Kinerja, dilakukan monitoring dan evaluasi pengisian catatan SKP kepada seluruh pegawai secara berkala setiap semester serta melakukan pemantauan peningkatan kinerja pegawai melalui evaluasi pencapaian sasaran kinerja pegawai yang dilakukan setiap triwulan kepada seluruh pegawai BBPOM di Jakarta, sehingga seluruh pegawai mendapatkan penilaian kinerja dengan kategori Baik.

Pada Dimensi Disiplin, telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kedisiplinan kehadiran dan penerapan kode etik PNS di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta. Pemberian *reward* dan *punishment* secara adil bagi pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai target Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2021 diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan bimtek/workshop/seminar secara rutin bagi seluruh pegawai sehingga dapat memenuhi jumlah minimal jam pelajaran yang dipersyaratkan yaitu 20 JP, khususnya bagi pegawai di Bagian Tata Usaha yang sebagian besar pegawai belum menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.
2. Mengusulkan diklat fungsional bagi pegawai yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu melalui pengangkatan pertama formasi CPNS dan belum mengikuti diklat fungsional, serta memberikan penugasan sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai upaya agar pegawai yang diusulkan diklat fungsional dapat mengikuti dan lulus diklat dengan baik.
3. Pada tahun 2021 tidak ada pegawai di Balai Besar POM di Jakarta yang dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat. Hal ini dikarenakan adanya inovasi untuk mengantisipasi pelanggaran disiplin yaitu inovasi IKRAR MANTAN TELATAN yaitu hukuman disiplin berupa monitoring yang lebih ketat terhadap pelanggaran disiplin dengan memberikan hukuman berupa penandatanganan surat pernyataan tidak mengulangi keterlambatan untuk pegawai yang melebihi 2.5 jam keterlambatan jam kerja tiap bulannya. Implementasi inovasi ini mencegah akumulasi pelanggaran disiplin pegawai di akhir tahun.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan dalam pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN yaitu pengembangan kompetensi kepada setiap pegawai dengan memenuhi sebanyak 20 Jam Pelajaran setiap tahunnya. Hal tersebut telah dilaksanakan di Tahun 2021 dengan monitoring dan evaluasi pencapaian jumlah jam pelajaran pengembangan kompetensi yang diikuti masing-masing pegawai. Selain itu, telah dilaksanakan pertemuan rutin seluruh pegawai setiap minggu dalam rangka sosialisasi, *sharing*, maupun penyampaian informasi terbaru dengan materi informasi yang berbeda beda dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN pada periode selanjutnya diantaranya:

1. Mendorong pegawai khususnya bagi pegawai dengan latar belakang pendidikan dibawah Sarjana/Diploma IV untuk dapat meningkatkan pendidikan formal melalui tugas belajar maupun ijin belajar serta melakukan pendampingan pada saat proses usulan tugas belajar maupun ijin belajar agar usulan memenuhi persyaratan dan dapat disetujui.
2. Mengikutsertakan pejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan POM.
3. Dikarenakan pada tahun 2021, perhitungan dimensi kompetensi bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan fungsional sebelumnya dan belum mengikuti diklat fungsional dilakukan menggunakan nilai profil kompetensi manajerial dan sosial kultur, maka perlu dilakukan *feedback* terhadap nilai pemetaan kompetensi manajerial dan sosial kultur bagi pegawai yang belum

atau kurang optimal. Dengan dilakukannya *feedback*, diharapkan dapat meningkatkan nilai kompetensi manajerial dan sosial kultur menjadi optimal.

4. Terjadinya perubahan peraturan terkait Disiplin terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, perlu dilakukan penyesuaian upaya pencegahan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan tersebut.
5. Terjadinya perubahan peraturan terkait Penilaian Prestasi Kerja Pegawai terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, perlu dilakukan penyesuaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja sesuai dengan peraturan tersebut.

g. Analisis atas efisiensi sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,25	84,7	100,53%	24.425.665.000	24.359.468.512	99,73%	1,01	0,01	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.01 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

Dari pencapaian 5 target indikator pada sasaran strategis 9, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI}}{1}$$

$$\text{NPS} = \frac{100,53}{1}$$

$$\text{NPS} = 100,53\%$$

Dengan NPS 100,53%, maka Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil dalam mencapai sasaran terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal.

Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 27. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar *GLP* tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar <i>GLP</i>	77	80.52	104.57	Baik

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar *GLP* adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (*GLP*) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

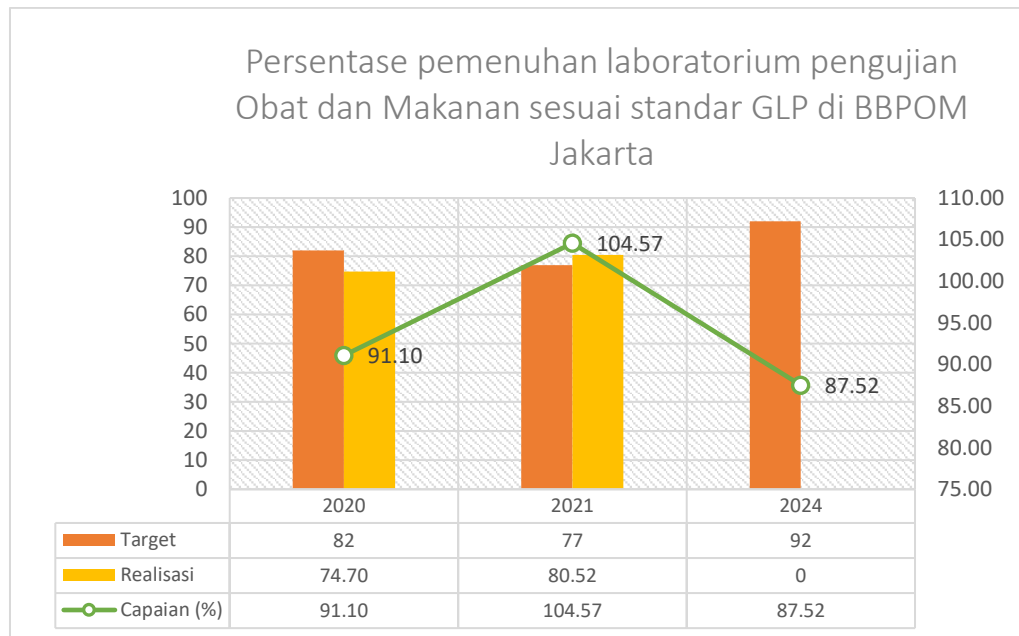
Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal *GLP* adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup ≥ 65 ,
- Standar Kompetensi personel laboratorium ≥ 75 ,
- Standar Alat Laboratorium ≥ 70

Persentase pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (*SKL*) pengujian Obat dan Makanan sesuai standar *GLP* sebesar 80,52%, melebihi target *SKL* BBPOM di Jakarta tahun 2021 sebesar 77%.

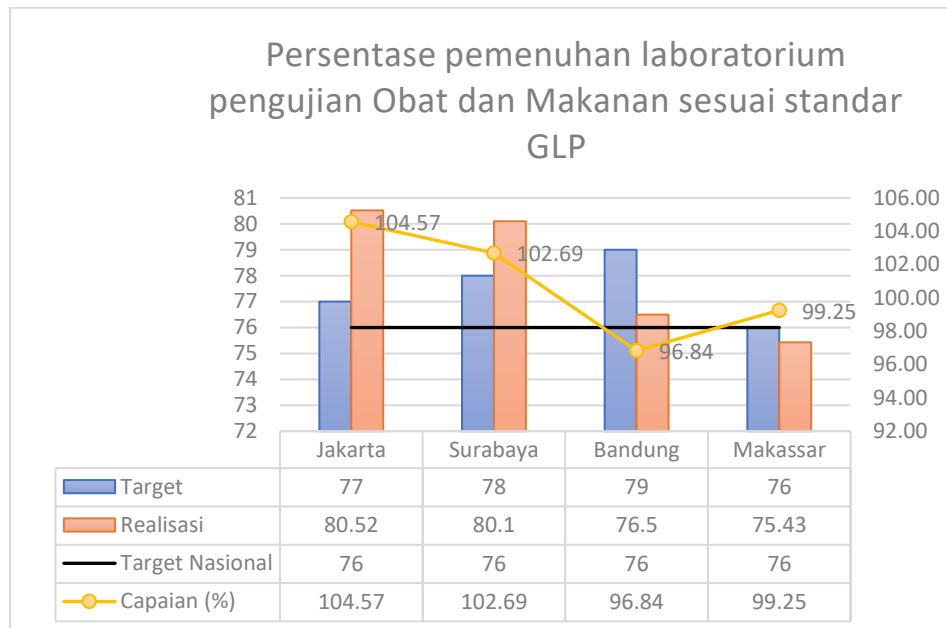
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 55. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2019-2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024.

Realisasi indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2021, berdasarkan hasil asesmen GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) di Balai Besar POM di Jakarta dengan realisasi 80.52% dan capaian sebesar 104.57%, nilai ini telah memenuhi target dengan kriteria “**Baik**”. Tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 13,47% jika dibandingkan dengan tahun 2020 (91,10%)

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 56. Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.

Berdasarkan gambar di atas diketahui target nasional sebesar 76%. Tahun 2021 realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP paling tinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta 80,52%, kemudian Balai Besar POM di Surabaya 80,1% Balai Besar POM di Bandung 76,5% dan Balai Besar POM di Makassar 75,43%. Semua Balai Besar POM kecuali Balai Besar POM di Makassar sudah memenuhi target nasional. Perbedaan target masing-masing Balai mempengaruhi capaian kerja. Semua Balai Besar POM memiliki capaian kerja dengan kriteria “Baik”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan penilaian kemampuan laboratorium yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), Balai Besar POM di Jakarta mendapat hasil penilaian untuk presentase pemenuhan standar ruang lingkup untuk obat dan makanan sebesar 77,65%, melebihi batas minimal yaitu 65%. Presentase pemenuhan standar kompetensi personel laboratorium sebesar 90,01%, melebihi batas minimal yaitu 75%. Presentase pemenuhan standar peralatan sebesar 73,9%, melebihi batas minimal sebesar 70%.

Masih rendahnya prosentase pemenuhan Standar Ruang Lingkup terutama disebabkan cukup besarnya jumlah zat aktif dan sediaan dalam Standar Ruang Lingkup Pengujian Obat Pengujian (mencapai 500 zat aktif dan sediaan), sementara sediaan yang tersampling jenisnya terbatas tidak bisa memenuhi semua jenis yang ada di Standar Ruang Lingkup. Selain itu untuk pemenuhan prosentase Standar Peralatan Balai Besar POM di Jakarta terdapat kendala keterbatasan tempat.

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis kosmetik, 12 metode analisis obat tradisional dan Suplemen Kesehatan, 12 metode analisis obat. 12 metode analisis Pangan dan 12 metode analisis Mikrobiologi Dengan kegiatan verifikasi Metode Analisis

ini diharapkan persentase pemenuhan ruang lingkup akan meningkat.

- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.
- Pada tahun 2022 ini telah dilaksanakan konsep Regionalisasi sehingga nantinya akan ada penyesuaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi dan Standar Peralatan, Diharapkan dengan adanya penyesuaian Standar tersebut capaian akan lebih baik

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis kosmetik, 12 metode analisis obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis obat. Dengan kegiatan verifikasi Metode Analisis ini diharapkan persentase pemenuhan ruang lingkup akan meningkat.
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin

peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya. Dengan terpeliharanya alat laboratorium maka akan mendukung pemenuhan terhadap standar peralatan. Pemanfaatan Alat laboratorium secara maksimal dan tepat untuk menjamin kelayakan alat laboratorium juga mendukung hal tersebut.

- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.
- Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase pemenuhan yang masih rendah adalah pemenuhan terhadap Standar Peralatan dan Standar Ruang Lingkup. Terhadap Standar Peralatan, kemungkinan kenaikan persentase pemenuhan standarnya terbatas agak sulit karena kondisi luas ruangan Laboratorium Balai Besar POM Jakarta kurang memungkinkan untuk penambahan jumlah alat sesuai standar. Sebagian pengadaan alat merupakan penggantian alat rusak. Jadi untuk tahun-tahun mendatang peningkatan persentase pemenuhan SKL harus difokuskan pada penambahan ruang lingkup pengujian melalui verifikasi metode analisis yang belum pernah dilakukan, ikut serta dalam Uji Profisiensi, mengadakan Uji Banding antar laboratorium dan bimbingan teknis internal dengan materi penerapan metode analisis baru.

Rekomendasi perbaikan kinerja tahun 2020 telah dilaksanakan di tahun 2021 yaitu perencanaan pengadaan baku pembanding, verifikasi metode analisis, pengadaan peralatan laboratorium dan pengembangan kompetensi personil yang lebih baik dan dilaksanakan lebih awal.

Untuk tahun selanjutnya rekomendasi tersebut harus tetap dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terpenuhinya standar GLP.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Jakarta tahun 2021

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77%	80,50%	104,55%	7.827.731.500	7.822.695.837	99,94%	1,05	0,05	100%

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.05 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien.

27. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 28. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal	2	2.475	123,75	Tidak dapat disimpulkan

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT terdiri dari 2 komponen, yaitu:

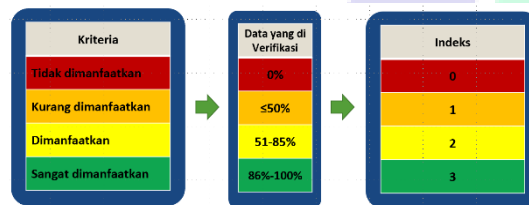
1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di *BCC (BPOM Command Centre)*

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem *BCC* yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. *BCC* adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan oleh UPT yaitu SPIMKer (Data Keracunan) dan SIPT. Data kasus keracunan diinput oleh rumah sakit maupun oleh BBPOM di Jakarta melalui aplikasi SPIMKer. Kemudian data tersebut diverifikasi oleh petugas BBPOM Jakarta dengan timeline 30 HK dari tanggal input aplikasi. Cara perhitungan data Spimker sebagai berikut:

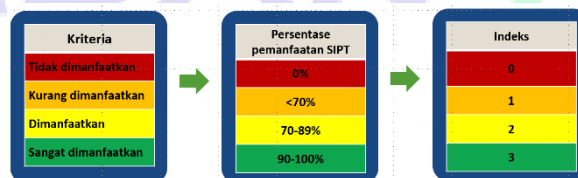
Spimker

$$= \frac{\text{Jumlah kasus keracunan yang diverifikasi sesuai timeline}}{\text{Jumlah kasus keracunan yang diinput}} \times 100\%$$



SIPT merupakan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu yang digunakan oleh BBPOM di Jakarta untuk melaporkan hasil pemeriksaan sampel, pengujian sampel dan pemeriksaan sarana kepada Badan POM secara online. Cara perhitungan data SIPT sebagai berikut

$$SIPT = \frac{\% \text{ pemeriksaan sampel} + \% \text{ pengujian sampel} + \% \text{ pemeriksaan sarana}}{3}$$



2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email, sharing folder, dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bagian/kelompok substansi maupun individu.

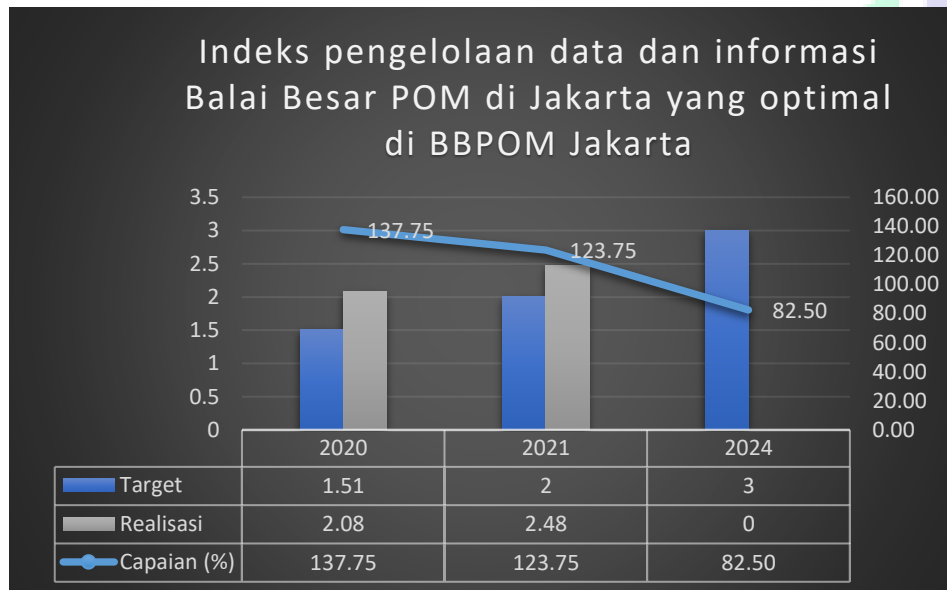
Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Badan POM dengan kriteria sebagai berikut:

2,26 – 3	: Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
0 – 0,75	: Sangat Kurang

Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta pada tahun 2021 adalah 2,48 melampaui target 2 sehingga diperoleh capaian 124% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi di BBPOM Jakarta telah dilakukan dengan optimal. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi mendukung Indikator Badan POM, yaitu Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) yang mendukung Sasaran 10 “Menguatnya laboratorium, riset analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan

egovernment dalam pengawasan Obat dan Makanan” pada *learning and growth perspective*.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

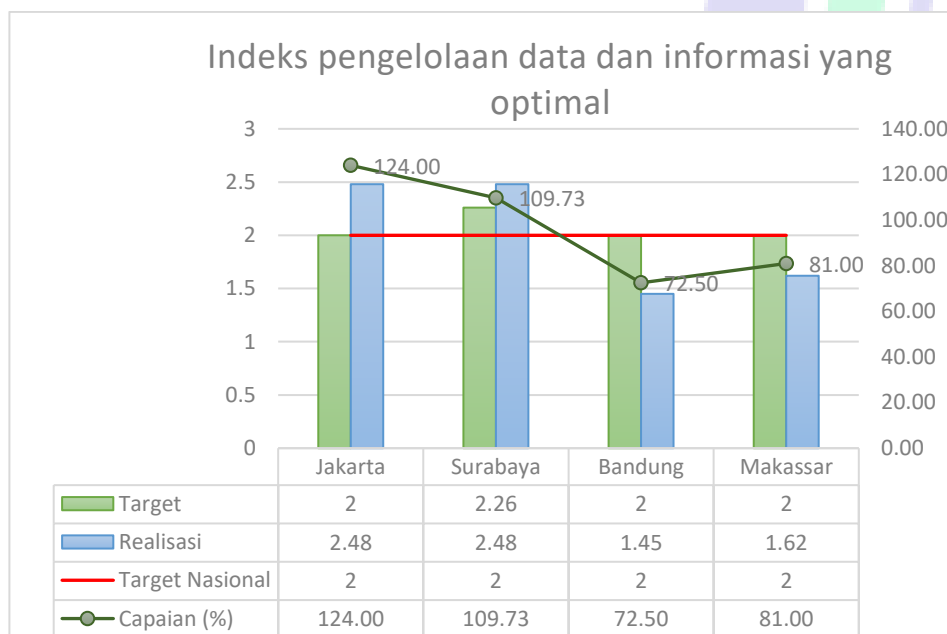


Indeks pengelolaan data dan informasi merupakan indikator yang ditetapkan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 dan 2021, BBPOM Jakarta berhasil melampaui target indeks pengelolaan data dan informasi. Realisasi Indeks tersebut pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta untuk terus meningkatkan pemanfaatan dan pemutahiran data dan informasi. Terdapat kenaikan target dari 2020 ke tahun 2021 sesuai dengan komitmen BBPOM di Jakarta untuk melaksanakan *continuous improvement* dalam pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik.

Pada akhir periode Renstra RPJMN 2020-2024, target indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta adalah 3.

Berdasarkan proyeksi, capaian indeks pengelolaan data dan informasi terhadap target tahun 2024 adalah sebesar 82,50% dengan kriteria CUKUP. Namun demikian, pada tahun 2024, BBPOM Jakarta optimis dapat mencapai nilai tersebut dengan memaksimalkan pemanfaatan BOC dan pemutahiran SIPT melalui sistem monitoring berkala.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 44. Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.

Pada tahun ini, indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Surabaya berhasil mencapai target, baik target UPT maupun target nasional. Nilai tersebut juga merupakan nilai tertinggi bila dibandingkan dengan nilai indeks BBPOM Bandung dan Makassar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemantauan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta dilakukan oleh Tim IT yang memiliki *job description* yang jelas dan tercantum dalam SK Tim IT. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indeks sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi 2,48 diperoleh dari penilaian komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi (50%):

- *Email* (12,5%) = 3
- Pemanfaatan BOC (12,5%) = 2
- *Sharing Folder* (12,5%) = 3
- Berita Aktual (12,5%) = 3

2. Indeks Data dan Informasi yang Dimutakhirkan (50%):

- Spimker (20%) = 3
 - SIPT (80%) = 2

Berdasarkan data tersebut nampak bahwa pemanfaatan email, *sharing folder* dan berita aktual serta pemutakhiran SPIMKER telah dilakukan secara optimal. Sedangkan pemanfaatan BOC dan pemutakhiran SIPT belum maksimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan SIPT dari versi 2 ke versi 3 sehingga SIPT baru dapat digunakan secara maksimal pada Triwulan III 2021. Selain itu, nilai pemanfaatan BOC pada Triwulan I 2021 cukup rendah sehingga berpengaruh terhadap nilai akhir tahun karena perhitungan indeks bersifat kumulatif.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, yaitu:

- Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di BBPOM Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi
- Program pemanfaatan email *corporate* secara berkala oleh setiap pegawai dalam pelaporan status kehadiran (WFO/WFH) setiap minggu telah berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara optimal
- Pemanfaatan *sharing folder* dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk. Pemanfaatan *sharing folder* sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks 3.
- Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita aktual/ bulan dengan masing-masing minimal 101 *viewer*/ berita aktual
- Verifikasi dan tindak lanjut petugas Aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal (3)
- Pendampingan Pusdatin dalam penggunaan fitur baru pada SIPT berkontribusi terhadap meningkatnya kompetensi pegawai dalam melakukan penginputan dan pemanfaatan SIPT
 - Pengadaan Alat Pengolah Data (APD) pada tahun 2021 juga turut mendukung pengawalan nilai indeks pengelolaan data dan informasi

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi internal Triwulan III pada tahun 2021 disimpulkan bahwa akar masalah belum tercapainya nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah kurangnya pemahaman Tim IT terhadap kriteria penilaian indeks tersebut dan belum dilaksanakan monitoring secara konsisten setiap bulan terhadap pencapaian indeks. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan nilai indeks pengelolaan data dan informasi, perlu dilakukan sosialisasi sehingga Tim IT memiliki pemahaman yang memadai terkait komponen penyusun indeks dan dapat menentukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan nilai indeks. Sosialisasi telah dilakukan pada awal Triwulan IV 2021 dan ditindaklanjuti dengan monitoring secara berkala terhadap seluruh komponen penyusun indeks pengelolaan data dan informasi hingga diperoleh kenaikan nilai indeks yang signifikan. Pada Triwulan III 2021 nilai indeks pengelolaan data dan informasi 1,825 dan meningkat menjadi 2,48 pada akhir tahun 2021 sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks pengelolaan data dan informasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			

indeks indeks pengelolaan data dan informasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	2	2.475	123.75%	315.548.000	314.560.000	99,69%	1.24	0.24	95%
--	---	-------	---------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	------------

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.024 dengan capaian tingkat efisiensi 95%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”.

Sasaran strategis 10 dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{104.55\% + 123,75\%}{2}$$

2

$$\text{NPS} = 112.29\%$$

Dengan NPS 112.29%, maka Balai Besar POM di Jakarta telah dinyatakan berhasil dalam mencapai sasaran terwujudnya menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.

Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

28. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 29. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN 2021(%)	KRITERIA A
Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta	91,9	86,03	93,61	Baik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times$$

Kriteria Nilai Kinerja Anggaran ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu:

- a) NKA > 90% termasuk kategori Sangat Baik;
- b) NKA lebih dari 80% sampai dengan 90% termasuk kategori Baik;
- c) NKA lebih dari 60% sampai dengan 80% termasuk kategori Cukup;
- d) NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% termasuk kategori Kurang;
- e) NKA sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk kategori Sangat Kurang,

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencerminkan 4 aspek dan terdiri dari 13 indikator sebagai berikut:

Aspek	Indikator	Bobot
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	5%
	Deviasi Halaman III DIPA	5%
	Pagu Minus	5%
Kepatuhan terhadap Regulasi	Data Kontrak	10%
	Pengelolaan UP dan TUP	8%
	LPJ Bendahara	5%
	Dispensasi SPM	5%
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	15%
	Penyelesaian Tagihan	10%
	Capaian Output	17%
	Retur SP2D	5%
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Renkas	5%
	Kesalahan SPM	5%

Kriteria nilai IKPA sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yaitu:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
- b. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
- c. Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89;
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70.

Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Permenkeu No. 2/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pada laporan kinerja ini, evaluasi kinerja anggaran dibahas berdasarkan aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator yaitu:

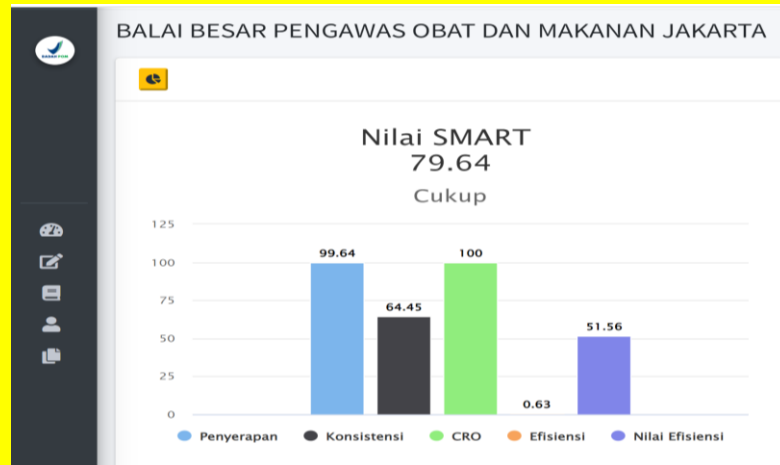
Indikator	Bobot
Penyerapan Anggaran	9,7%
Konsistensi	18,2%
Capaian Realisasi Output	43,5%
Efisiensi	28,6%

Nilai IKPA dan EKA dapat dilihat pada Aplikasi Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(OMSPAN) atau Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)

Kementerian Keuangan sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini

Gambar Nilai EKA BBPOM Jakarta Tahun 2021 pada aplikasi SMART



Gambar Nilai IKPA BBPOM Jakarta Tahun 2021 pada aplikasi OMSPAN

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

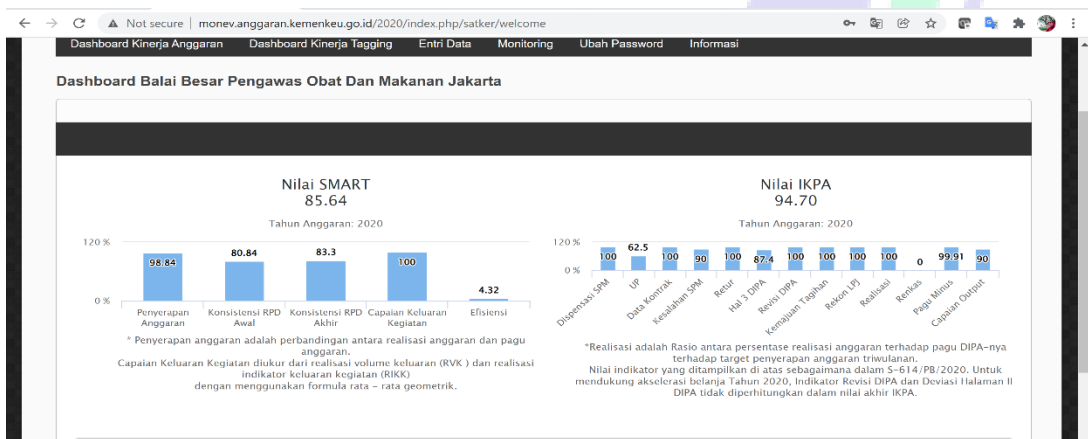
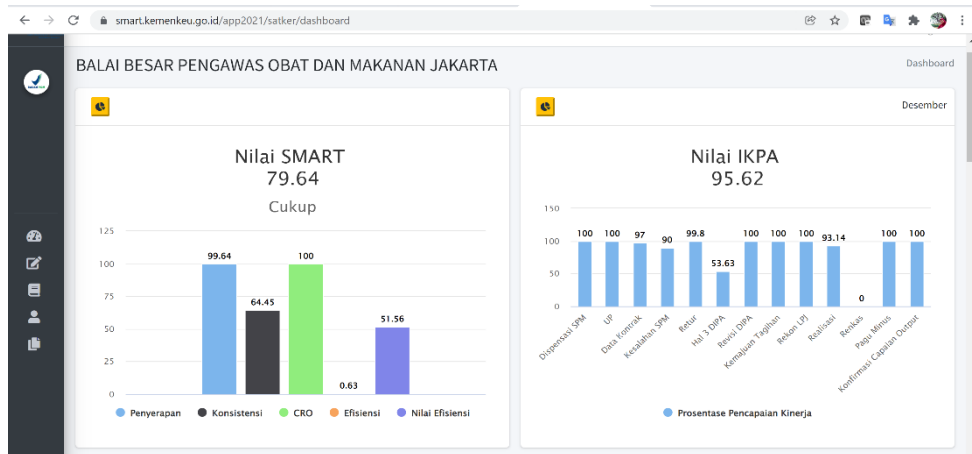
NO	KODE KPPN	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN			KEPATUHAN TERHADAP REGULASI			EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN					EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	PENYER, ANGGA	
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGELOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM					
1	175	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100.00	53.63	100.00	97.00	100.00	100.00	100.00	93.14	100.00	100.00	99.80	0.00	90.00	90.84	95%	95.62	5	
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5					
				Nilai Akhir	5.00	2.68	5.00	9.70	8.00	5.00	5.00	13.97	10.00	17.00	4.99	0.00	4.50					
				Nilai Aspek	84.54			99.25			98.24					90.00						

Disclaimer:
 Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Berdasarkan gambar tersebut diatas, pada tahun 2021, nilai EKA adalah 79,64 dan Nilai IKPA adalah 95,62 sehingga diperoleh nilai NKA 86.03. Nilai IKPA masuk dalam kriteria “SANGAT BAIK” dan nilai NKA masuk kategori “BAIK”. Nilai NKA tersebut belum mencapai target yaitu 91,9 sehingga diperoleh capaian 93,61% dengan kategori “BAIK”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024





gambar

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sejak tahun 2020. Realisasi NKA pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun

2020 nilai NKA 89,26 sedangkan pada tahun 2021 adalah 86,03. Demikian juga dengan capaian kinerja

terjadi penurunan dari 99,18% pada tahun 2020 menjadi 93,61% pada tahun 2021 meskipun masih berada pada kategori “BAIK”.

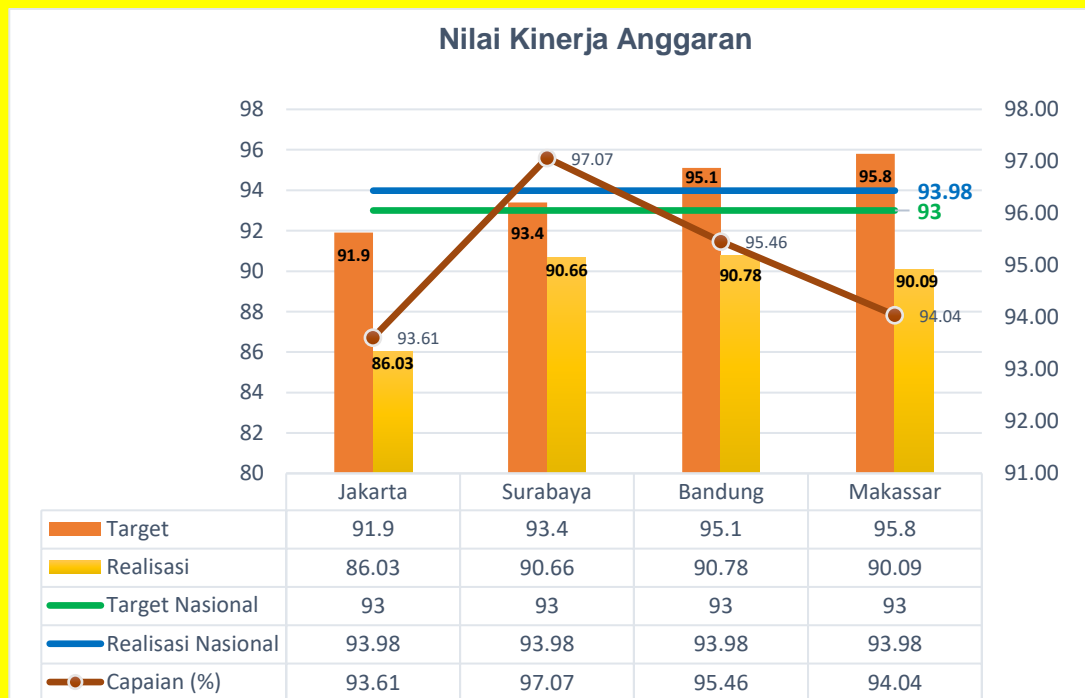
Berdasarkan kedua gambar diatas, nilai IKPA tahun 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai IKPA 95,62 sedangkan pada tahun 2020 adalah 94,70. Sebaliknya, nilai EKA pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai EKA 79,64 sedangkan pada tahun 2020 adalah 85,64.

Pada akhir periode Renstra RPJMN 2020-2024, target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta adalah 94,9. Dengan demikian, nilai NKA tahun ini mencapai 90,65% dari target tahun 2024 sehingga termasuk kriteria “BAIK”. Upaya untuk meningkatkan nilai NKA dalam mencapai target akhir periode renstra terus dilakukan oleh BBPOM di Jakarta dengan mempertahankan nilai IKPA yang sudah cukup tinggi dan meningkatkan nilai EKA.

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta mendukung indikator Nilai Kinerja Anggaran Badan POM pada sasaran strategis “Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel” dalam rangka mencapai misi pengelolaan pemerintahan yang

bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 45. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tertinggi diraih oleh BBPOM di Bandung dengan nilai 90,78. Sedangkan realisasi Nilai Kinerja Anggaran terendah pada BBPOM di Jakarta dengan nilai 86,03. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta tidak mencapai target BBPOM di Jakarta (91,9), serta jauh berada dibawah target Badan POM (93) dan nilai realisasi rata-rata NKA Badan POM (93,98). Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap akar masalah serta

menetapkan langkah strategis guna meningkatkan nilai NKA dan mencapai target periode selanjutnya

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA (60%) dan nilai IKPA (40%). Proporsi nilai EKA lebih besar dibandingkan dengan nilai IKPA. Berdasarkan data, Nilai IKPA pada tahun 2020 dan 2021 sudah cukup tinggi yaitu 94,70 dan 95,62. Nilai IKPA cukup tinggi karena pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan secara optimal melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Revisi DIPA dilaksanakan maksimal 1 kali dalam 1 triwulan
- b. Menghindari pagu minus pada akhir tahun dengan melaksanakan monitoring realisasi anggaran secara berkala
- c. Menyampaikan data perjanjian kontrak kepada KPPN secara tepat waktu. Pada tahun 2021, terdapat 1 data kontrak yang telambat disampaikan kepada KPPN dari total 31 data kontrak.
- d. Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu
- e. Menyampaikan LPJ Bendahara kepada KPPN tepat waktu
- f. Menyampaikan SPM tepat waktu sehingga tidak ada dispensasi SPM
- g. Penyerapan anggaran pada triwulan I, II dan 3 mendekati target dan pada triwulan IV berhasil melampaui target. Target penyerapan triwulan I (15%),

triwulan II (40%), triwulan III (60%) dan triwulan IV (90%)

- h. Penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja).
- i. Melaksanakan kegiatan dengan capaian rincian output seduai dengan target rincian output
- j. Menghindari adanya retur SP2D. Terdapat retur 2 SP2D dari total 1014 SP2D pada tahun 2021
- k. Mencegah terjadinya pengembalian SPM karena adanya kesalahan SPM. Pada tahun 2021, terdapat kesalahan 23 SPM dari total 1037 SPM.

Pada tahun 2021, nilai IKPA tidak memperhitungkan indikator Renkas karena tidak ada transaksi dengan nilai lebih dari 1 Milyar.

BBPOM di Jakarta belum dapat memaksimalkan nilai EKA, nilai yang diperoleh pada tahun 2021 adalah 79,64. Nilai EKA terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output dan tingkat efisiensi. Pada tahun ini, BBPOM Jakarta berhasil menyerap anggaran sebesar 99,64% dan capaian realisasi output 100%. Disisi lain, komponen penyusun EKA dengan bobot yang cukup besar (28,6%) yaitu nilai konsistensi memperoleh nilai yang rendah yaitu 64,45. Demikian juga halnya dengan komponen tingkat efisiensi dengan bobot 18,2% hanya memperoleh nilai 51,6 dengan efisiensi 0,63%. Berikut nilai masing-masing komponen penyusun EKA BBPOM di Jakarta Tahun 2021

Tabel komponen nilai EKA BBPOM di Jakarta Tahun 2021

Indikator	Komponen	Bobot	Bobot Komponen	Nilai	Nilai Akhir (Nilai x Bobot)	Nilai EKA terhadap NKA	Nilai EKA terhadap NKA seharusnya
EKA	Penyerapan Anggaran	60%	9.7	99.64	9.66508	5.80	5.82
	CRO		43.5	100	43.5	26.10	26.10
	Konsistensi		18.2	64.45	11.7299	7.04	10.92
	Efisiensi		28.6	51.56	14.74616	8.85	17.16
	Total EKA			100		79.64	47.78
	Nilai 60% EKA				47.78		
	IKPA	40%			95.62		
	Nilai 40% IKPA				38.25		
	NKA = 0.4IKPA+0.6EKA	100%			86.03		

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2021 tidak mencapai target karena beberapa hal sebagai berikut:

1) Rendahnya nilai Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya adalah jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Tingkat efisiensi anggaran maksimal dapat dicapai bila efisiensi anggaran mencapai 20% berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Efisiensi anggaran BBPOM di Jakarta hanya 0,63. Hal ini memperlihatkan bahwa hampir tidak ada selisih antara pengeluaran yang seharusnya dengan realisasi anggaran. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dengan adanya efisiensi pada KRO EAA Layanan Perkantoran dan KRO QIC

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga. Pada KRO EAA, terdapat sisa anggaran dan target RO tercapai. Pada KRO QIC, Realisasi Output melebihi target dengan capaian realisasi anggaran mendekati 100%. Dalam rangka meningkatkan nilai efisiensi anggaran, perlu dilakukan identifikasi terhadap kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan lebih optimal sehingga dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, dapat diperoleh hasil melebihi target.

2) Rendahnya nilai konsistensi

Konsistensi memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Deviasi ini juga akan mempengaruhi nilai deviasi halaman III DIPA. Nilai Konsistensi yang rendah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana. Kondisi pandemi Covid yang tidak menentu menuntut pengelola kegiatan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak pada perubahan realisasi anggaran bila dibandingkan dengan rencana awal tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan pemutakhiran rencana penarikan dana (RPD) secara berkala setiap awal triwulan menyesuaikan dengan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan akibat pengaruh kondisi lingkungan strategis.

Dari analisis tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta pada periode selanjutnya sebagai berikut:

1. Menurunkan selisih antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Bulanan (RPD) dengan melaksanakan pemutakhiran halaman III DIPA secara berkala setiap awal triwulan untuk meningkatkan nilai konsistensi dan deviasi halaman III DIPA
2. Meningkatkan kinerja untuk mencapai output melebihi target dalam rangka meningkatkan nilai tingkat efisiensi
3. Mengawal indikator lain yang merupakan komponen penyusun nilai IKPA dan EKA sehingga tetap mencapai nilai maksimal seperti pada tahun 2021
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pencapaian nilai kinerja anggaran

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang berpengaruh positif terhadap nilai kinerja anggaran adalah:

- a. Pelaporan kepada KPPN secara tepat waktu terkait penyampaian data kontrak, LPJ, SPM
- b. Pengalihan beberapa kegiatan dari *onsite* menjadi *daring*, misal pengawasan sarana produksi dan distribusi sehingga mampu berkontribusi terhadap tingkat efisiensi Program Pengawasan dan Pengendalian Lembaga karena realisasi volume outputnya jauh melampaui target
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan realisasi output secara berkala

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

g. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan yaitu peningkatan komitmen dan sinergi antara pengelola kegiatan dan pengelola keuangan serta bagian pelaporan dan evaluasi. Untuk itu telah dilaksanakan program evaluasi berkala setiap bulan membahas capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut perbaikan dengan melibatkan seluruh pengelola kegiatan dan keuangan serta bagian pelaporan.

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target nilai kinerja anggaran antara lain anggaran. Berikut adalah analisa efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target nilai kinerja anggaran di BBPOM Jakarta:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai Kinerja Anggaran	91,9	86,03	93,61	352105500	351412714	99,80	0.94	-0.06	75%

Berdasarkan tabel tersebut, nilai tingkat efisiensi adalah -0,06 dengan kategori “Tidak Efisien”. Artinya, anggaran yang dialokasikan untuk indikator nilai kinerja anggaran belum sebanding dengan capaian indikator tersebut. Perlu dilakukan kaji ulang terkait mapping anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja karena struktur anggaran tidak selaras dengan indikator kinerja sehingga perlu pemetaan yang lebih

menggambarkan keterkaitan antara anggaran dengan indikator kinerja yang akan dicapai.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

29. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

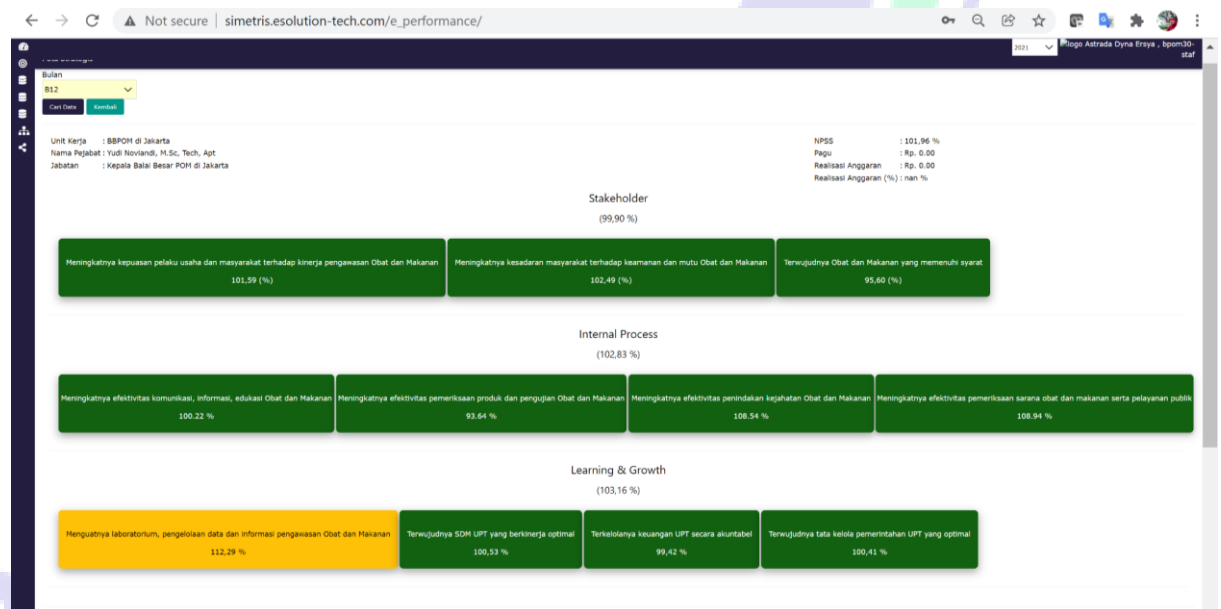
Tabel 30. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN 2021 (%)	KRITERIA
Tingkat efisiensi penggunaan	Efisien (95%)	Efisien (100%)	105,26%	Baik

anggaran Balai
Bear POM di
Jakarta

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*.

Input yang dimaksud disini adalah penggunaan anggaran. Sedangkan data Capaian Output BBPOM di Jakarta dapat dilihat pada *dashboard* peta strategis pada Aplikasi simetris sebagai berikut:



Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian *output* dengan % capaian *input*, dengan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} = \frac{101,96\%}{99,64\%} = 1,02$$

Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

Standar efisiensi (SE) adalah 1

$$TE = \frac{IE - SE}{SE} = \frac{1,02 - 1}{1} = 0,02$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien, dengan kriteria:

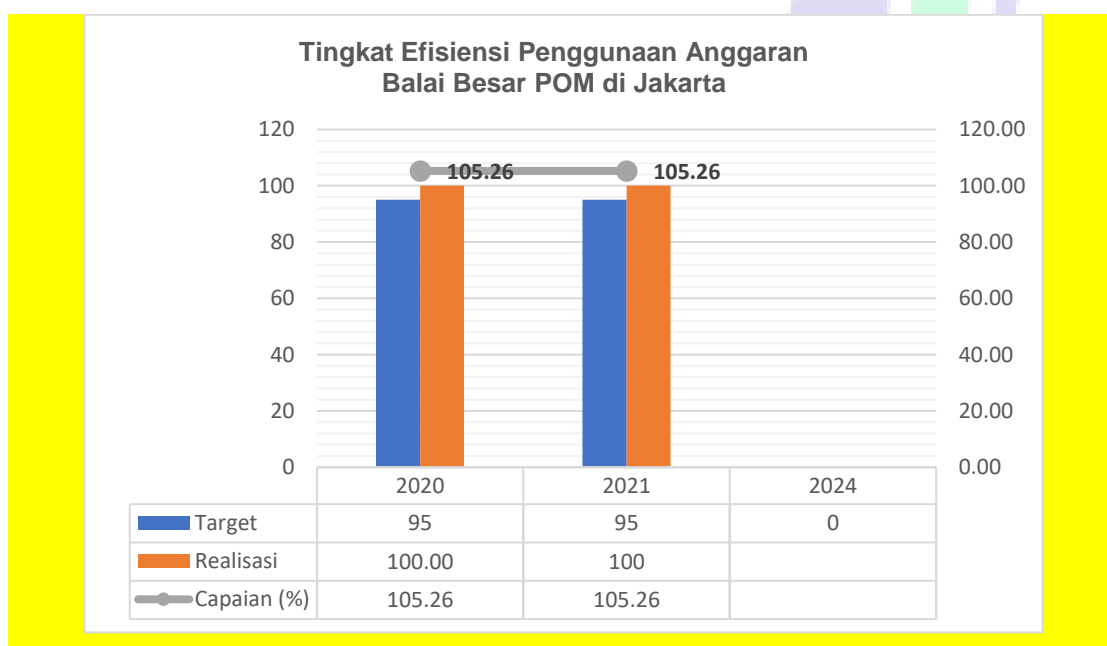
1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
2. 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
3. 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
4. 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
5. 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
6. 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
7. 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
8. 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
9. 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
10. > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)
11. < 0 : 75% (Tidak Efisien)

Tingkat efisiensi dihitung dengan membandingkan persentase pencapaian target indikator kinerja dengan persentase anggaran yang digunakan dalam mencapai target kinerja tersebut. Tingkat efisiensi BBPOM di Jakarta pada tahun 2021 mencapai nilai 100% (efisien) dengan kategori “BAIK”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 46. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.

Tingkat Efisiensi merupakan indikator baru pada Renstra 2020-2024. Oleh karena itu, pada tahun 2021, perbandingan realisasi dan capaian indikator Tingkat Efisiensi hanya dapat dilakukan terhadap tahun 2020. Dalam 2 tahun terakhir ini, realisasi Tingkat efisiensi mencapai 100% (efisien), melebihi target yaitu

95% (efisien) sehingga capaian 105,6% dan termasuk dalam kategori “BAIK”.

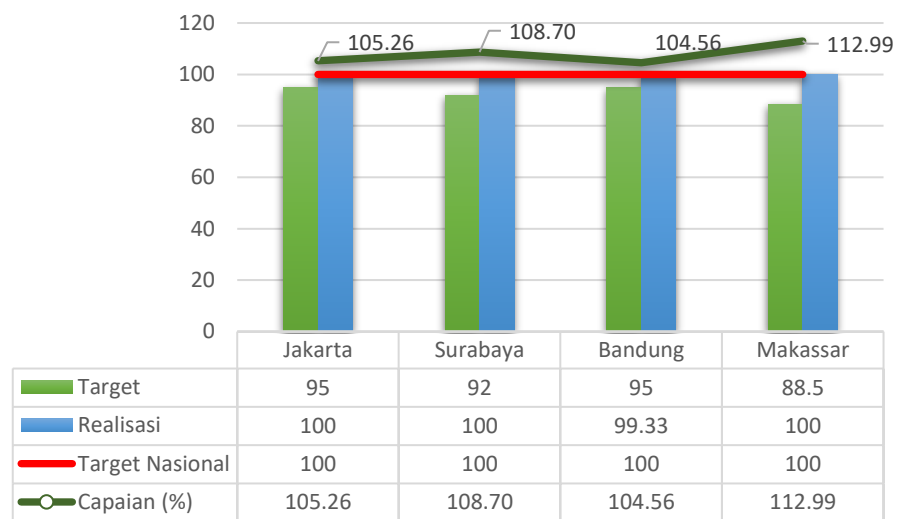
Pada tahun 2022, indikator Tingkat Efisiensi dihapuskan karena tingkat efisiensi merupakan salah satu komponen indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Namun demikian, efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja dan sasaran kinerja akan tetap dilakukan

c. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional dan target nasional

Perbandingan realisasi dan capaian Tingkat Efisiensi tahun 2021 antara BBPOM Jakarta dengan UPT lain dapat dilihat pada grafik diatas. Realisasi Tingkat Efisiensi BBPOM di Jakarta, Surabaya dan Makassar sama-sama mencapai target masing-masing UPT dan target nasional, yaitu 100% (efisien) sedangkan BBPOM Bandung 99,33% (efisien). IKU Tingkat Efisiensi ini mendukung IKU mendukung Sasaran strategis BPOM Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

BADAN POM

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi pandemi covid sehingga beberapa kegiatan dilakukan modifikasi baik perubahan dari onsite menjadi daring maupun *hybrid* sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi kegiatan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Selama masa pandemi COVID-19, Balai Besar POM di Jakarta berupaya tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Adaptasi pola pelaksanaan sebagian besar kegiatan menjadi daring. Antisipasi perubahan kondisi selama masa pandemi COVID-19 yang bertumpu pada kegiatan daring berdampak positif

pada pencapaian *output*. Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi efisien.

f. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tingkat efisiensi telah mencapai target tahun 2021 sehingga tidak ada evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya untuk tahun 2022.

g. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target nilai Tingkat Efisiensi antara lain anggaran. Berikut adalah Analisa efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target nilai Tingkat Efisiensi di BBPOM Jakarta:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Tingkat Efisiensi	95%	100%	105,26	430.407.500	429.893.014	99,88	1,05	0,05	100%

Berdasarkan tabel tersebut, nilai tingkat efisiensi adalah 0,05 dengan capaian 100% dan termasuk dalam kategori “Efisien”. Artinya, anggaran yang dialokasikan untuk indikator nilai kinerja anggaran telah berhasil melampaui target indikator tersebut.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan

didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 11, maka belum dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{94\% + 100,05\%}{2}$$

$$\text{NPS} = 99,42\%$$

Dengan NPS 99,42 maka Balai Besar POM di Jakarta dapat dinyatakan berhasil dalam mencapai sasaran Terkelolanya Keuangan UPT dengan kategori BAIK.

1.2. Realisasi Anggaran

Terdapat 7 (tujuh) kali revisi DIPA dengan 3 (tiga) diantaranya adalah Pemotongan Anggaran APBN (APBNP).

DIPA-00-2021 : 23-11-2020 : Rp. 47.430.798.000

DIPA-01-2021 : 23-03-2021 : Rp. 47.430.798.000

DIPA-02-2021 : 03-06-2021 : Rp. 46.199.752.000

DIPA-03-2021 : 25-07-2021 : Rp. 44.499.556.000

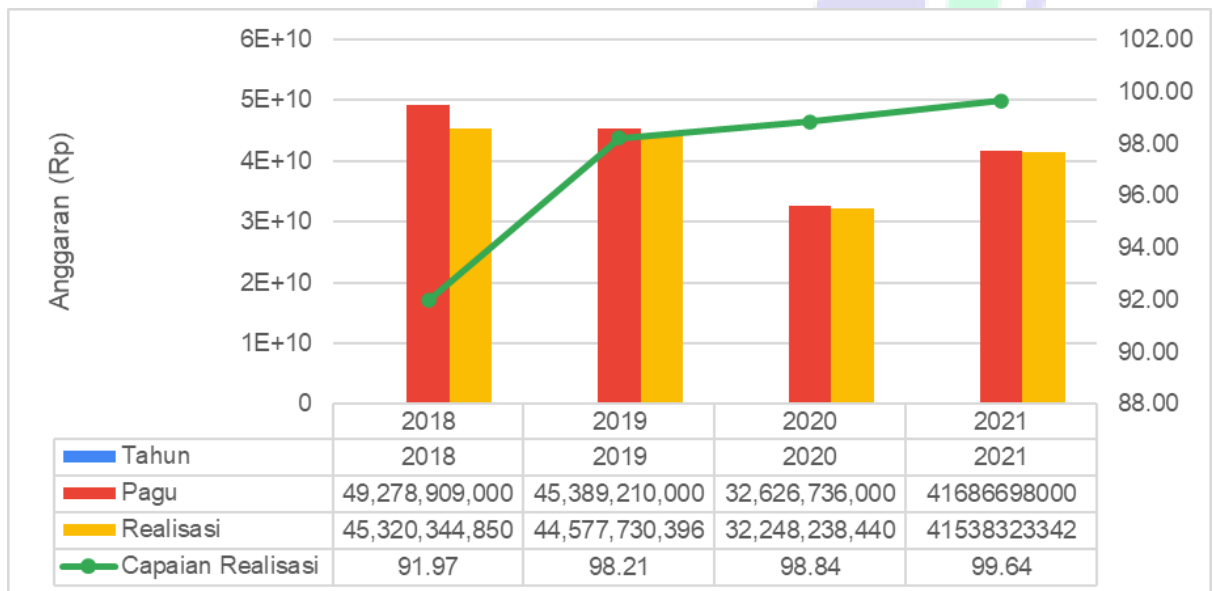
DIPA-04-2021 : 05-08-2021 : Rp. 41.616.698.000

DIPA-05-2021 : 04-11-2021 : Rp. 41.686.698.000

DIPA-06-2021 : 22-12-2021 : Rp. 41.686.698.000

DIPA-07-2021 : 28-12-2021 : Rp. 41.686.698.000

Pada akhir tahun 2021, anggaran pada DIPA BBPOM di Jakarta adalah Rp. 41.676.698.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 41.538.323.342 atau 99,64%.



Gambar 36. Perbandingan pagu, realisasi anggaran, dan capaian realisasi anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2018 - 2021

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian input
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 961.405.200	Rp. 947.292.579	98,53%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 156.071.850	Rp. 155.859.022	99,86%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 1.325.040.450	Rp. 1.318.115.957	99,47%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 793.678.200	Rp. 793.152.564	99,93%

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian input
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 2.861.865.000	Rp. 2.861.612.000	99,99%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 412.030.800	Rp. 402.294.544	97,63%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 1.042.636.000	Rp. 1.042.404.417	99,97%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Rp. 782.513.000	Rp. 781.305.729	99,85%
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Rp. 24.425.665.000	Rp. 24.359.468.512	99,73%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Rp. 8.143.279.500	Rp. 8.137.255.837	99,93%
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Rp. 782.513.000	Rp. 781.305.728	99,85%

Capaian realisasi anggaran cukup tinggi, berkisar antara 99,47% sampai 99,99%. Berdasarkan tabel tersebut, 3 sasaran yang memperoleh alokasi anggaran paling besar adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi
			Anggaran	Anggaran
			(Rupiah)	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	309.593.550	306.909.050
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	162.471.050	162.434.585
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	309.593.550	306.909.050
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	162.471.050	162.434.585
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	17.276.000	8.605.310
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	156.071.850	155.859.022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi
			Anggaran	Anggaran
			(Rupiah)	(Rupiah)
	Besar POM di Jakarta			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	56.977.100	56.943.540
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	156.071.850	155.859.022
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	1.111.991.500	1.105.313.395
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	142.442.750	142.358.851
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	142.442.750	142.358.851

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi
			Anggaran	Anggaran
			(Rupiah)	(Rupiah)
	Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	120.083.000	120.078.677
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	39.864.000	39.809.480
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	188.044.400	187.964.682
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	160.801.300	160.582.023
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	1.624.100.000	1.624.098.100
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	354.018.000	353.767.400
		Jumlah desa pangan aman	783.316.000	783.315.500
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100.431.000	100.431.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	265.365.900	263.064.900

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi
			Anggaran	Anggaran
			(Rupiah)	(Rupiah)
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	146.664.900	139..229.644
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1.042.636.000	1.042.404.417
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	352.105.500	351.412.715
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	430.407.500	429.893.014
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	24.425.665.000	24.359.468.512

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi
			Anggaran	Anggaran
			(Rupiah)	(Rupiah)
10	Menguatnya laboratorium . pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	7.827.731.500	7.822.695.837
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	315.548.000	314.560.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	352.105.500	351.412.715
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	430.407.500	429.893.014

Berdasarkan tabel tersebut, indikator dengan alokasi anggaran terbesar adalah sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta
2. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
3. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta

5. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1.3. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 32. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2021

NO	Program/ <i>Output</i> /Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		<i>input</i>	<i>output</i>				
3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	99,79	100	1,00	1	0	Efisien

NO	Program/ Output/Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
	Good Laboratory Practice						
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	99,99	100	1,00	1	0	Efisien
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	99,89	100	1,00	1	0	Efisien
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	100	100	1,00	1	0	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	99,41	100	1,01	1	0,01	Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	99,99	100	1,00	1	0	Efisien
3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	99,99	100	1,00	1	0	Efisien
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan	99,77	100	1,00	1	0	Efisien

NO	Program/ Output/Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
	Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						
3165.CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	99,36	100	1,01	1	1,01	Efisien
3165.QCD.U01	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI/ BALAI BESAR POM	99,96	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	99,93	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	100	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	100	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	99,98	101.22	1,01	1	0,01	Efisien
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	99,13	100.06	1,01	1	0,01	Efisien

NO	Program/ Output/Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	99,62	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	99,87	108,33	1,08	1	0,08	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	99,81	120,48	1,21	1	0,21	Efisien
6348.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	99,73	100	1,00	1	0,01	Efisien

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan 19 (Sembilan belas) kegiatan untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan kategori efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 0,21 sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai Besar POM di Jakarta mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam hal ini, semakin rendah TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Output “Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang

Diperiksa” menghasilkan TE tertinggi yaitu 0,21 karena *output* yang diperoleh paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian *output* mencapai 120,48% dengan *input* hanya sebesar 99,81%. Tingginya efisiensi *output* sarana distribusi yang diperiksa, karena anggaran yang direncanakan telah sejalan dengan pencapaian *output*. *Output* tercapai dengan anggaran yang ada dengan mengefisienkan beberapa belanja bahan dan perjalanan dinas yang banyak dialihkan menjadi kegiatan daring.

Tabel 33. Efisiensi kegiatan per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	89,61	95,60	1,15	1	0,15	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,86	102,49	1,03	1	0,03	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,73	101,59	1,02	1	0,02	Efisien

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,93	108,94	1,09	1	0,09	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,98	100,22	1,00	1	0	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	97,03	93,64	0,97	1	-0,03	Tidak Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,98	108,54	1,09	1	0,09	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	99,84	100,41	1,01	1	0,01	Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	99,73	100,53	1,01	1	0,01	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	99,81	112,29	1,13	1	0,13	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	99,84	99,42	0,995	1	-0,004	Tidak Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dapat diketahui bahwa sebagian besar sasaran strategis memiliki nilai $TE > 1$ dengan kriteria efisien. Nilai efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran strategis

kesatu yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”. Namun terdapat dua sasaran strategis dengan nilai efisiensi negatif atau tidak efisien, yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dan “Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel”. Hal ini disebabkan capaian sasaran strategis lebih kecil dibandingkan persentase anggaran yang digunakan.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Perlu dilakukan kajian terhadap penetapan input (anggaran) dan kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator pembangun sasaran strategis karena struktur anggaran dan indikator kinerja tidak selaras. Sehubungan tingkat efisiensi anggaran juga merupakan indikator dalam perhitungan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dalam penetapan Nilai Kinerja Anggaran, maka indikator ini tidak akan dievaluasi lagi pada periode tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis 2020-2024. Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis tersebut, diukur melalui 29 indikator kinerja utama.

1. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 24 (dua puluh empat) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**” ($90\% \leq x < 110\%$); 1 (satu) indikator mencapai kategori “**cukup**” ($70\% \leq x < 90\%$); 1 (satu) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, 3 (tiga) indikator mencapai target dengan kategori “**sangat baik**” ($110\% \leq x < 120\%$).
2. Hasil capaian sasaran strategis terbaik adalah :
Nilai pencapaian tertinggi pertama adalah menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan sebesar 112.29% dengan kriteria **SANGAT BAIK** menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM dalam pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal.

4.1. Saran

1. Perkuatan pengawasan dengan adanya kolaborasi pengawasan dengan lintas sector terkait Pengawasan Obat dan Makanan akan berhasil jika didukung oleh pemerintah daerah. Kolaborasi dalam pengawasan sangat penting untuk peningkatan efektivitas pengawasan itu sendiri

2. Kolaborasi Fasilitasi UMK (Usaha Mikro Kecil) Pangan Olahan wilayah DKI Jakarta melalui kegiatan penyamaan persepsi data binaa, fasilitasi sarana hingga fasilitasi izin edar. Hal ini perlu dilaksanakan agar Fasilitasi UMK tidak berjalan secara parcial.
3. Perluasan Akses Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki lintas sector terkait. Hal ini penting dilakukan mengingat Balai Besar POM di Jakarta memiliki keterbatasan SDM untuk pelayanan publik. Diharapkan perluasan akses layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta dapat diwujudkan dan pelayanan publik menjadi lebih optimal



BADAN POM

Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di
Jakarta Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
Stakeholder							
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja	72	74.98	76.65	78.33	80.01

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	93
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,30	4,40	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81
		Internal Process					
	Meningkatnya efektivitas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	97.3

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
Learning and Growth							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	85.4
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	82
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	85
	Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian	82	77	82	87	92

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Obat dan Makanan sesuai standar GLP					
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	94.9
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	-	-	-

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

BADAN POM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Jakarta
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Jakarta

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.6
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74.98

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.20
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	14
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	2
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	82.4
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79.1
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.25
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.9
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
41,686,698,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 08 November 2021

Pihak Pertama



Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Jakarta



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BBPOM di Jakarta
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			86.5			86.5			86.5	86.5	86.5	80	309.593.550,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			95			95			95	95	95	95	162.471.050,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			86.5			86.5			86.5	86.5	86.5	80	309.593.550,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			81			81			81	81	81	81	162.471.050,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat												88	17.276.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												85	156.284.700,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												86,5	57.519.100,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												74,98	156.284.700,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90	1.120.428.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			89			89			89	89	89	89	143.797.750,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			75			75			75	75	75	75	143.797.750,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			85			85			85	85	85	85	119.438.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			56			56			56	56	56	60	39.864.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			73		73			73	73	73	73		190.212.400,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPCN											4.14		161.020.600,00
16.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			93		93			93	93	93	93		1.624.100.000,00
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20		45			55	80	90	40		354.018.000,00
18.	Jumlah desa pangan aman			25		40			65	75	85	14		783.316.000,00
19.	Jumlah pasar aman berbasis komunitas			25		60			80	90	95	2		100.431.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			90.5		90.5			90.5	90.5	90.5	100		265.365.900,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			89.5		89.5			89.5	89.5	89.5	100		146.664.900,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			10		20			30	35	40	54		1.042.636.000,00
23.	Indeks RB UPT											82.4		342.459.500,00
24.	Nilai AKIP UPT											79.1		440.053.500,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											84.25		24.513.970.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											77		7.831.643.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2		2			2	2	2	2		303.200.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			14		37			56	70	80	91.9		248.734.500,00
29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			95		95			95	95	95	95		440.053.500,00
Total													41.686.698.000,00	

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Stakeholder	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80	74,88%	93,6	BAIK
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95	94,73%	99,72	BAIK
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	59,74%	74,68	CUKUP
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	94,93%	117,2	SANGAT BAIK
			Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	88	81,67%	92,81	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	85	87,12	102,49	BAIK
		3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,6	86,7	100,12	BAIK
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74,98	73,8	98,43	BAIK

BADAN POM

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	95,61	106,23	BAIK
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	92,19%	103,58	BAIK
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	78,02%	104,03	BAIK
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	97,23%	114,39	SANGAT BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	69,02%	115,03	SANGAT BAIK
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	79,21%	108,51	BAIK
			Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,2	4,54	108,1	BAIK
2	Internal Process	5. Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93,83	108,1	BAIK

BADAN POM

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100,00	BAIK
	Jumlah desa pangan aman		14	14	100,00	BAIK	
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		2	2	100,00	BAIK	
	6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	90,85%	90,85%	BAIK	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	96,42%	96,42%	BAIK	
	7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54	58,61%	108,54	BAIK	

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta					
3	Learning and Growth	8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82,4	82,29	99,87	BAIK
			Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	82,4	82,29	99,87	BAIK
		9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	79,1	79,85	100,95	BAIK
		10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	80,5%	104,55	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	2,475	123,75	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		11. Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92	86	94	BAIK
			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (100%)	100,05% (Efisien)	BAIK

*) Dihitung terhadap target sesuai target APBN-P

BADAN POM

Lampiran 4. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,00%	74,88%	93,60%	309.593.550	306.909.050	99,13%	0,94	-0,06	75%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95%	94,73%	99,71%	162.471.050	162.434.585	99,98%	1,00	0,00	75%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00%	59,74%	74,67%	309.593.550	306.909.050	99,13%	0,75	-0,25	75%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81%	94,93%	117,19%	162.471.050	162.434.585	99,98%	1,17	0,17	100%
4	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	88%	81,67%	92,81%	17.276.000	8.605.310	49,81%	1,86	0,86	88%
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85	87,12	102,49%	156.071.850	155.859.022	99,86%	1,03	0,03	100%
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,6	86,7	100,12%	56.977.100	56.943.540	99,94%	1,00	0,00	100%
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,98	73,8	98,43%	156.071.850	155.859.022	99,86%	0,99	-0,01	75%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	90	95,61	106,23%	1.111.991.500	1.105.313.395	99,40%	1,07	0,07	100%

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
9	Persentase keputusan/rekomendasi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	92,19%	103,58%	142.442.750	142.358.851	99,94%	1,04	0,04	100%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75%	78,02%	104,03%	142.442.750	142.358.851	99,94%	1,04	0,04	100%
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	97,23%	114,39%	120.083.000	120.078.677	100,00%	1,14	0,14	100%
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	69,02%	115,03%	39.864.000	39.809.480	99,86%	1,15	0,15	100%
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73%	79,21%	108,51%	188.044.400	187.964.682	99,96%	1,09	0,09	100%
14	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	4,2	4,54	108,10%	160.801.300	160.582.023	99,86%	1,08	0,08	100%
15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93,83	100,89%	1.624.100.000	1.624.098.100	100,00%	1,01	0,01	100%
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100%	100,00%	100,00%	354.018.000	353.767.400	99,93%	1,00	0,00	100%
17	Jumlah desa pangan aman	100%	100,00%	100,00%	783.316.000	783.315.500	100,00%	1,00	0,00	100%
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100%	100,00%	100,00%	100.431.000	100.431.000	100,00%	1,00	0,00	100%

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	90,85%	90,85%	265.365.900	263.064.900	99,13%	0,92	-0,08	75%
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	96,42%	96,42%	146.664.900	139.229.644	94,93%	1,02	0,02	100%
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54%	58,61%	108,54%	1.042.636.000	1.042.404.417	99,98%	1,09	0,09	100%
22	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82,4	82,29	99,87%	352.105.500	351.412.715	99,80%	1,00	0,00	100%
23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	79,1	79,85	100,95%	430.407.500	429.893.014	99,88%	1,01	0,01	100%
24	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,25	84,7	100,53%	24.425.665.000	24.359.468.512	99,73%	1,01	0,01	100%
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77%	80,50%	104,55%	7.827.731.500	7.822.695.837	99,94%	1,05	0,05	100%
26	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	2,475	123,75%	315.548.000	314.560.000	99,69%	1,24	0,24	95%
27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	91,9	89,23	97,09%	352.105.500	351.412.714	99,80%	0,97	-0,03	75%
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	95,00%	100 %	105,26%	430.407.500	429.893.014	99,88%	1,05	0,05	100%

Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Laboratorium

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Januari										Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA		
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
							TIE/ legal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***				TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Obat/Pangan Purpose)
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(di roren 128)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	410		20	0	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	20		
			(di roren 512)		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	269		20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20		
			(di roren 336)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	512		20	0	0	0	1	20	0	0	0	0	0	20			
2	Obat Tradisional/ Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	115	Targeted	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9			
			(di roren 144)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	269		20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20		
			(di roren 336)		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	384		29	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	29		
			(di roren 112)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	9	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	9			
			(di roren 48)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	90		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10			
			(di roren 112)		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	128		19	0	0	0	2	19	0	0	0	0	0	19			
			(di roren 671)			10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10			
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10			
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	479		10	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	10			
			(di roren 671)		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	767		20	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	20			
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Total Obat	102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Total Obat Tradisional	115	Targeted	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9			
			Total Suplemen Kesehatan	38		9	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	9			
			Total Kosmetik	288		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10			
			Jakarta	543	Targeted	28	0	0	0	2	28	0	0	0	0	0	28			
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	1248		60	0	0	0	4	60	0	0	0	0	0	60			
			(di roren 671)		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	1791		60	0	0	0	4	60	0	0	0	0	0	60			
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1.248		60	0	0	4	60	0	0	0	0	0	60				
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791		88	0	0	6	88	0	0	0	0	0	88				
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	607		41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	41			
			(di roren 671)		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	138		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Total Pangan	607	Targeted	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	41			
			TOTAL PANGAN	745	Random	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42			
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40			
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(di roren 671)		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jakarta	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Total targeted	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Total Obat	0	Targeted	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40			
			Jakarta	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Total Pangan	120	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40				

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Februari											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA		
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji								
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****				TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)	
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																					
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	4	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	4	0		
			(di roren 128)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jakarta	410	Random	36	0	0	0	4	56	29	25	0	4	0	0	4	27	29	
			(di roren 512)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	512		40	0	0	0	6	60	29	25	0	4	0	0	4	31	29	
2	Obat Tradisional/Obat Paten	sampel	Jakarta	115	Targeted	22	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0	
			(di roren 144)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	269	Random	38	2	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	2	56	2	
			(di roren 336)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	384		60	2	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	2	87	2	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	5	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	
			(di roren 48)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	90	Random	20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	
			(di roren 112)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	128		25	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44	0	
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	30	0	0	0	4	40	10	10	0	0	0	0	0	30	10	
			(di roren 671)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	479	Random	72	0	0	0	24	82	9	6	0	3	0	0	3	73	9	
			(di roren 671)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	767		102	0	0	0	28	122	19	16	0	3	0	0	3	103	19	
			Total Obat	102	Targeted	4	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
			Total Obat Tradisional	115			22	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0
			Total Suplemen Kesehatan	38		5	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	
			Total Kosmetik	288		30	0	0	0	4	40	10	10	0	0	0	0	0	30	10	
			Jakarta	543	Targeted	61	0	0	0	6	89	10	10	0	0	0	0	0	0	79	10
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543		61	0	0	0	6	89	10	10	0	0	0	0	0	79	10	
			Total Obat	410	Random	36	0	0	0	4	56	29	25	0	4	0	0	4	27	29	
			Total Obat Tradisional	269			38	2	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	2	56	2
			Total Suplemen Kesehatan	90		20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	
			Total Kosmetik	479		72	0	0	0	24	82	9	6	0	3	0	0	3	73	9	
			Jakarta	1248	Random	166	2	0	0	28	224	38	31	0	7	0	0	9	186	40	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1,248		166	2	0	0	28	224	38	31	0	7	0	0	9	186	40	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791		227	2	0	0	34	313	48	41	0	7	0	0	9	265	50	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																					
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	607	Random	89	1	0	0	2	129	0	0	0	0	0	0	1	129	1	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL Pangan	138	Targeted	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
			TOTAL Pangan	607	Random	89	1	0	0	2	129	0	0	0	0	0	0	1	129	1	
			TOTAL PANGAN	745		91	1	0	0	2	132	0	0	0	0	0	0	1	132	1	
Sampel Makanan FORTIFIKASI																					
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	10	0	0	0	0	50	40	34	6	0	0	0	6	10	40	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL targeted	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL Obat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL Pangan	120	Targeted	10	0	0	0	0	50	40	34	6	0	0	0	6	10	40	
			TOTAL Pangan	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		10	0	0	0	0	50	40	34	6	0	0	0	6	10	40	

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Maret											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluaran	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****				TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	0	0	0	0	4	4	2	0	2	0	0	2	0	4	
			(di roren 128)	-						0	0						0	0	0	
			Jakarta	410	Random	60	0	0	0	8	87	50	46	0	4	0	4	37	50	
			(di roren 512)	-						0	0						0	0	0	
			TOTAL	512		60	0	0	0	8	91	54	48	0	6	0	6	37	54	
2	Obat Tradisional/Obat Paku	sampel	Jakarta	115	Targeted	23	1	0	0	9	53	31	31	0	0	0	1	22	32	
			(di roren 144)	-						0	0						0	0	0	
			Jakarta	269	Random	39	8	0	0	8	87	56	56	0	0	0	8	31	64	
			(di roren 336)	-						0	0						0	0	0	
			TOTAL	384		62	9	0	0	17	140	87	87	0	0	0	9	53	96	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	6	0	0	0	2	20	14	12	0	2	0	2	6	14	
			(di roren 48)	-						0	0						0	0	0	
			Jakarta	90	Random	20	0	0	0	8	50	25	25	0	0	0	0	25	25	
			(di roren 112)	-						0	0						0	0	0	
			TOTAL	128		26	0	0	0	10	70	39	37	0	2	0	2	31	39	
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	30	0	0	0	22	60	24	20	2	2	0	4	36	24	
			(di roren 671)	-						0	0						0	0	0	
			Jakarta	479	Random	68	0	0	0	44	141	54	34	0	20	0	20	87	54	
			(di roren 671)	-						0	0						0	0	0	
			TOTAL	767		98	0	0	0	66	201	78	54	2	22	0	24	123	78	
			Total Obat	102	Targeted	0	0	0	0	0	4	4	2	0	2	0	2	0	4	
			Total Obat Tradisional	115			23	1	0	0	9	53	31	31	0	0	0	1	22	32
			Total Suplemen Kesehatan	38		6	0	0	0	2	20	14	12	0	2	0	2	6	14	
			Total Kosmetik	288		30	0	0	0	22	60	24	20	2	2	0	4	36	24	
			Jakarta	543	Targeted	59	1	0	0	33	137	73	65	2	6	0	9	64	74	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543		59	1	0	0	33	137	73	65	2	6	0	9	64	74	
			Total Obat	410	Random	60	0	0	0	8	87	50	46	0	4	0	4	37	50	
			Total Obat Tradisional	269			39	8	0	0	8	87	56	56	0	0	0	8	31	64
			Total Suplemen Kesehatan	90		20	0	0	0	8	50	25	25	0	0	0	0	25	25	
			Total Kosmetik	479		68	0	0	0	44	141	54	34	0	20	0	20	87	54	
			Jakarta	1248	Random	187	8	0	0	68	365	185	161	0	24	0	32	180	193	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1,248		187	8	0	0	68	365	185	161	0	24	0	32	180	193	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791		246	9	0	0	101	502	258	226	2	30	0	41	244	267	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	16	0	0	0	0	19	10	9	1	0	0	1	9	10	
			(di roren 671)	0						0	0						0	0	0	
			Jakarta	607	Random	57	0	0	0	0	186	63	59	4	0	0	4	123	63	
			(di roren 671)	0						0	0						0	0	0	
			TOTAL Pangan	138	Targeted	16	0	0	0	0	19	10	9	1	0	0	1	9	10	
			TOTAL Pangan	607	Random	57	0	0	0	0	186	63	59	4	0	0	4	123	63	
			TOTAL PANGAN	745		73	0	0	0	0	205	73	68	5	0	0	5	132	73	
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	
			(di roren 671)	0						0	0							0	0	0
			Jakarta	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 671)	0						0	0							0	0	0
			TOTAL targeted	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL Obat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL Pangan	120	Targeted	20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	
			TOTAL Pangan	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	April											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****				TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(di roren 128)																	
			Jakarta	410	Random	60	0	0	0	4	97	42	36	0	6	0	0	6		
			(di roren 512)																	
			TOTAL	512		60	0	0	0	4	97	42	36	0	6	0	0	6		
2	Obat Tradisional/ Obat Palsu	sampel	Jakarta	115	Targeted	3	0	0	0	0	25	10	5	0	5	0	0	5		
			(di roren 144)																	
			Jakarta	269	Random	39	0	0	0	10	70	17	14	2	0	1	0	3		
			(di roren 336)																	
			TOTAL	384		42	0	0	0	10	95	27	19	2	5	1	0	8		
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	3	0	0	0	1	9	4	3	0	1	0	0	1		
			(di roren 48)																	
			Jakarta	90	Random	0	0	0	0	0	25	11	8	0	3	0	0	3		
			(di roren 112)																	
			TOTAL	128		3	0	0	0	1	34	15	11	0	4	0	0	4		
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	30	0	0	0	11	66	6	4	0	1	1	0	2		
			(di roren 671)																	
			Jakarta	479	Random	73	0	0	0	23	160	39	27	0	12	0	0	12		
			(di roren 671)																	
			TOTAL	767		103	0	0	0	34	226	45	31	0	13	1	0	14		
			Total Obat	102	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Obat Tradisional	115			3	0	0	0	0	25	10	5	0	5	0	0	5	
			Total Suplemen Kesehatan	38		3	0	0	0	1	9	4	3	0	1	0	0	1		
			Total Kosmetik	288		30	0	0	0	11	66	6	4	0	1	1	0	2		
			Jakarta	543	Targeted	36	0	0	0	12	100	20	12	0	7	1	0	8		
			(di roren 671)																	
			TOTAL	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543		36	0	0	0	12	100	20	12	0	7	1	0	8		
			Total Obat	410	Random	60	0	0	0	4	97	42	36	0	6	0	0	6		
			Total Obat Tradisional	269			39	0	0	0	10	70	17	14	2	0	1	0	3	
			Total Suplemen Kesehatan	90		0	0	0	0	0	25	11	8	0	3	0	0	3		
			Total Kosmetik	479		73	0	0	0	23	160	39	27	0	12	0	0	12		
			Jakarta	1248	Random	172	0	0	0	37	352	109	85	2	21	1	0	24		
			(di roren 671)																	
			TOTAL	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1,248		172	0	0	0	37	352	109	85	2	21	1	0	24		
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791		208	0	0	0	49	452	129	97	2	28	2	0	32		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	3	0	0	0	0	12	8	8	0	0	0	0	0		
			(di roren 671)																	
			Jakarta	607	Random	81	0	0	0	0	204	129	126	0	3	0	0	3		
			(di roren 671)																	
			TOTAL	745		84	0	0	0	0	216	137	134	0	3	0	0	3		
			TOTAL PANGAN	745		84	0	0	0	0	216	137	134	0	3	0	0	3		
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	25	0	0	0	0	55	30	27	3	0	0	0	3		
			(di roren 671)																	
			TOTAL	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total targeted	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Obat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	120	Targeted	25	0	0	0	0	55	30	27	3	0	0	0	3		
			TOTAL PANGAN	120	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		25	0	0	0	0	55	30	27	3	0	0	0	3		

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Mei											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****				TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(di roren 128)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jakarta	410		Random	60	0	0	0	3	115	42	39	0	3	0	0	3	
			(di roren 512)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	512		60	0	0	0	3	115	42	39	0	3	0	0	3		
2	Obat Tradisional/Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	115	Targeted	6	0	0	0	1	21	12	8	0	4	0	0	4		
			(di roren 144)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jakarta	269		Random	18	0	0	0	0	71	13	7	1	5	0	0	6	
			(di roren 336)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	384		24	0	0	0	1	92	25	15	1	9	0	0	10		
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	6	0	0	0	2	11	2	1	0	1	0	0	1		
			(di roren 48)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jakarta	90		Random	17	0	0	0	1	31	14	9	0	5	0	0	5	
			(di roren 112)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	128		23	0	0	0	3	42	16	10	0	6	0	0	6		
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	20	0	0	0	12	80	18	4	0	14	0	0	14		
			-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jakarta	479		Random	70	0	0	0	23	191	54	24	0	30	0	0	30	
			(di roren 671)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	767		90	0	0	0	35	271	72	28	0	44	0	0	44		
			Total Obat	102	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Obat Tradisional	115		6	0	0	0	1	21	12	8	0	4	0	0	4		
			Total Suplemen Kesehatan	38		6	0	0	0	2	11	2	1	0	1	0	0	1		
			Total Kosmetik	288	Targeted	20	0	0	0	12	80	18	4	0	14	0	0	14		
			Jakarta	543		32	0	0	0	15	112	32	13	0	19	0	0	19		
			(di roren 671)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543	Random	32	0	0	0	15	112	32	13	0	19	0	0	19		
			Total Obat	410		60	0	0	0	3	115	42	39	0	3	0	0	3		
			Total Obat Tradisional	269		18	0	0	0	0	71	13	7	1	5	0	0	6		
			Total Suplemen Kesehatan	90	Random	17	0	0	0	1	31	14	9	0	5	0	0	5		
			Total Kosmetik	479		70	0	0	0	23	191	54	24	0	30	0	0	30		
			Jakarta	1248		165	0	0	0	27	408	123	79	1	43	0	0	44		
			(di roren 671)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1,248	Random	165	0	0	0	27	408	123	79	1	43	0	0	44		
			Total Obat, OT, Sk dan Kos	1,791		197	0	0	0	42	520	155	92	1	62	0	0	63		
			TOTAL	1,791		197	0	0	0	42	520	155	92	1	62	0	0	63		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	3	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7		
			-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jakarta	607		Random	84	0	0	0	0	159	27	27	0	0	0	0	132	
			(di roren 671)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Pangan	138	Random	3	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7		
			Total Pangan	607		84	0	0	0	0	159	27	27	0	0	0	0	132		
			TOTAL PANGAN	745		87	0	0	0	0	166	27	27	0	0	0	0	139		
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	0	0	0	0	0	25	20	14	6	0	0	0	6		
			(di roren 671)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total targeted	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Obat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Pangan	120		0	0	0	0	0	25	20	14	6	0	0	0	6		
			Total Pangan	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		0	0	0	0	0	25	20	14	6	0	0	0	6		
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		0	0	0	0	0	25	20	14	6	0	0	0	6		

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Juni											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	
						Jumlah sampel	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab)	MK Penandaan dan TMS uji lab	TMK Penandaan dan MS Uji Lab	TMK Penandaan dan TMS uji lab				TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	5	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	4	1	
			(di roren 128)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	410	Random	75	0	0	0	1	148	74	73	0	1	0	0	1	74	
			(di roren 512)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	512		80	0	0	0	1	153	75	74	0	1	0	0	1	78	
2	Obat Tradisional/ Obat Herbal	sampel	Jakarta	115	Targeted	16	0	0	0	3	25	3	3	0	0	0	0	0	22	
			(di roren 144)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	269	Random	57	0	0	0	12	115	40	30	0	10	0	0	10	75	
			(di roren 336)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	384		73	0	0	0	15	140	43	33	0	10	0	0	10	97	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	3	0	0	0	0	12	5	4	0	1	0	0	1	7	
			(di roren 48)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	90	Random	13	0	0	0	1	30	17	16	0	1	0	0	1	13	
			(di roren 112)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	128		16	0	0	0	1	42	22	20	0	2	0	0	2	20	
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	20	0	0	0	6	82	33	17	0	16	0	0	16	49	
			-	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	479	Random	60	0	0	0	30	197	52	29	0	23	0	0	23	145	
			(di roren 671)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	767		80	0	0	0	36	279	85	46	0	39	0	0	39	194	
			Total Obat	102	Targeted	5	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	4	
			Total Obat Tradisional	115			16	0	0	0	3	25	3	3	0	0	0	0	22	
			Total Suplemen Kesehatan	38		3	0	0	0	0	12	5	4	0	1	0	0	1		
			Total Kosmetik	288		20	0	0	0	6	82	33	17	0	16	0	0	16		
			Jakarta	543	Targeted	44	0	0	0	9	124	42	25	0	17	0	0	17	82	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543		44	0	0	0	9	124	42	25	0	17	0	0	17		
			Total Obat	410	Random	75	0	0	0	1	148	74	73	0	1	0	0	1		
			Total Obat Tradisional	269			57	0	0	0	12	115	40	30	0	10	0	0		
			Total Suplemen Kesehatan	90		13	0	0	0	1	30	17	16	0	1	0	0			
			Total Kosmetik	479		60	0	0	0	30	197	52	29	0	23	0	0			
			Jakarta	1248	Random	205	0	0	0	44	490	183	148	0	35	0	0	35		
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1.248		205	0	0	0	44	490	183	148	0	35	0	0			
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791		249	0	0	0	53	614	225	173	0	52	0	0			
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	11	1	0	0	0	17	4	4	0	0	0	0	1		
			-	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jakarta	607	Random	49	0	0	0	0	181	134	122	12	0	0	0	12		
			(di roren 671)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Pangan	138	Targeted	11	1	0	0	0	17	4	4	0	0	0	0			
			Total Pangan	607	Random	49	0	0	0	0	181	134	122	12	0	0	0			
			TOTAL PANGAN	745		60	1	0	0	0	198	138	126	12	0	0	0			
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted	25	0	0	0	0	30	5	5	0	0	0	0			
			Jakarta	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(di roren 671)	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Total targeted	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Total Obat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Total Pangan	120	Targeted	25	0	0	0	0	30	5	5	0	0	0	0			
			Total Pangan	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Juli													Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji								
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																					
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	55	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	
			(di roren 128)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	410	Random	25	0	0	0	1	99	11	11	0	0	0	0	0	88	11	
			(di roren 512)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	512		80	0	0	0	1	158	11	11	0	0	0	0	0	147	11	
2	Obat Tradisional/Obat Paksi	sampel	Jakarta	115	Targeted	17	0	0	0	8	39	6	5	0	1	0	0	1	33	6	
			(di roren 144)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	269	Random	17	0	0	0	2	92	25	19	5	1	0	0	6	67	25	
			(di roren 336)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	384		34	0	0	0	10	131	31	24	5	2	0	0	7	100	31	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	4	0	0	0	2	11	1	1	0	0	0	0	0	10	1	
			(di roren 48)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	90	Random	6	0	0	0	1	19	5	4	0	1	0	0	1	14	5	
			(di roren 112)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	128		10	0	0	0	3	30	6	5	0	1	0	0	1	24	6	
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	31	0	0	0	24	80	16	10	0	6	0	0	6	64	16	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	479	Random	71	0	0	0	42	216	54	43	0	11	0	0	11	162	54	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	767		102	0	0	0	66	296	70	53	0	17	0	0	17	226	70	
			Total Obat	102	Targeted	55	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	
			Total Obat Tradisional	115			17	0	0	0	8	39	6	5	0	1	0	0	1	33	6
			Total Suplemen Kesehatan	38			4	0	0	0	2	11	1	1	0	0	0	0	0	10	1
			Total Kosmetik	288	Random	31	0	0	0	24	80	16	10	0	6	0	0	6	64	16	
			Jakarta	543		Targeted	107	0	0	0	34	189	23	16	0	7	0	0	7	166	23
			(di roren 671)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543	Random	107	0	0	0	34	189	23	16	0	7	0	0	7	166	23	
			Total Obat	410		Random	25	0	0	0	1	99	11	11	0	0	0	0	0	88	11
			Total Obat Tradisional	269				17	0	0	0	2	92	25	19	5	1	0	0	6	67
			Total Suplemen Kesehatan	90			6	0	0	0	1	19	5	4	0	1	0	0	1	14	5
			Total Kosmetik	479	Random	71	0	0	0	42	216	54	43	0	11	0	0	11	162	54	
			Jakarta	1248		Random	119	0	0	0	46	426	95	77	5	13	0	0	18	331	95
			(di roren 671)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1.248		119	0	0	0	46	426	95	77	5	13	0	0	18	331	95	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791		226	0	0	0	80	615	118	93	5	20	0	0	25	497	118	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																					
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	21	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34	0	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	607	Random	77	1	0	0	0	123	4	4	0	0	0	0	1	119	5	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Pangan	138	Targeted	21	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34	0	
			Total Pangan	607	Random	77	1	0	0	0	123	4	4	0	0	0	0	1	119	5	
			TOTAL PANGAN	745		98	1	0	0	0	157	4	4	0	0	0	0	1	153	5	
Sampel Makanan FORTIFIKASI																					
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	0	0	0	0	0	25	9	5	4	0	0	0	4	16	9	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total targeted	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Obat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Pangan	120	Targeted	0	0	0	0	0	25	9	5	4	0	0	0	4	16	9	
			Total Pangan	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		0	0	0	0	0	25	9	5	4	0	0	0	4	16	9	

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Agustus										Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA			
						Jumlah sampel	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	MS (MK perandaan dan MS uji lab) *	Hasil uji TMS							
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak					MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***				TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)	
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																					
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	8	0	0	0	0	67	12	12	0	0	0	0	55	12		
			(di roren 128)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	410	Random	22	0	0	0	1	110	42	39	0	3	0	0	3	68	42	
			(di roren 512)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	512		30	0	0	0	1	177	54	51	0	3	0	3	123	54		
2	Obat Tradisional/Obat Bahan	sampel	Jakarta	115	Targeted	0	0	0	0	0	33	18	11	4	2	1	0	7	15	18	
			(di roren 144)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	269	Random	28	0	0	0	13	95	49	38	2	9	0	0	11	46	49	
			(di roren 336)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	384		28	0	0	0	13	128	67	49	6	11	1	0	18	61	67	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	1	0	0	0	1	11	2	2	0	0	0	0	0	9	2	
			(di roren 48)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	90	Random	2	0	0	0	2	16	8	8	0	0	0	0	0	8	8	
			(di roren 112)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	128		3	0	0	0	3	27	10	10	0	0	0	0	0	17	10	
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	5	0	0	0	5	69	10	4	0	6	0	0	6	59	10	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	479	Random	0	0	0	0	0	162	38	26	0	12	0	0	12	124	38	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	767		5	0	0	0	5	231	48	30	0	18	0	0	18	183	48	
			Total Obat	102	Targeted	8	0	0	0	0	67	12	12	0	0	0	0	0	55	12	
			Total Obat Tradisional	115			0	0	0	0	0	33	18	11	4	2	1	0	7	15	18
			Total Suplemen Kesehatan	38			1	0	0	0	1	11	2	2	0	0	0	0	0	9	2
			Total Kosmetik	288	Random	5	0	0	0	5	69	10	4	0	6	0	0	6	59	10	
			Jakarta	543		Targeted	14	0	0	0	6	180	42	29	4	8	1	0	13	138	42
			(di roren 671)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543	Random	14	0	0	0	6	180	42	29	4	8	1	0	13	138	42	
			Total Obat	410			22	0	0	0	1	110	42	39	0	3	0	0	3	68	42
			Total Obat Tradisional	269			28	0	0	0	13	95	49	38	2	9	0	0	11	46	49
			Total Suplemen Kesehatan	90	Random	2	0	0	0	2	16	8	8	0	0	0	0	0	8	8	
			Total Kosmetik	479			0	0	0	0	0	162	38	26	0	12	0	0	12	124	38
			Jakarta	1248		Random	52	0	0	0	16	383	137	111	2	24	0	0	26	246	137
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1,248		52	0	0	0	16	383	137	111	2	24	0	0	26	246	137	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791		66	0	0	0	22	563	179	140	6	32	1	0	39	384	179	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																					
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	9	0	0	0	0	43	25	25	0	0	0	0	0	18	25	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jakarta	607	Random	49	1	0	0	0	167	45	45	0	0	0	0	1	122	46	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total Pangan	138	Targeted	9	0	0	0	0	43	25	25	0	0	0	0	0	18	25	
			Total Pangan	607	Random	49	1	0	0	0	167	45	45	0	0	0	0	1	122	46	
			TOTAL PANGAN	745		58	1	0	0	0	210	70	70	0	0	0	1	140	71		
Sampel Makanan FORTIFIKASI																					
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	0	0	0	0	0	16	16	13	3	0	0	0	3	0	16	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jakarta	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total targeted	0		0	0	0	0	0	16	16	13	3	0	0	0	3	0	16	
			Total Pangan	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		0	0	0	0	0	16	16	13	3	0	0	0	3	0	16	

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	September											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA			
						Jumlah sampel	TMK			Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	MS (MK perbandingan dan MS uji lab) *	Hasil uji TMS									
							TIE/ legal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				TMK Label/ Penandaan	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****				TMS Uji (Khusus Pangan Purpose)		
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																						
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	11	0	0	0	0	66	32	32	0	0	0	0	0	34	32		
			(di roren 128)								0	0							0	0	0	
			Jakarta	410			19	0	0	0	0	87	38	38	0	0	0	0	0	49	38	
			(di roren 512)		Random					0	0							0	0	0		
			-								0	0							0	0	0	
			TOTAL	512			30	0	0	0	0	153	70	70	0	0	0	0	0	83	70	
2	Obat Tradisional/ Obat Paten	sampel	Jakarta	115	Targeted	0	0	0	0	0	15	15	7	0	7	1	0	8	0	15		
			(di roren 144)								0	0						0	0	0		
			Jakarta	269			7	0	0	0	0	53	40	27	0	13	0	0	13	13	40	
			(di roren 336)		Random					0	0							0	0	0		
			-								0	0							0	0	0	
			TOTAL	384			7	0	0	0	0	68	55	34	0	20	1	0	21	13	55	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	0	0	0	0	0	9	8	4	0	4	0	0	4	1	8		
			(di roren 48)								0	0						0	0	0		
			Jakarta	90			1	1	0	0	0	8	6	5	0	1	0	0	2	2	7	
			(di roren 112)		Random					0	0							0	0	0		
			-								0	0							0	0	0	
			TOTAL	128			1	1	0	0	0	17	14	9	0	5	0	0	6	3	15	
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	54	0	0	0	40	113	11	4	0	7	0	0	7	102	11		
			-								0	0						0	0	0		
			Jakarta	479			31	0	0	0	19	155	32	20	0	12	0	0	12	123	32	
			(di roren 671)		Random					0	0							0	0	0		
			-								0	0							0	0	0	
			TOTAL	767			85	0	0	0	59	268	43	24	0	19	0	0	19	225	43	
			Total Obat	102	Targeted	11	0	0	0	0	66	32	32	0	0	0	0	19	34	32		
			Total Obat Tradisional	115			0	0	0	0	0	15	15	7	0	7	1	0	8	0	15	
			Total Suplemen Kesehatan	38			0	0	0	0	0	9	8	4	0	4	0	0	4	1	8	
			Total Kosmetik	288	Targeted	54	0	0	0	40	113	11	4	0	7	0	0	7	102	11		
			Jakarta	543			65	0	0	0	40	203	66	47	0	18	1	0	19	137	66	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-	0	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543			65	0	0	0	40	203	66	47	0	18	1	0	19	137	66	
			Total Obat	410		Random	19	0	0	0	0	87	38	38	0	0	0	0	0	49	38	
			Total Obat Tradisional	269			7	0	0	0	0	53	40	27	0	13	0	0	13	13	40	
			Total Suplemen Kesehatan	90			1	1	0	0	0	8	6	5	0	1	0	0	2	2	7	
			Total Kosmetik	479	Random	31	0	0	0	0	19	155	32	20	0	12	0	0	12	123	32	
			Jakarta	1248			58	1	0	0	19	303	116	90	0	26	0	0	27	187	117	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1248			53	1	0	0	19	303	116	90	0	26	0	0	27	187	117	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791			123	1	0	0	59	506	182	137	0	44	1	0	46	324	183	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																						
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	9	1	0	0	0	26	22	21	0	1	0	0	2	4	23		
			-								0	0							0	0	0	
			Jakarta	607			37	0	0	0	1	159	126	123	2	1	0	0	3	33	126	
			(di roren 671)		Random					0	0							0	0	0		
			-								0	0							0	0	0	
			Total Pangan	138			9	1	0	0	0	26	22	21	0	1	0	0	2	4	23	
			Total Pangan	607	Random	37	0	0	0	1	159	126	123	2	1	0	0	3	33	126		
			TOTAL PANGAN	745		46	1	0	0	1	185	148	144	2	2	0	0	5	37	149		
Sampel Makanan FORTIFIKASI																						
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(di roren 671)								0	0							0	0	0	
			-								0	0							0	0	0	
			Total targeted	0	Random					0	0								0	0	0	
			Total Obat	0							0	0								0	0	0
			Total Pangan	120			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Pangan	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Catatan :

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Oktober											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	
						Jumlah sampel	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	MS (MK penandaan dan MS uji lab)*	Hasil uji TMS						
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak					MK Penandaan dan TMS uji lab**	TMK Penandaan dan MS Uji Lab***	TMK Penandaan dan TMS uji lab****				TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	7	0	0	0	0	41	24	24	0	0	0	0	17	24	
			(di roren 128)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	410	Random	23	0	0	0	0	72	28	27	0	1	0	0	44	28	
			(di roren 512)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	512		30	0	0	0	0	113	52	51	0	1	0	0	61	52	
2	Obat Tradisional/Obat Herbal	sampel	Jakarta	115	Targeted	11	0	0	0	3	11	7	6	0	1	0	0	4	7	
			(di roren 144)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	269	Random	5	0	0	0	3	18	9	3	0	6	0	0	9	9	
			(di roren 336)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	384		16	0	0	0	6	29	16	9	0	7	0	0	13	16	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	4	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	4	1	
			(di roren 48)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	90	Random	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2	
			(di roren 112)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	128		4	0	0	0	1	7	3	3	0	0	0	0	4	3	
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	30	0	0	0	26	132	63	21	0	42	0	0	69	63	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	479	Random	14	0	0	0	9	137	90	40	0	50	0	0	47	90	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	767		44	0	0	0	35	269	153	61	0	92	0	0	116	153	
			Total Obat	102	Targeted	7	0	0	0	0	41	24	24	0	0	0	0	17	24	
			Total Obat Tradisional	115			11	0	0	0	3	11	7	6	0	1	0	0	4	7
			Total Suplemen Kesehatan	38		4	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	4	1	
			Total Kosmetik	288		30	0	0	0	26	132	63	21	0	42	0	0	69	63	
			Jakarta	543	Targeted	52	0	0	0	30	189	95	52	0	43	0	0	94	95	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543		52	0	0	0	30	189	95	52	0	43	0	0	94	95	
			Total Obat	410	Random	23	0	0	0	0	72	28	27	0	1	0	0	44	28	
			Total Obat Tradisional	269			5	0	0	0	3	18	9	3	0	6	0	9	9	
			Total Suplemen Kesehatan	90		0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2		
			Total Kosmetik	479		14	0	0	0	9	137	90	40	0	50	0	0	47	90	
			Jakarta	1248	Random	42	0	0	0	12	229	129	72	0	57	0	0	100	129	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1,248		42	0	0	0	12	229	129	72	0	57	0	0	100	129	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791		94	0	0	0	42	418	224	124	0	100	0	0	194	224	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	3	0	0	0	0	7	7	5	1	1	0	0	7	7	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	607	Random	19	0	0	0	0	52	39	36	2	0	1	0	13	39	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN	745		22	0	0	0	0	59	46	41	3	1	1	0	13	46	
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total targeted	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Obat	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	November											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****				TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	5	0	0	0	0	22	20	20	0	0	0	0	2	20	
			(di roren 128)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	410	Random	10	0	0	0	0	54	51	50	0	1	0	0	3	51	
			(di roren 512)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	512		15	0	0	0	0	76	71	70	0	1	0	0	5	71	
2	Obat Tradisional/Obat Bahan	sampel	Jakarta	115	Targeted	2	0	0	0	0	6	6	4	0	2	0	0	2	6	
			(di roren 144)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	269	Random	6	0	0	0	3	15	5	4	0	1	0	0	10	5	
			(di roren 336)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	384		8	0	0	0	3	21	11	8	0	3	0	0	10	11	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	0	0	0	0	0	4	4	3	0	1	0	0	1	4	
			(di roren 48)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	90	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 112)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	128		0	0	0	0	0	4	4	3	0	1	0	0	1	4	
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	23	0	0	0	22	92	28	8	0	20	0	0	64	28	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	479	Random	10	0	0	0	7	57	24	11	0	13	0	0	33	24	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	767		33	0	0	0	29	149	52	19	0	33	0	0	97	52	
			Total Obat	102	Targeted	5	0	0	0	0	22	20	20	0	0	0	0	2	20	
			Total Obat Tradisional	115			2	0	0	0	0	6	6	4	0	2	0	0	6	
			Total Suplemen Kesehatan	38			0	0	0	0	0	4	4	3	0	1	0	0	4	
			Total Kosmetik	288	Random	23	0	0	0	22	92	28	8	0	20	0	0	64	28	
			Jakarta	543			30	0	0	0	22	124	58	35	0	23	0	23	66	58
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543		30	0	0	0	22	124	58	35	0	23	0	23	66	58	
			Total Obat	410	Random	10	0	0	0	0	54	51	50	0	1	0	0	3	51	
			Total Obat Tradisional	269			6	0	0	0	3	15	5	4	0	1	0	10	5	
			Total Suplemen Kesehatan	90			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Kosmetik	479	Random	10	0	0	0	7	57	24	11	0	13	0	0	33	24	
			Jakarta	1248			26	0	0	0	10	126	80	65	0	15	0	15	46	80
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1,248		26	0	0	0	10	126	80	65	0	15	0	15	46	80	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791		56	0	0	0	32	250	138	100	0	38	0	0	112	138	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	53	0	0	0	1	53	50	49	0	1	0	0	3	50	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	607	Random	14	0	0	0	1	27	12	8	4	0	0	0	15	12	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN	745		67	0	0	0	2	80	62	57	4	1	0	0	18	62	
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jakarta	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA		
						Jumlah sampel g	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji								
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****				TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)	
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																					
1	Obat	sampel	Jakarta	102	Targeted	7	0	0	0	0	9	7	7	0	0	0	0	0	2	7	
			(di roren 128)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jakarta	410	Random	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	
			(di roren 512)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	512		7	0	0	0	0	12	10	10	0	0	0	0	0	2	10	
2	Obat Tradisional/Obat Paku	sampel	Jakarta	115	Targeted	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
			(di roren 144)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jakarta	269	Random	1	0	0	0	0	11	11	8	0	1	2		3	0	11	
			(di roren 336)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	384		2	0	0	0	0	12	12	9	0	1	2	0	3	0	12	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	38	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 48)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jakarta	90	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 112)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	0	0	0	0	0	64	64	7	0	56	1		57	0	64	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jakarta	479	Random	5	0	0	0	4	38	38	12	1	24	1		26	0	38	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	767		5	0	0	0	4	102	102	19	1	80	2	0	83	0	102	
			Total Obat	102	Targeted	7	0	0	0	0	9	7	7	0	0	0	0	0	2	7	
			Total Obat Tradisional	115			1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
			Total Suplemen Kesehatan	38			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total Kosmetik	288	Targeted	0	0	0	0	0	64	64	7	0	56	1		57	0	64	
			Jakarta	543			8	0	0	0	0	74	72	15	0	56	1	0	57	2	72
			(di roren 671)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	543	Random	8	0	0	0	0	74	72	15	0	56	1	0	57	2	72	
			Total Obat	410			0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3
			Total Obat Tradisional	269			1	0	0	0	0	11	11	8	0	1	2	0	3	0	11
			Total Suplemen Kesehatan	90	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total Kosmetik	479			5	0	0	0	4	38	38	12	1	24	1	0	26	0	38
			Jakarta	1248			6	0	0	0	4	52	52	23	1	25	27	0	29	0	52
			(di roren 671)	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	1,248			6	0	0	0	4	52	52	23	1	25	3	0	29	0	52
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1791			14	0	0	0	4	126	124	38	1	81	4	0	86	2	124
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																					
1	Pangan	sampel	Jakarta	138	Targeted	7	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jakarta	607	Random	10	0	0	0	0	25	25	25	0	0	0	0	0	0	25	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL PANGAN	745		17	0	0	0	0	35	35	35	0	0	0	0	0	0	35	
Sampel Makanan FORTIFIKASI																					
1	Pangan	sampel	Jakarta	120	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(di roren 671)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total targeted	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total Obat	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL PANGAN	120	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lampiran 6. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Iklan dan Label/Penandaan tahun 2021

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
OBAT	Iklan	MK	22	15	18	8	3	31	14	10	10	14	5	2	152
		Jakart	22	15	18	8	3	31	14	10	10	14	5	2	152
		-													0
		-													0
		TMK	3	9	13	23	1	29	12	5	3	21	3	0	122
		Jakart	3	9	13	23	1	29	12	5	3	21	3	0	122
	Label	-													0
		-													0
		MK	19	34	52	56	57	79	80	23	30	30	15	7	482
		Jakart	19	34	52	56	57	79	80	23	30	30	15	7	482
		-													0
		-													0
OBAT TRADISIONAL	Iklan	TMK	1	6	8	4	3	1	0	1	0	0	0	0	24
		Jakart	1	6	8	4	3	1	0	1	0	0	0	0	24
		-													0
		-													0
		MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jakart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Label	-													0
		-													0
		MK	23	30	25	22	50	15	0	13	10	5	12	2	219
		Jakart	23	30	25	22	50	15	0	13	10	5	12	2	219
		-													0
		-													0

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
		-												0	
		-												0	
		TMK	0	2	26	10	1	14	10	12	0	6	3	0	84
		Jakart	0	2	26	10	1	14	10	12	0	6	3	0	84
		-												0	
		-												0	
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jakart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-													0
		-													0
		TMK	10	20	15	15	5	5	10	5	2	2	4	2	95
		Jakart	10	20	15	15	5	5	10	5	2	2	4	2	95
			-												0
			-												0
	Label	MK	19	25	16	2	20	15	7	0	1	3	0	0	108
		Jakart	19	25	16	2	20	15	7	0	1	3	0	0	108
		-													0
		-													0
TMK		0	0	10	1	3	1	3	3	0	1	0	0	22	
Jakart		0	0	10	1	3	1	3	3	0	1	0	0	22	
		-												0	
		-												0	
KOSMETIK	Iklan	MK	2	290	171	59	92	30	13	13	51	10	4	5	740
		Jakart	2	290	171	59	92	30	13	13	51	10	4	5	740
		-													0
		-													0
		TMK	19	30	18	10	50	22	6	2	24	15	14	16	226

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
	Jakart	19	30	18	10	50	22	6	2	24	15	14	16	226
	-													0
	-													0
	MK	17	76	32	69	55	56	36	16	10	9	4	1	381
	Jakart	17	76	32	69	55	56	36	16	10	9	4	1	381
	-													0
	-													0
	TMK	3	26	66	34	35	24	66	19	35	35	29	4	107
	Jakart	3	26	66	34	35	24	66	19	35	35	29	4	107
	-													0
	-													0
	MK	0	20	6	19	20	5	5	8	10	7	5	2	107
	Jakart	0	20	6	19	20	5	5	8	10	7	5	2	107
	-													0
	-													0
	TMK	50	60	44	31	30	45	45	47	45	48	50	16	511
	Jakart	50	60	44	31	30	45	45	47	45	48	50	16	511
	-													0
	-													0
	MK	80	98	93	108	86	77	97	57	44	20	66	17	843
	Jakart	80	98	93	108	86	77	97	57	44	20	66	17	843
	-													0
	-													0
	TMK	2	3	0	1	0	9	1	1	2	0	1	0	20
	Jakart	2	3	0	1	0	9	1	1	2	0	1	0	20
	-													0
	-													0
	MK	4	6	4	4	3	2	0	0	1	4	2	1	31

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan														
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total		
ROKOK	Iklan	Jakart	4	6	4	4	3	2	0	0	1	4	2	1	31	
		-													0	
		-														0
		TMK	26	24	26	26	27	28	30	30	29	26	28	29	329	
	Label	Jakart	26	24	26	26	27	28	30	30	29	26	28	29	329	
		-													0	
		-													0	
		MK	7	10	0	0	7	13	7	8	15	14	13	15	109	
	Label	Jakart	7	10	0	0	7	13	7	8	15	14	13	15	109	
		-													0	
		-													0	
		TMK	8	5	15	15	8	2	8	11	0	1	2	0	75	
	Label	Jakart	8	5	15	15	8	2	8	11	0	1	2	0	75	
		-													0	
-														0		
-														0		
TOTAL	Iklan	MK	28	331	199	90	118	68	32	31	72	35	16	10	1.030	
		Jakarta	28	331	199	90	118	68	32	31	72	35	16	10	1.030	
		-													0	
		-													0	
	Label	TMK	131	173	141	127	163	144	115	102	113	117	111	65	1.502	
		Jakarta	131	173	141	127	163	144	115	102	113	117	111	65	1.502	
		-													0	
		-													0	
	Total Iklan	Total Iklan	159	504	340	217	281	212	147	133	185	152	127	75	2.532	
		MK	171	301	229	267	248	299	251	120	107	86	103	42	2.224	
		Jakarta	171	301	229	267	248	299	251	120	107	86	103	42	2.224	
		-													0	

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
	-													0
	TMK	14	42	125	65	50	51	88	47	37	43	35	4	601
	Jakart	14	42	125	65	50	51	88	47	37	43	35	4	601
	-													0
	-													0
	Total	185	343	354	332	298	350	339	167	144	129	138	46	2.825



BADAN POM

Lampiran 7.Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Layanan
Informasi Tahun 2021

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Layanan informasi a)	207	221	245	206	152	221	208	267	279	276	282	246	2810
														0
2	Layanan pengaduan b)	2	3	3	1	2	0	6	3	4	3	2	2	31
														0
														0
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c)	1	3	2	4	1	2	2	4	2	5	5	2	33
														0
														0
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh	0	2	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	10
														0
														0
5	KIE di Area <i>Car Free Day</i> (CFD), Pameran, Sosialisasi e)	0	0	1	7	7	1	0	0	0	0	4	10	30
														0
														0
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	17	26	34	33	41	66	42	36	26	22	25	18	386
														0
														0
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
														0
														0
8	Sebagai Narasumber h)	0	2	3	7	0	13	0	0	1	0	1	1	28
														0
														0
Total	Total	227	257	290	262	204	305	258	310	312	306	319	279	3320
		227	257	290	262	204	305	258	310	312	306	319	279	3320

Keterangan

- a) Jumlah layanan informasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Simpel LPK
- b) Jumlah layanan pengaduan yang diterima oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Simpel LPK
- c) Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh Balai Besar/Balai/Loka POM (status tindak lanjut pada Aplikasi Simpel LPK berubah menjadi "SUDAH")
- d) Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan termasuk KIE bersama Tokoh Masyarakat (DPR)
- e) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya
- f) KIE yang dilakukan melalui jumlah postingan di media sosial (Instagram/Triwulanitter/Facebook) per bulan
- g) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi
- h) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang menggunakan anggaran DIPA Badan POM
- i) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR
- j) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR/permintaan dari media
- k) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/undangan dari stakeholder

Lampiran 8. Layanan Informasi yang Dilaksanakan BBPOM di Jakarta

Tahun 2021

No	Sarana yang digunakan	BULAN												Total
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Langsung	46	38	52	0	0	26	75	43	48	37	50	43	458
2	Telepon	10	5	22	4	0	17	64	35	40	41	38	18	294
3	Fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Surat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	E-mail	1	3	10	6	9	13	27	15	4	9	9	6	112
6	SMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak saran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	0	0	9	24	27	50	54	57	52	58	129	69	529
10	Aplikasi Lain*	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
	JUMLAH	57	45	95	34	36	118	220	150	144	145	226	136	1407

BADAN POM

Lampiran 9. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			B03	B06	B09	B12	Anggaran	B03	B06	B09	B12	Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.5%	86.5%	86.5%	80%	309.593.550	81.25%	79.23%	79.57%	74.88%	306.909.050
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	95%	162.471.050	92.06%	96.02%	96.22%	94.73%	162.434.585
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.5%	86.5%	86.5%	80%	309.593.550	87.50%	72.78%	72.73%	59.74%	306.909.050
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78.5%	78.5%	78.5%	81%	162.471.050	78.85%	74.02%	76.26%	94.93%	162.434.585
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	88%	17.276.000	-	-	-	81.67%	8.605.310
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	85	156.071.850	-	-	-	102.49	155.859.022
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	86.6	56.977.100	-	-	-	86.7	56.943.540
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74.98	156.071.850	-	-	-	73.8	155.859.022
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	-	-	-	90	1.111.991.500	-	-	-	95.61	1.105.313.395

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			B03	B06	B09	B12	Anggaran	B03	B06	B09	B12	Anggaran
	POM di Jakarta	Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta										
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	89%	142.442.750	97.19%	86.03%	83.90%	92.19%	142.358.851
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.2%	60.2%	60.2%	75%	142.442.750	83.84%	80.90%	79.13%	78.02%	142.358.851
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	120.083.000	91.54%	94.32%	96.84%	97.23%	120.078.677
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%	48%	48%	60%	39.864.000	60.66%	63.98%	79.23%	69.02%	39.809.480
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57%	57%	73%	188.044.400	86.94%	83.50%	68.15%	79.21%	187.964.682
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	4.2	160.801.300	-	-	4.54	4.54	160.582.023
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.99	90.99	90.99	93	1.624.100.000	93.59	93.59	93,73	93.83	1.624.098.100
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20% (progress)	45% (progress)	55% (progress)	40	354.018.000	20% (progress)	50% (progress)	65% (progress)	40	353.767.400
		Jumlah desa pangan aman	25% (progress)	40% (progress)	65% (progress)	14	783.316.000	25% (progress)	45% (progress)	65% (progress)	14	783.315.500
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25% (progress)	60% (progress)	80% (progress)	2	100.431.000	25% (progress)	70% (progress)	90% (progress)	2	100.431.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	100%	265.365.900	10.36%	32.43%	67.27%	90.85%	263.064.900

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			B03	B06	B09	B12	Anggaran	B03	B06	B09	B12	Anggaran
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	100%	146.664.900	14.91%	41.05%	67.87%	96.42%	139..229.644
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	20%	30%	54%	1.042.636.000	10.74%	24.91%	45.69%	58.61%	1.042.404.417
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	82.4	352.105.500	-	-	-	82.29	351.412.715
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	79.1	430.407.500	-	-	-	79.85	429.893.014
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	84.25	24.425.665.000	-	-	-	84.7	24.359.468.512
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>	-	-	-	77	7.827.731.500	-	-	-	80.5	7.822.695.837
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	2	2	2	315.548.000	2.1	1.7	1,825	2.475	314.560.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	14	37	56	91.9	352.105.500			83,67	86.16	351.412.715

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			B03	B06	B09	B12	Anggaran	B03	B06	B09	B12	Anggaran
	Jakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	430.407.500	75%	75%	78%	100%	429.893.014

*) Realisasi dihitung terhadap target APBN-P



BADAN POM



BADAN POM





BADAN POM

